

**PENGAMBILAN KEPUTUSAN DALAM PEMBANGUNAN  
INFRASTRUKTUR DESA**

**(Studi Kasus Desa Binangun Kabupaten Cilacap Tahun 2022-2023)**

**Skripsi**

**Program Sarjana (S-1)**

**Jurusan Ilmu Politik**



Disusun oleh :

**Ahmad Khubbi Sauhi**

2006016012

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

**2024**

## NOTA PEMBIMBING

Lamp : 5 (lima) eksemplar  
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi  
Kepada  
Yth. Dekan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
UIN Walisongo Semarang  
di Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

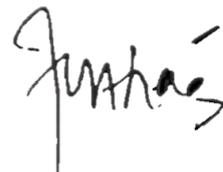
Setelah membaca, mengadakan koreksi, dan perbaikan sebagaimana mestinya, saya menyatakan bahwa skripsi dari saudara :

Nama : Ahmad Khubbi Sauhi  
NIM : 2006016012  
Jurusan : Ilmu Politik  
Judul Skripsi : Pengambilan Keputusan dalam Pembangunan Infrastruktur Desa  
(Studi Kasus Desa Binangun, Kabupaten Cilacap Tahun 2022-  
2023)

Dengan ini telah saya setuju dan mohon agar segera dapat diujikan. Demikian atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Semarang, 26 Agustus 2024  
Pembimbing



Tika Ifrida Takayasa, M.A

# LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

## SKRIPSI

### PENGAMBILAN KEPUTUSAN DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA

(Studi Kasus Desa Binangun Kabupaten Cilacap Tahun 2022-2023)

Disusun oleh:

**Ahmad Khubbi Sauli**

2006016012

Telah dipertahankan di depan mejelis penguji sidang skripsi pada tanggal 20 September 2024 dan telah dinyatakan lulus.

Susunan Dewan Penguji

Ketua



Prof. Imam Yahya, M.Ag.

NIP. 197004101995031001

Sekretaris

Tika Ifrida Takayasa, M.A

NIP. 198811152019032018

Penguji I

Muhamad Mahsun, M.A

NIP. 198511182016011901

Pembimbing

Tika Ifrida Takayasa, M.A

NIP. 198811152019032018

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya Ahmad Khubbi Sauhi menyatakan bahwa skripsi saya dengan judul “*Pengambilan Keputusan Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa (Studi Kasus Desa Binangun, Kabupaten Cilacap Tahun 2022-2023)*” merupakan hasil karya penulisan saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya pihak lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di UIN Walisongo Semarang ataupun di lembaga pendidikan tinggi lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 26 Agustus 2024

Yang Menyatakan



Ahmad Khubbi Sauhi

20060106012

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul *“Pengambilan Keputusan Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa (Studi Kasus Desa Binangun, Kabupaten Cilacap Tahun 2022-2023)”*. Sholawat serta salam tidak lupa penulis panjatkan kepada Rasulullah SAW yang telah memberikan syafaatnya kepada kita semua, sehingga dapat menjadi umat yang memiliki akhlakul karimah.

Dengan selesainya skripsi ini merupakan sebuah pencapaian luas biasa bagi penulis dan menjadi hasil akhir selama mengikuti proses perkuliahan dan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ilmu Politik S1 pada program studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang. Penulis menyadari bahwa dalam proses pembelajaran dan penyusunan skripsi ini penulis tidak dapat menyelesaikan tanpa bantuan, bimbingan, dukungan, dan kasih sayang dari berbagai pihak. Rasa syukur saya persembahkan teruntuk orang-orang yang selalu menjadi penyemangat dan menjadi alasan saya untuk kuat, terima kasih kepada :

1. Rektor UIN Walisongo Semarang, Prof. Dr. Nizar, M.Ag., yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengenyam pendidikan dan menyelesaikan studi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang, Bapak Prof. Dr. H. Imam Yahya, M.Ag., yang telah memberikan berbagai ilmu, arahan, dan nasehat selama penulis mengenyam pendidikan di jurusan Ilmu Politik FISIP UIN Walisongo Semarang.
3. Kepala Jurusan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang, Bapak M. Nuqlir Bariklana, M.Si., dan Ibu Masrohatun, M.Si., selaku sekretaris jurusan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan dukungan, arahan, dan berbagai ilmu kepada penulis selama perkuliahan.
4. Dosen pembimbing terbaik, Ibu Tika Ifrida Takayasa, M.A., yang telah sabar dalam membimbing, memberi masukan, arahan, memotivasi, dan meluangkan waktu, tenaga, pikiran kepada penulis. Sehingga, penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.

5. Bapak/Ibu Dosen, dan segenap jajaran civitas akademika Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan berbagai ilmu dan pengalamannya, membantu penulis dalam memenuhi segala kebutuhan administratif dalam penyusunan skripsi ini.
6. Pemerintah Desa Binangun, dan segenap narasumber yang bersedia meluangkan waktunya untuk wawancara dengan penulis dan telah memberikan izin serta berbagai informasi kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi dengan lancar.
7. Keluargaku tercinta, Bapak Suparmun dan Ibu Nuridah serta Adikku Khusna Nadiya Putri, terima kasih telah memberikan doa, pengorbanan, semangat, dukungan berupa moral dan materi kepada penulis. Terkhusus kepada orang tuaku yang selalu berjuang untuk merawat dan membesarkan saya dengan penuh rasa cinta, kehangatan, dan kasih sayang sehingga penulis dapat berada di posisi saat ini. Semoga Allah SWT selalu melindungi Bapak Ibu dan adiku dengan diberikan panjang umur, kesehatan, kebahagiaan baik di dunia maupun diakhirat kelak *amin*.
8. Abah yai Abbas Masrukhin dan Gus Saiful amar Lc. M.Si beserta jajaran ustadz sebagai guru mengaji penulis di PP Al-Ma'rufiyah yang selalu memberikan do'a, bimbingan dan nasehat kepada penulis sebagai seorang santri di pondok tersebut.
9. Segenap teman seperjuangan penghuni penjara suci PP Al-Ma'rufiyah dalam mengemban ilmu agama. Terkhusus penghuni kamar *Darrusyukur* sebagai tempat penulis mengerjakan skripsi. Khanan, Rizqon, Afifi, Syahru, Ibnu, Zain, Topik, Mbah Khamid, Tohir yang selalu menghibur, memberikan dukungan dan menerima keadaan penulis.
10. Para penghuni basecamp semaci jilid 1 dan al-kontrakiyah jilid 1 & 2 yang menerima penulis ikut tinggal bersama dan dalam mengerjakan skripsi selalu memberikan *support*, saran dan sebagai tempat bercerita berkeluh kesah selama masa perkuliahan dan berorganisasi.
11. Seluruh teman seperjuangan angkatan 2020 Ilmu Politik kelas A, B, dan C UIN Walisongo Semarang terimakasih atas *support*, bantuan dan do'anya selama masa perkuliahan.

12. PMII, FSC, QAI, SEMA menjadi tempat penulis dalam belajar berproses berorganisasi di lingkup Fakultas FISIP memberikan wawasan, pengalaman dan relasi kepada penulis selama masa perkuliahan.
13. Segenap keluarga besar SEMACI Walisongo Semarang yang menjadi rumah tempat kembali penulis, dapat berkumpul dengan sedulur-sedulur mahasiswa Cilacap yang selalu menjunjung tinggi kebersamaan, memberikan pengalaman, kebahagiaan, dukungan dan do'a kepada penulis. Terkhusus angkatan 20 SEMACI dan massa kepengurusan SEMACI periode 2022-2023.
14. Segenap keluarga besar IMAKE Walisongo Semarang yang juga menjadi keluarga bagi penulis selama masa perkuliahan dapat berkumpul dan berproses bersama dengan saudara-saudara kebumen dan selalu memberikan *support* serta do'a terbaik selama ini.
15. Rekan KKN MIT-16 Posko 38 yaitu Anita, Inayah, Ibnu, Dinda, Fati, Silvy, Wisnu, Aola, Nurul, Dinu, Hanafi, Shofi, Ahmad, Faozi atas pengalaman 49 harinya kita bersama berproses dan mengabdikan di Desa Winong dengan penuh keluh kesah, canda tawa kita lalui bersama seperti saudara yang saling support dan saling memberikan do'a yang terbaik.
16. Warga Desa Winong khususnya kepada kepala desa Bapak Angsori, Bapak Muzdakir, Pak yai Istakhori dan Mbah yai Zaenuri yang selalu memberikan do'a dan motivasi kepada penulis. Dan tidak lupa kepada rekan-rekan SARPOH yang memberikan pengalaman berharga saat menajalani tugas kkn dan selalu memberikan support yang terbaik.
17. Sahabat seperjuangan penulis, Ibnu Dai Munis, Edi Sujarwo, Wisnu Alamsyah, Duski, Rifkiyatul Inayah, Nurul Latifah, yang sangat membantu penulis selama mengerjakan skripsi baik dalam bentuk motivasi, saran, bantuan, dukungan, do'a dan mau mendengarkan keluh kesah penulis.
18. Semua pihak yang sudah membantu penulis semasa perkuliahan dan saat dalam pengerjaan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas kebersamaan dan bantuan yang diberikan kepada penulis.
19. Terakhir, terima kasih kepada diri sendiri Ahmad Khubbi Sauhi yang sampai saat ini mampu berjuang dan berusaha keras sampai sejauh ini. *Alhamdulillah* masih bisa bertahan dan pantang menyerah sampai dapat menuntaskan tanggung jawab sebagai mahasiswa dan kepada orangtua.

Penulis menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik, saran, dan masukan yang membangun sangat penulis butuhkan agar skripsi ini dapat meningkatkan kualitas dan berguna bagi para pembaca. Akhir kata, penulis sampaikan terima kasih atas perhatiannya.

Semarang, 26 Agustus 2024

Penulis

A handwritten signature in dark ink, consisting of a large loop on the right side and several horizontal and diagonal strokes on the left side.

Ahmad Khubbi Sauhi

2006016012

## **PERSEMBAHAN**

*Bismillahirrahmanirrahim*

Dengan mengucapkan do'a dan rasa syukur atas rahmat dan hidayah kepada  
Allah SWT

Saya mempersembahkan karya ini untuk kedua orang tua tercinta saya Bapak Suparmun dan Ibu Nuridah yang telah membesarkan dan mendidik saya dengan penuh kasih sayang, yang selalu memberikan dukungan dalam segala hal saat menjalani hidup, yang selalu memanjatkan untaian do'a tulus di setiap langkah kaki saya tanpa henti untuk kesuksesan saya

## MOTTO

“ Sesungguhnya Beserta Kesulitan Ada Kemudahan”

(Q.S Al-Insyirah)

“Tetaplah selalu berdo'a dan berusaha. Karena setiap orang punya masanya walaupun setiap masa belum tentu akulah orangnya”

“Jika kau menungguku untuk menyerah, kau akan menungguku selamanya dan aku takan menarik kembali kata-kataku, karena itu adalah jalan ninjaku”

(Naruto Uzumaki)

## ABSTRAK

Penelitian ini akan membahas pengambilan keputusan dalam pembangunan infrastruktur desa (studi kasus Desa Binangun, Kabupaten Cilacap Tahun 2022-2023). Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui proses pengambilan keputusan dalam pembangunan infrastruktur desa serta model keputusan apa yang digunakan dan dampak apa yang dapat diberikan untuk pembangunan dan masyarakat di Desa Binangun. Tujuan dari adanya suatu pembangunan infrastruktur adalah untuk memfasilitasi masyarakat guna memajukan perekonomian untuk menuju kesejahteraan. Untuk menjawab permasalahan tersebut. Studi ini menggunakan teori pengambilan keputusan model rasional menurut E. F. Harrison. Penelitian ini menggambarkan fenomena dari data yang diperoleh dilokasi penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian lapangan dan pendekatan studi kasus. Sumber pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Narasumber yang dipilih pada penelitian ini meliputi kepala desa, kepala dusun, ketua Rt/Rw, BPD, LPMD, PKK, tokoh masyarakat, pemuda dan pemudi, tokoh agama, kelompok tani Desa Binangun.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses pengambilan keputusan dalam pembangunan infrastruktur melibatkan partisipasi aktor politik desa meliputi kepala desa, ketua BPD, ketua LPMD, kepala dusun, ketua RT/RW, Anggota PKK, Karantaruna, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, kelompok tani Desa Binangun. Aktor politik yang paling dominan dalam pengambilan keputusan tersebut adalah dari kepala desa yang memiliki kewenangan jabatan politik yang lebih tinggi serta mempunyai pengaruh yang kuat di kalangan masyarakat. Proses pengambilan keputusan pembangunan infrastruktur melalui tahap perencanaan yang dimulai dari bawah melalui musdus dan dimusyawarahkan kembali perencanaan tersebut melalui musrenbangdes untuk menghasilkan keputusan bersama. Kemudian pada tahap pelaksanaan, pengambilan keputusan diambil untuk merealisasikan program kerja yang telah direncanakan. Tahap terakhir proses pengambilan keputusan dalam pembangunan adalah evaluasi sebagai tolak ukur menilai kinerja pemerintah desa untuk menganalisis yang menjadi faktor pendukung dan penghambat proses pembangunan. Dilihat dari temuan hasil peneliti mengenai proses pengambilan keputusan tersebut, menggunakan model rasionalitas menurut pandangan E.F. Harrison. Pada model tersebut menunjukkan masih terjadi sentralitas dari kepala desa selaku aktor politik sebagai pengambil keputusan yang paling dominan sehingga memberikan dampak yang masih kurang maksimal pada pembangunan infrastruktur dan masyarakat Desa Binangun.

**Kata Kunci :** Pengambilan Keputusan, Pembangunan Infrastruktur, Aktor Politik Desa, Desa Binangun.

## **ABSTRACT**

*This study will discuss decision making in village infrastructure development (case study of Binangun Village, Cilacap Regency in 2022-2023). The purpose of this study is to determine the decision-making process in village infrastructure development and what decision models are used and what impacts can be given to development and society in Binangun Village. The purpose of infrastructure development is to facilitate the community to advance the economy towards prosperity. To answer this problem. This study uses the rational decision-making model theory according to E. F. Harrison. This study describes the phenomenon of data obtained at the research location. This study uses a descriptive qualitative research method with a field research type and a case study approach. The source of data collection in this study uses interview and documentation methods. The sources selected in this study include the village head, hamlet head, RT/RW head, BPD, LPMD, PKK, community leaders, young men and women, religious leaders, and Binangun Village farmer groups.*

*The results of this study indicate that the decision-making process in infrastructure development involves the participation of village political actors including the village head, BPD chairman, LPMD chairman, hamlet head, RT/RW chairman, PKK members, Karantaruna, community leaders, youth leaders, women's leaders, Binangun Village farmer groups. The most dominant political actor in making the decision is the village head who has the authority of a higher political position and has a strong influence among the community. The decision-making process for infrastructure development goes through a planning stage that starts from the bottom through the musdus and is discussed again through the planning musrenbangdes to produce a joint decision. Then at the implementation stage, decisions are taken to realize the planned work program. The last stage of the decision-making process in development is evaluation as a benchmark for assessing the performance of the village government to analyze the supporting and inhibiting factors in the development process. Judging from the findings of the researcher's results regarding the decision-making process, using the rationality model according to E.F. Harrison's view. This model shows that there is still centrality from the village head as a political actor as the most dominant decision maker so that it has a less than optimal impact on infrastructure development and the Binangun Village community.*

**Keywords:** *Decision Making, Infrastructure Development, Village Political Actors, Binangun Village.*

## DAFTAR ISI

<b>NOTA PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>x</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xviii</b>
<b>BAB I</b> .....	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang</b> .....	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah</b> .....	<b>3</b>
<b>C. Tujuan Penelitian</b> .....	<b>4</b>
<b>D. Manfaat penelitian</b> .....	<b>4</b>
<b>E. Kajian Pustaka</b> .....	<b>5</b>
1. Pembangunan Infrastruktur.....	<b>5</b>
2. Pengambilan Keputusan Pembangunan Infrastruktur.....	<b>7</b>
<b>F. Metode Penelitian</b> .....	<b>9</b>
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	<b>9</b>
2. Sumber Data.....	<b>10</b>
3. Teknik Pengumpulan Data.....	<b>11</b>
4. Teknik Analisis Data.....	<b>13</b>

<b>G. Sistematika Penulisan</b> .....	15
<b>BAB II</b> .....	<b>17</b>
<b>KERANGKA TEORI</b> .....	<b>17</b>
<b>A. Definisi Konseptual</b> .....	17
1. Pengambilan Keputusan.....	17
2. Pembangunan.....	18
3. Infrastruktur .....	20
<b>B. Kerangka Teori</b> .....	21
1. Teori Pengambilan Keputusan ( <i>Decision Making</i> ).....	21
2. Proses Pengambilan Keputusan .....	25
3. Model Rasional dalam Pengambilan Keputusan .....	27
<b>BAB III</b> .....	<b>29</b>
<b>GAMBARAN UMUM DESA BINANGUN</b> .....	<b>29</b>
<b>A. Gambaran Umum Desa Binangun</b> .....	29
1. Kondisi Geografis .....	29
2. Kondisi Demografis .....	30
3. Kondisi Sosial, Budaya dan Ekonomi .....	32
4. Kondisi Infrastruktur Desa.....	36
<b>B. Profil Desa Binangun</b> .....	38
1. Sejarah Desa Binangun .....	38
2. Struktur Pemerintah Desa Binangun.....	39
3. Visi Misi Desa Binangun .....	40
<b>BAB IV</b> .....	<b>41</b>
<b>PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN DALAM PEMBANGUNAN</b>	
<b>INFRASTRUKTUR DI DESA BINANGUN</b> .....	<b>41</b>
<b>A. Aktor Politik Pembangunan Sebagai Pengambil Keputusan (<i>Decision</i></b>	
<b>Maker</b> ) .....	41

1. Kepala Desa .....	42
2. Ketua BPD .....	43
3. Kepala Dusun.....	44
4. Ketua RT/RW .....	45
5. Ketua LPMD .....	46
6. Kelompok Perempuan.....	46
7. Kelompok Tani .....	47
8. Tokoh Pemuda .....	47
9. Tokoh Masyarakat .....	48
<b>B. Proses Pengambilan Keputusan dalam Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Pembangunan Infrastruktur .....</b>	<b>55</b>
1. Proses Perencanaan.....	55
2. Proses Pelaksanaan .....	68
3. Proses Evaluasi .....	74
<b>C. Hasil Analisis Proses Pengambilan Keputusan.....</b>	<b>77</b>
<b>BAB V .....</b>	<b>79</b>
<b>MODEL PENGAMBILAN KEPUTUSAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA BINANGUN .....</b>	<b>79</b>
<b>A. Model Pengambilan Keputusan yang Digunakan .....</b>	<b>79</b>
1. <i>Define The Problem</i> (Definisi Masalah).....	79
2. <i>Identify the Decision Criteria</i> (Identifikasi Kriteria Keputusan).....	81
3. <i>Allocate Weights To The Criteria</i> (Alokasikan Bobot Pada Kriteria) .....	82
4. <i>Develop The Alternative</i> (Kembangkan Alternatif).....	90
5. <i>Evaluate the Alternative</i> (Evaluasi Alternatif).....	99
6. <i>Select the Best Alternative</i> (Pilih Alternatif Terbaik) .....	99
<b>B. Dampak Model Pengambilan Keputusan Rasionalitas.....</b>	<b>101</b>
1. Dampak Bagi Pembangunan.....	102

2. Dampak Bagi masyarakat .....	105
<b>BAB VI.....</b>	<b>109</b>
<b>PENUTUP .....</b>	<b>109</b>
<b>A. Kesimpulan.....</b>	109
<b>B. Saran.....</b>	110
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>111</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>116</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>121</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1 Batas-batas Desa Binangun.....</b>	<b>30</b>
<b>Tabel 2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia .....</b>	<b>30</b>
<b>Tabel 3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama/Kepercayaan.....</b>	<b>31</b>
<b>Tabel 4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....</b>	<b>32</b>
<b>Tabel 5 Kesejahteraan Warga Desa Binangun .....</b>	<b>34</b>
<b>Tabel 6 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian .....</b>	<b>35</b>
<b>Tabel 7 Jumlah Prasarana Infrastruktur Desa Binangun.....</b>	<b>36</b>
<b>Tabel 8 Kepala Desa Binangun .....</b>	<b>38</b>
<b>Tabel 9 Rencana Kerja Pembangunan Infrastruktur Desa Binangun Tahun 2023 .....</b>	<b>63</b>
<b>Tabel 10 Anggaran Pendapatan Desa Binangun Tahun 2023.....</b>	<b>67</b>
<b>Tabel 11 Realisasi Pembangunan Prasarana Infrastruktur Desa Binangun Tahun 2023 .....</b>	<b>73</b>
<b>Tabel 12 Daftar Identifikasi Masalah Dan Ranking Prioritas Sub Bidang Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Desa Binangun.....</b>	<b>83</b>
<b>Tabel 13 Hasil Pengkajian Tindakan Pemecahan Sub Bidang Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Desa Binangun .....</b>	<b>90</b>

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 1 Peta Wilayah Desa Binangun.....</b>	<b>29</b>
<b>Gambar 2 Tahlilan dan Lomba Voli.....</b>	<b>33</b>
<b>Gambar 3 Budaya Nyadran dan Tari Tradisional Ebeg .....</b>	<b>34</b>
<b>Gambar 4 Struktur Pemerintahan Desa Binangun.....</b>	<b>39</b>
<b>Gambar 5 Struktur Lembaga BPD.....</b>	<b>40</b>
<b>Gambar 6 Daftar Hadir Musrenbang Desa Binangun.....</b>	<b>50</b>
<b>Gambar 7 Jalan Menuju Rumah Kepala Desa Binangun .....</b>	<b>54</b>
<b>Gambar 8 Kegiatan Musrenbang Desa Binangun.....</b>	<b>62</b>
<b>Gambar 9 Jalan Desa Binangun Yang Masih Rusak.....</b>	<b>69</b>
<b>Gambar 10 Pengecoran Jalan Lingkungan.....</b>	<b>70</b>
<b>Gambar 11 Pengaspalan Jalan Usaha Tani .....</b>	<b>70</b>
<b>Gambar 12 Pembangunan Jembatan Gantung .....</b>	<b>71</b>
<b>Gambar 13 IDM Desa Binangun 2023.....</b>	<b>102</b>
<b>Gambar 14 Realisasi Pembangunan Infrastruktur Sub Bidang Pendidikan Desa Binangun.....</b>	<b>104</b>
<b>Gambar 15 Perbandingan Jalan Usaha Tani Dusun Sidamulya dan Dusun Bendagede.....</b>	<b>106</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pembangunan merupakan suatu usaha untuk meningkatkan pertumbuhan dan perubahan yang direncanakan dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa dan negara menuju modernitas untuk pembinaan bangsa (Siagian, Sondang. P., 2005). Tujuan dari suatu pembangunan tidak lain yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. pembangunan desa merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Seperti yang tercantum dalam (UU RI No. 6 Tahun 2014) sudah seharusnya pembangunan desa bertujuan sebagai penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana prasarana desa, pengembangan potensi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan.

Adanya suatu pembangunan, dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan, dapat menimbulkan suatu permasalahan di lingkup desa dan pemerintahannya (Mas'ood, 2015). Salah satu desa dengan permasalahan pembangunan adalah Desa Binangun dengan nilai Indeks Desa Membangun (IDM) yang terendah yaitu 61,08% dari 8 desa di Kecamatan Bantarsari Cilacap (Kemendes, 2023). Keterbatasan anggaran menjadi salah satu permasalahan dalam merealisasikan pembangunan infrastruktur di Desa Binangun sehingga banyak program kerja pembangunan yang diusulkan belum bisa dilaksanakan. Pada tahun 2023 total pendapatan desa sebesar Rp.3.752.139.968 dengan belanja desa (APBDes) sebesar Rp.3.747.139.968 dan Rp.1.482.515.000 di alokasikan untuk pembangunan desa (Desa Binangun,2024). Menurut kepala desa permasalahan pembangunan desa diakibatkan sejak adanya virus Covid-19 sehingga anggaran dialokasikan untuk bantuan kemanusiaan dan bantuan langsung tunai (Mardiyono, 2024).

Permasalahan yang kedua adalah timbulnya ketidakpuasan masyarakat mengenai pembangunan infrastruktur yang tidak terealisasikan. Dalam perencanaan pembangunan desa melibatkan partisipasi masyarakat dibuktikan dalam daftar hadir di RKPDes yang dihadiri oleh BPD, Perangkat desa, kepala dusun, kelompok perempuan, RT/RW, PKK, Tokoh Masyarakat, Karantaruna, Bidan Desa (RKPDes Binangun, 2023). Dalam perencanaan pembangunan desa mencantumkan semua

usulan yang telah dimusyawarahkan, akan tetapi tidak semuanya dianggarkan dan direalisasikan. Sebanyak 142 pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur hanya 44,36% yang terealisasi dan sebesar 55,63% belum terealisasi. Hal yang paling mendasar dalam pembangunan infrastruktur adalah jalan, namun masyarakat Desa Binangun mengeluhkan jalan yang masih banyak belum tersentuh aspal, jalan tanah dan bebatuan, dan jalan yang berlubang mengakibatkan adanya genangan air. Masyarakat desa juga menilai pembangunan jalan yang kurang berkualitas, karena dari kepala desa sendiri mengambil pekerja borongan tanpa memanfaatkan kualitas swadaya dari masyarakat desa binangun. Hal ini menyebabkan ketidakpuasan dari masyarakat mengenai Kebijakan pembangunan infrastruktur desa yang belum menyentuh substansi dari pembangunan yang menjadi keinginan dan kebutuhan masyarakat Desa Binangun (Priono, 2024).

Pembangunan desa haruslah sesuai perencanaan dan pelaksanaan, namun di dalam pembangunan tersebut juga dipengaruhi oleh aktor politik pembangunan yang menggunakan jabatan politiknya untuk mendominasi sebuah pengambilan keputusan dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dalam pembangunan infrastruktur di Desa Binangun. Pengambilan keputusan merupakan suatu pilihan rasional untuk menentukan keputusan publik yang dimulai dengan mengeksplorasi dimensi substantif dan prosedural dari pengambilan keputusan maupun kebijakan, yang menjadi sebuah langkah untuk pemecahan permasalahan yang tepat secara khusus mengenai pembangunan infrastruktur ( Kurniasanndi, Vicky, 2015). Peran aktor politik pembangunan sangat mempengaruhi dinamika politik pembangunan yang menjadi sebuah konsep, bagaimana menggunakan politik sebagai cara/strategi untuk mencapai suatu tujuan dalam konteks pembangunan (Warjio, 2016).

Menurut pandangan peneliti, aktor politik yang paling berpengaruh dan dominan dalam mengambil sebuah keputusan adalah Bapak Mardiyono selaku Kepala Desa Binangun. Beliau adalah seorang usahawan jasa alat pernikahan dan pemilik sanggar budaya di Desa Binangun. Dikatakan yang paling dominan karena mampu mempengaruhi orang lain sehingga dalam setiap keputusan akhir ada pada kepala desa dan sebagai penentu arah kebijakan pembangunan. Hal ini dilihat dari pelaksanaan pembangunan infrastruktur lebih diutamakan dibangun di area dusun tempat tinggal kepala desa selama masih menjabat. Dalam kajian ini, peneliti

menganalisa perencanaan pembangunan dilihat dari sudut pandang pengambilan keputusan (Decision Making) dari aktor politik sebagai sebuah cara atau strategi baik mengatur, merancang, maupun melaksanakan pembangunan serta melihat dinamika dari pengambilan keputusan dalam pembangunan di Desa Binangun.

Studi penelitian mengenai pembangunan infrastruktur desa memiliki kesamaan tema dengan beberapa penelitian sebelumnya. Pertama dari skripsinya (Hadi Irawan, 2022) Dalam penelitian tersebut membahas bagaimana pengelolaan kebijakan pembangunan infrastruktur desa dan keterlibatan partisipasi masyarakat dalam proses pengorganisasian pembangunan infrastruktur diawali dengan penyusunan anggaran pendapatan belanja desa. Yang kedua dari skripsinya (Mursyidan, 2021) penelitian tersebut memaparkan siapa saja aktor politik pembangunan dan pengaruhnya serta membahas strategi politik pembangunan desa dari tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi. Kebaruan dalam penelitian ini adalah dengan mengembangkan dari penelitian sebelumnya yaitu melihat pengambilan keputusan dalam pembangunan infrastruktur di tingkat desa menggunakan teori pengambilan keputusan model rasionalitas yang dekemukakan oleh E. F. Harrison yang diaplikasikan kedalam pembangunan infrastruktur desa.

Signifikasi dalam penelitian ini hendak memahami pengambilan keputusan dalam pembangunan infrastruktur desa sebagai sebuah keputusan yang menentukan arah pelaksanaan pembangunan desa serta menganalisis dinamika politik yang terjadi dalam perencanaan pembangunan infrastruktur di Desa Binangun. Berdasarkan permasalahan diatas, membuat peneliti ingin mengakaji permasalahan tersebut yang berjudul “PENGAMBILAN KEPUTUSAN DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA (Studi Kasus Desa Binangun, Kabupaten Cilacap Tahun 2023)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Untuk memudahkan peneliti dalam menginterpretasikan data dan fakta dalam penelitian ini, maka diperlukan perumusan masalah yang akan diteliti. Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti memfokuskan pada dua pertanyaan yang menjadi rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pengambilan keputusan dalam pembangunan infrastruktur di Desa Binangun?

2. Apa model pengambilan keputusan dalam pembangunan infrastruktur di Desa Binangun?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan utama yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana dinamika pengambilan keputusan dalam proses pembangunan infrastruktur di Desa Binangun.
2. Untuk mengetahui model pengambilan keputusan apa yang digunakan dan dampaknya bagi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di Desa Binangun.

### **D. Manfaat penelitian**

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya maupun yang secara langsung terikat didalamnya. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan yang bermanfaat khususnya yang berkaitan dengan pengambilan keputusan dalam pembangunan infrastruktur desa.
  - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi civitas akademik dan bisa menjadi bahan referensi bagi penelitian selanjutnya.
2. Secara praktis
  - a. Sebuah manfaat praktis bagi peneliti yaitu menambah pengalaman dan pengetahuan dalam menerapkan ilmu politik dalam studi pengambilan keputusan dalam pembangunan infrastruktur di Desa Binangun Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap.
  - b. Manfaat praktis bagi akademisi dari hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan referensi guna peningkatan spekulasi di perguruan tinggi untuk memperdalam analisis di bidang sosial politik khususnya dalam politik pembangunan.
  - c. Manfaat praktis bagi masyarakat dan pemerintah Desa Binangun khususnya, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan evaluasi dan sumber

informasi untuk kedepannya menjadi lebih baik dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur desa.

## **E. Kajian Pustaka**

Kajian mengenai pembangunan infrastruktur desa memiliki kesamaan tema dengan kajian penelitian sebelumnya yang dianalisis oleh beberapa ahli. Beberapa pendapat dan analisis kajian politik pembangunan infrastruktur dikemas dalam kajian pustaka sebagai berikut:

### **1. Pembangunan Infrastruktur**

Kajian dari (Putri, Nora Eka., 2020) yang berjudul "*Politik Kebijakan Infrastruktur: Tinjauan Pustaka Kebijakan Infrastruktur Transportasi*". Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana konseptualisasi kebijakan publik yang terdiri dari konsep kebijakan publik, model kebijakan publik, proses kebijakan publik, aktor kebijakan dan kebijakan infrastruktur dalam hal transportasi. Hasil dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik dan aktor kebijakan mempunyai peran penting dalam kebijakan infrastruktur persalinan khususnya disuatu daerah dalam bidang transportasi. Salah satu kebijakan transportasi tersebut ialah pembangunan jalan yang dilihat dari fungsi dan kolaborasi aktor politik.

Kajian yang dilakukan oleh (Kurniawati, Sri; & Asyurahman, 2018) dengan judul "*Pembangunan Infrastruktur dan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Kalimantan Barat*". Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk menganalisa pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2010-2016 dipengaruhi oleh pembangunan infrastruktur panjang jalan, air bersih, listrik dan puskesmas. Hasil dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengaruh pembangunan infrastruktur panjang jalan dan air bersih ialah negatif dan signifikan. Sedangkan pengaruh pembangunan infrastruktur listrik dan puskesmas negatif dan tidak signifikan.

Kajian dari (Sihombing, Dwi Ayu R & Kusmanto, Heri, 2017) yang berjudul "*Politik Pembangunan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2010-2015*". Penelitian ini menggambarkan perkembangan politik dengan fokus membahas tujuan dan orientasi kebijakan pembangunan pada pemerintahan Pakpak Bharat 2010-2015. Penelitian ini menunjukkan hasil

bahwa pada tahun 2010-2015 dalam upaya pembangunan daerah, pemerintah Pakpak Bharat berorientasi dalam lima bidang, yaitu bidang infrastruktur, pendidikan, bidang kesehatan, perekonomian dan birokrasi. Dalam hal infrastruktur sudah mengupayakan pembangunan serta pemeliharaan jalan dan perbaikan fasilitas jalan seperti jembatan. Salah satu fokus kerja pemerintah adalah meningkatkan sumber daya manusia dengan menaikkan anggaran pembangunan pendidikan.

Selanjutnya kajian dari (Ratnasari, Puput., 2020) yang berjudul "*Politik Pembangunan di Kota Palangka Raya Menuju Smart City Kota Palangka Raya*". Tujuan dari kajian ini ialah untuk dapat memahami dan menjelaskan peran politik pembangunan di Kota Palangka Raya dalam menuju Smart City Kota Palangka Raya. Hasil dari kajian ini menunjukkan bahwa pembangunan Kota Palangka Raya ini merupakan suatu upaya perubahan untuk meningkatkan keadaan menjadi lebih baik dari keadaan sebelumnya. Pembangunan smart city ini memungkinkan masyarakat untuk aktif dalam beraktivitas serta dapat menciptakan suasana yang tenang, aman, nyaman, senang dan berbahagia.

Kajian skripsi yang dibuat oleh (Ferdiansyah, A.Fajar., 2019) dengan judul "*Politik Pembangunan (Studi terhadap Pembangunan Kawasan Industri Bantaeng di Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng)*". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi peran seorang Nurudin Abdullah, dan bagaimana dinamika politik pembangunan Kawasan Industri di Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng serta implikasi dari politik pembangunan tersebut. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa Politik pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah ini sangat didukung oleh masyarakat, hal ini terbukti atas prestasi yang diraih, terutama dalam hal pembangunan oleh Bupati Kabupaten Bantaeng Nurudin Abdullah seorang pemimpin yang sangat mengemban amanah dan tanggungjawabnya. Implikasi dalam penelitian ini ialah pembangunan yang perlu ditindaklanjuti, dana kebijakan yang dibuat harus pro terhadap masyarakat sehingga mendapat dukungan dari masyarakat agar yang diharapkan pemerintah bisa terealisasi dengan baik.

## 2. Pengambilan Keputusan Pembangunan Infrastruktur

Kajian dari (Ayu Hartatik, dkk, 2024) dalam penelitiannya yang berjudul “*Proses Pengambilan Keputusan Kepala Desa Dalam Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Desa Gadu Timur Kabupaten Sumenep*”. Kajian penelitian ini bertujuan untuk dapat menjelaskan mengenai proses pengambilan keputusan untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur di Desa Gadu. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa proses pengambilan keputusan diperoleh melalui 4 tahap yaitu; 1) *Intelligence* (Penelusuran) melalui pelaksanaan musdus dan musrenbangdes dnegan melibatkan partisipasi pemerintah dan masyarakat desa. 2) *Design* (rancangan) yang ditulis dalam TPM (Tim Penyelenggara Musyawarah). 3) *Choiche* (pilihan) berdasarkan prioritas masyarakat seperti pembangunan jalan aspal, drainase, rabat beton, air bersih, rumah tidak layak huni, dan jambanisasi. 4) *Implementation* (pelaksanaan) pembangunan infrastruktur yang dianggarkan pada tahun 2022 telah terealisasi sesuai kebutuhan masyarakat.

Kajian dari (Nurhayati & Aji Fajar S.A, 2024) dengan judul “*Mengurai Rupa Keterlibatan Masyarakat Dalam Pengambilan Keputusan di Desa Paya Benua, Negeri Laskar Pelangi*”. Bertujuan untuk menganalisa bagaimana bentuk keterlibatan masyarakat Desa Payabenua dan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat keterlibatan tersebut dalam proses pengambilan keputusan. Hasil dalam kajian ini menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan administrative termanifestasi melalui kegiatan musyawarah, survey kebutuhan dan partisipasi kelompok kerja. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat keterlibatan tersebut meliputi kesadaran politik, akses informasi, kapital sosial serta stabilitas ekonomi yang pengaruhnya signifikan terhadap tingkat keterlibatan masyarakat Desa Payabenua.

Kajian dari (Sianturi, Ronny., 2016) yang berjudul “*Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Melalui Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Bebakung Kecamatan Betayau Kabupaten Tidung*”. Pada kajian ini bertujuan memberikan sebuah gambaran tentang bagaimana program pembangunan serta menganalisis faktor apa yang menjadi dukungan dan hambatan dalam melaksanakan pembangunan. Dari hasil penelitian tersebut,

tujuan dari program pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan melalui kebijakan alokasi dana desa di Desa Bebakung adalah untuk meningkatkan pembangunan desa secara fisik dan non fisik. Namun dalam melaksanakan program pembangunan tidak berjalan dengan baik karena dari sumber daya manusia aparatur desa yang kurang maksimal. Mengingat dampak adanya pembangunan infrastruktur ini berangkat dari kebutuhan masyarakat.

Kajian skripsi yang dilakukan oleh (Irawan, Hadi., 2022) yang berjudul *“Pengelolaan Pembangunan Infrastruktur di Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis”*. Pada penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui pengelolaan pembangunan infrastruktur di Desa Wonosari. Dan hasil penelitiannya ialah bahwa perencanaan terkait pembangunan infrastruktur di Desa Wonosari diselaraskan dengan RPJMD Kabupaten Bengkalis dan dalam penyusunan tersebut melibatkan partisipasi masyarakat. dalam proses pengorganisasian pembangunan infrastruktur diawali dengan penyusunan anggaran pendapatan belanja desa. Pemberian motivasi dalam bentuk pujian dan semangat diberikan kepada pegawainya dalam melakukan pekerjaan. Bentuk pengawasan pengelolaan pembangunan infrastruktur dilakukan secara langsung turun kelapangan. Tahap pengawasan dan pertanggungjawaban dilaksanakan sebagai bentuk evaluasi dalam pengelolaan pembangunan infrastruktur.

Kajian skripsi yang dibuat oleh (Santosa, Sari Bela Putri., 2020) yang berjudul *“Strategi Kebijakan Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa (Studi Kasus dalam pembangunan infrastruktur di Desa Sidomulyo, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo)”*. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menjelaskan serta menganalisis strategi kebijakan yang berhubungan dengan pembangunan infrastruktur Desa Sidomulyo. Berdasarkan hasil kajian tersebut, menunjukkan bahwa strategi kebijakan pembangunan infrastruktur telah berjalan sesuai dengan yang tercantum di RKPDes Sidomulyo baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan. Segala kegiatan pembangunan melibatkan partisipasi masyarakat. Namun, jumlah dana yang dialokasikan pemerintah desa masih sangat minim sehingga mengakibatkan hasil pembangunan yang kurang merata di setiap dusunya.

## **F. Metode Penelitian**

Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif yang mencakup jenis dan pendekatan penelitian, sumber dan jenis data, teknik pengumpulan dan teknik analisis data.

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penulis memilih penelitian kualitatif sebagai metode penelitian yang digunakan. Dalam Bukunya ( Sugiyono, 2020). metode penelitian kualitatif merupakan sebuah metode penelitian yang berasal dari filsafat postpositivisme dapat digunakan untuk mempelajari kondisi pada obyek yang alamiah, (sebagai lawanya adalah eksperimen) dimana peneliti berfungsi sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil dari penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Definisi makna merupakan data yang sebenarnya (fakta), dan data yang sudah pasti dibalik nilai data yang terlihat. Dalam penelitian kualitatif transferability merupakan istilah Generalisasi untuk memperoleh data yang mendalam dan data yang bermakna.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini ialah field resourch yaitu pengambilan sumber data dari penelitian lapangan dengan pencarian data terjun langsung ke objek penelitian untuk mendapatkan data kongkrit mengenai permasalahan yang akan diteliti (Hadi, S., 2001) Peneliti terjun ke lapangan mencari data tentang pengambilan keputusan dalam pembangunan infrastruktur yang berlokasi di Desa Binangun Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Peneliti akan berpartisipasi langsung mencari informasi dari informan dengan melakukan pencatatan, rekaman, dokumentasi dengan detail dan teliti serta menganalisis hasil yang didapatkan di lapangan.

Desain pendekatan penelitian kualitatif dalam penelitian ini ialah dengan studi kasus (*case study*). Studi kasus ini fokus dalam mengeksplorasi kegiatan, situasi dan perkembangan, serta elemen penting yang mendukung terkait kondisi perkembangan tersebut. Pada pendekatan studi kasus ini lebih menekankan pada pendeskripsian penyajian fakta yang ditemukan di lapangan baik dari sikap, perilaku, persepsi yang saling berhubungan antara individu maupun kelompok. Sehingga hasil dari penelitian ini tidak berupa angka atau

statistik data perhitungan lainnya. Adapun tujuan peneliti menggunakan metode ini adalah untuk memberikan sebuah gambaran lebih detail dan mendalam mengenai permasalahan yang diteliti serta dapat menganalisis fakta yang terjadi di lapangan. Peneliti akan menggambarkan dan menyajikan suatu permasalahan yang perlu ditelaah mengenai pengambilan keputusan dalam pembangunan infrastruktur di Desa Binangun Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap.

## **2. Sumber Data**

Dalam bukunya (Moleong, 2020) Lofland (1984:47) mendefinisikan sumber data merupakan sebuah ungkapan kata dan tindakan, serta tambahan data berupa dokumen ataupun yang lainnya. Sumber data dikategorikan menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan peneliti adalah :

### **a. Data primer**

Data Primer merupakan sumber data yang secara langsung diberikan kepada pengumpul data. Pengambilan sumber data primer langsung dari lapangan ketika peneliti sedang mencari informasi. Observasi, wawancara, dan pengambilan dokumentasi secara langsung merupakan salah satu dari teknik yang dilakukan dalam pengumpulan data ( Sugiyono, 2020). peneliti melakukan observasi langsung mengenai pengambilan keputusan dalam pembangunan infrastruktur di Desa Binangun Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Dan melakukan wawancara kepada informan, kepada pemerintah desa dan kepada warga masyarakat untuk dimintai data mengenai sudut pandangnya melihat pembangunan infrastruktur di Desa Binangun. Tidak lupa pula peneliti melakukan pengambilan dokumentasi yang dapat mendukung fenomena yang sedang diteliti.

### **b. Data Sekunder**

Data sekunder merupakan data sumber lain yang dikumpulkan oleh pengumpul data, artinya pengumpulan data didapatkan secara tidak langsung atau lewat dokumen lainnya ( Sugiyono, 2020). data sekunder ini diambil dari data yang telah tersedia sebelumnya, dengan melakukan literature resource dari data yang berkaitan dengan penelitian yang sedang

dikaji. Buku, jurnal dan artikel ilmiah, majalah, skripsi, tesis dan karya ilmiah lainnya merupakan bagian-bagian dari sumber data sekunder. Selain itu sumber tertulis lainnya bisa juga mengambil dari lembaga arsip nasional ataupun dari dokumen pribadi berupa catatan buku harian dan lainnya (Moleong, 2020). Dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan berupa karya ilmiah sebagai sumber terdahulu dan catatan dokumentasi dari pemerintah desa yang berhubungan dengan fokus penelitian, yakni mengenai rancangan program kerja pemerintah desa mengenai pembangunan infrastruktur di Desa Binangun. Adanya sumber data kedua ini yang dijadikan referensi dalam melengkapi serta memperkuat hasil penelitian ini.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah salah satu langkah yang utama untuk mendapatkan data dalam sebuah penelitian. Data dapat dikumpulkan dengan berbagai setting, sumber dan caranya. Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti observasi (pengamatan), interview (wawancara), dokumentasi dan triangulasi (gabungan) (Sugiyono, 2020). Pada penelitian ini menggunakan teknik gabungan/triangulasi dari ketiga macam teknik pengumpulan data tersebut yaitu observasi partisipatif, wawancara mendalam dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak. Strategi mekanisme yang ditetapkan dalam mengumpulkan data adalah sebagai berikut:

#### a. Observasi

Nasution (1988) memberikan pendapatnya mengenai observasi bahwasanya observasi ini merupakan ilmu yang menjadi dasar semua pengetahuan. Marshall (1995) berpendapat bahwa “*thought observation, the researcher learn about behavior and the meaning attached to those behavior*”. Artinya, peneliti dapat mempelajari suatu makna dari perilaku melalui observasi (Sugiyono, 2020). Observasi yang dibuat oleh peneliti mengamati secara langsung di lapangan dengan melihat status kondisi pembangunan infrastruktur di Desa Binangun dan ingin mengenal lebih dalam perilaku dari perspektif pemerintah desa dan aktor politik

pembangunan yaitu dari kepala desa atas pengambilan keputusan sebagai arah kebijakan pembangunan serta perspektif masyarakat mengenai pembangunan infrastruktur di Desa Binangun.

b. Wawancara

Dalam bukunya (Moleong, 2020). menjelaskan bahwasanya wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) dan yang terwawancara (*interviewee*) untuk mencapai tujuan tertentu. Wawancara dapat digunakan sebagai metode pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan masalah yang harus diteliti, atau apabila peneliti ingin mengetahui lebih banyak hal-hal dari responden (Fiantika Feny R, dkk., 2022).

Wawancara mendalam digunakan untuk memperoleh data yang jelas dan detail secara langsung kepada narasumber (informan) dengan mengajukan beberapa pertanyaan tentang subjek penelitian. Peneliti mengajukan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan pengalaman, pendapat, perasaan, dan tentang pengetahuan maupun pemahaman mengenai pengambilan keputusan dalam pembangunan infrastruktur. Pada penelitian ini informan yang di wawancarai ialah dari pihak pemerintah desa yaitu dari Kepala Desa Binangun, Sekertaris Desa, Kepala Dusun, tokoh masyarakat, ormas dan masyarakat umum. Bantuan alat diperlukan untuk mendukung proses wawancara agar hasilnya dapat didokumentasikan dan dijadikan bukti bahwa peneliti sudah melaksanakan wawancara dengan baik dan benar. Peneliti menggunakan alat bantu berupa buku catatan dan tape recorder sebagai alat melakukan wawancara.

Strategi dalam melakukan wawancara oleh peneliti ialah dengan melihat betul informan yang akan dimintai keterangan dan dalam memberikan sebuah pertanyaan disesuaikan dengan apa yang akan dikaji oleh peneliti karena untuk menghindari penolakan dari para narasumber. Dalam menuliskan hasil dari wawancara yang telah dilakukan, peneliti melakukan pencatatan dengan membuat rangkuman secara sistematis dan mengkontruksikan data untuk menghasilkan pola dan makna lainnya. Jika peneliti meragukan data yang telah diperoleh, maka bisa kembali ditanyakan lagi agar memperoleh ketuntasan dan kepastian ( Sugiyono,

2020). Hasil dari wawancara disajikan dalam bentuk deskriptif berdasarkan keadaan dan data yang tersedia.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah catatan tentang peristiwa yang telah berlalu, yang dapat berupa bentuk tulisan, gambar atau suatu karya yang besar dari seseorang (Sugiyono, 2020). Dokumentasi ini merupakan teknik pengumpulan data yang dapat menghasilkan catatan penting berkaitan dengan masalah yang akan dikaji. Perlu dicermati bahwasanya dokumen memiliki kredibilitas yang tinggi. Hasil penelitian yang berasal dari observasi dan wawancara akan lebih kredibel atau dapat dipercaya jika didukung dengan dokumentasi seperti gambar dan foto maupun catatan lainnya.

Pada penelitian ini terkait dengan dokumentasi, penulis mengumpulkan data-data dokumen berupa catatan hasil dari observasi dan wawancara, dokumen arsip, jurnal karya ilmiah, dan karya lain mengenai pembangunan infrastruktur di Desa Binangun. Data ini berupa data tertulis dan foto yang dapat memperkuat arah penelitian yang diperoleh dari wawancara dan observasi sebagai pendukung dan pelengkap data.

#### **4. Teknik Analisis Data**

Proses dalam mencari dan menyusun data secara sistematis dari transkrip, catatan lapangan, serta materi lainnya yang dikumpulkan oleh peneliti untuk mendapatkan sebuah temuan disebut teknik analisis data. Analisis data juga disebut sebagai proses menafsirkan data tertentu yang dikumpulkan peneliti. Menganalisis data dapat digunakan dalam menjelaskan data yang didapatkan dalam bentuk naratif, deskriptif, atau tabular (Fiantika Feny R, dkk., 2022). Pendapat lain dari (Bogdan & Biklen, 1982) mengenai analisis data kualitatif ialah usaha yang dilakukan melalui jalan kerja dengan data, mengorganisasikannya, memilahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikan, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan dapat dipelajari serta memutuskan apa yang dapat dikatakan kepada orang lain (Moleong, 2020).

Pada penelitian ini mengacu pada model Miles dan Huberman sebagai teknik analisis data yang digunakan. Miles & Huberman (1984) menyatakan bahwa analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus. Proses analisis data meliputi; data reduction (reduksi data), data display (penyajian data), conclusion drawing/verification (penarikan kesimpulan) ( Sugiyono, 2020).

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah suatu proses berfikir secara sensitif dengan kecerdasan dan keluasan dalam pengetahuan tinggi yang dibutuhkan. Merangkum dan memilih suatu hal penting merupakan sebuah proses mereduksi data dengan memfokuskan hal tersebut guna mendapatkan tema dan polanya, Sehingga data yang direduksi memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Peneliti merangkum dan mengklarifikasikan hasil data yang telah didapatkan dilapangan dengan mempertimbangkan data yang sebenarnya sesuai apa yang dibutuhkan.

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan langkah yang diambil selanjutnya setelah proses mereduksi data. Penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dalam berbagai bentuk seperti bagan/grafik, uraian singkat, hubungan antar kategori, flowchart dan sebagainya. Dengan menyajikan data akan lebih mudah untuk memahami apa yang terjadi, dan merencanakan tindakan selanjutnya sesuai yang telah dipelajari. Peneliti melakukan penyajian data sesuai apa yang telah ditentukan dalam reduksi data, bentuk penyajian yang dilakukan berupa teks naratif.

c. Penarikan Kesimpulan

Dalam penelitian kualitatif, kesimpulan merupakan sebuah hasil temuan baru yang belum pernah ada sebelumnya, dan hasil pembahasan tersebut berisi penjelasan atau gambaran tentang suatu objek yang masih kurang jelas sebelumnya, sehingga akan menjadi jelas setelah diteliti dan dapat berupa hubungan antara kausal atau interaktif, dan hipotesis atau teori. Dari verifikasi data yang telah diperoleh, selanjutnya peneliti akan menarik kesimpulan agar dapat memaparkan lebih jelas kebenaran sesuai

fakta dan fenomena yang diteliti supaya lebih mudah untuk dipahami. Kesimpulan yang dibuat sesuai fokus penelitian yang telah diinterpretasikan karena kesimpulan sebagai teoritik maupun empirik dari hasil akhir penelitian.

## **G. Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika dalam penulisan ini untuk memudahkan pembaca dalam memahami penjelasan skripsi yang sudah ditulis terbagi menjadi beberapa bagian, diantaranya:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini penulis menyajikan alasan mengapa memilih penelitian ini dengan data sesuai konteks penelitian yang diperoleh. Penjelasan tersebut berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat, kajian pustaka, metode dan sistematika penulisan.

### **BAB II KERANGKA TEORI**

Pada bab ini, penulis menyajikan sebuah teori ke dalam penelitian ini, teori tersebut bersangkutan dengan permasalahan topik yang sedang dikaji. Penulis mengidentifikasi secara intens mengenai teori pengambilan keputusan (Decision Making) yang dikemukakan oleh E.F Harrison yang dijabarkan dalam bukunya Rizky Dermawan (2022).

### **BAB III GAMBARAN UMUM DESA BINANGUN**

Pada bab ini, penulis secara umum menyajikan gambaran dari objek penelitian. Gambaran umum tersebut mencakup; profil daerah, kondisi geografis, demografi, kondisi lingkungan, dan kondisi sosial yang ada di Desa Binangun Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap.

### **BAB IV PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA BINANGUN**

Pada bab ini, penulis menyajikan pembahasan mengenai bagaimana proses pengambilan keputusan dalam pembangunan infrastruktur di Desa Binangun.

## **BAB V MODEL PENGAMBILAN KEPUTUSAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA BINANGUN**

Pada bab ini, penulis menyajikan pembahasan mengenai model pengambilan keputusan yang digunakan dalam proses pembangunan infrastruktur serta menjelaskan dampak dari pengambilan keputusan tersebut bagi pembangunan dan masyarakat Desa Binangun.

## **BAB VI PENUTUP**

Pada bab ini, penulis menyajikan kesimpulan beserta saran yang diperoleh dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

## BAB II

### KERANGKA TEORI

Pada bab ini akan membahas mengenai definisi konseptual dan kerangka teori yang digunakan sebagai landasan dasar untuk menganalisis hasil penelitian. Definisi konseptual terdiri dari pengertian pengambilan keputusan, pembangunan, infrastruktur. Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori pengambilan keputusan dari E. F. Harrison (1999) yang dijabarkan dalam bukunya Rizky Dermawan yang berjudul “*PENGAMBILAN KEPUTUSAN Landasan, Filosofis, Konsep, & Ide Skenario-Permainan Atas Keputusan Strategi*” (Rizky Dermawan, 2022).

#### A. Definisi Konseptual

##### 1. Pengambilan Keputusan

Keputusan (*decision*) jika diartikan secara harfiah memiliki makna sebuah pilihan (*choice*) yang artinya sebuah pilihan dari dua atau lebih kemungkinan atau dapat dikatakan sebagai keputusan yang dicapai setelah dilakukan pertimbangan untuk memilih salah satu pilihan (Rifa'i Ahmad). Keputusan merupakan suatu tindakan tegas yang diambil dalam memecahkan sebuah masalah dalam menghadapi sebuah pilihan. Akhmad Sudrajat salah satu pakar ahli mendefinisikan keputusan sebagai sebuah pemecahan masalah dalam landasan suatu hukum situasi yang dilaksanakan satu pilihan alternatif dari beberapa alternatif lainnya. Bisa disimpulkan bahwa keputusan ini merupakan suatu kegiatan dalam memilih strategi yang memenuhi syarat, variabel dan model yang ditentukan untuk memecahkan sebuah permasalahan (Amalia, Rizki & Firmadhani, Citra, 2022).

Pengambilan keputusan merupakan proses pemilihan alternatif dari sebuah tindakan untuk mencapai sasaran atau tujuan tertentu. Pengambilan keputusan dilakukan secara sistematis terhadap permasalahan, melalui proses pengumpulan data yang menjadi sumber informasi ditambah dengan faktor pertimbangan dengan pengambilan keputusan. Dalam bukunya (Amalia, Rizki & Firmadhani, Citra, 2022). S.P. Siagian mengemukakan pendapatnya mengenai pengambilan keputusan yang merupakan suatu pendekatan secara sistematis pada permasalahan yang dihadapi dan mengambil sebuah tindakan menurut perhitungan yang paling tepat. Salah satu yang menjadi dasar tujuan

pengambilan keputusan adalah untuk mencapai target tujuan dari aksi yang harus dilakukan.

Mengenal lebih dalam mengenai jenis-jenis keputusan secara garis besar dibagi menjadi dua bagian yaitu :

1. Keputusan rutin merupakan sebuah pengambilan keputusan yang sifatnya rutin dan telah dikembangkan pengendaliannya.
2. Keputusan tidak rutin merupakan sebuah pengambilan yang khusus pada saat tertentu.

Dalam jenis-jenis keputusan di dalam sebuah organisasi maupun lembaga dapat digolongkan berdasarkan banyaknya waktu yang diperlukan untuk mengambil sebuah keputusan tersebut. Pada bagian mana lembaga harus dapat melibatkan dalam mengambil keputusan dan bagian mana keputusan tersebut dapat difokuskan. Kerangka dasar dalam mengambil sebuah keputusan manajerial dalam tipenya dibagi menjadi :

1. Terstruktur

Dalam hal ini masalah yang muncul adalah permasalahan yang rutin terjadi, sehingga solusinya adalah standar dan baku.

2. Tidak terstruktur

Sebuah permasalahan yang kompleks sehingga harus menggunakan pemecah masalah yang tidak standar. Pencarian solusinya yaitu melibatkan manusia sebagai dasar pembuat keputusan.

3. Semi terstruktur

Merupakan gabungan dari terstruktur dan tidak terstruktur, solusi dari kedua gabungan permasalahan tersebut adalah prosedur solusi standar dan kemampuan manusia.

## **2. Pembangunan**

Menurut KBBI memaknai arti pembangunan sebagai suatu proses, cara, perbuatan membangun. Dalam hal politik, pembangunan lebih mengarah kepada keinginan suatu perasaan dari warga masyarakat yang aktif atau yang terlibat dalam berbagai kegiatan politik. Sedangkan dalam infrastruktur, pembangunan sebagai suatu prasarana. Pembangunan banyak digambarkan sebagai suatu proses pergeseran yang direncanakan menuju kondisi nasional

yang lebih baik dari satu kondisi ke kondisi lainnya. dari suatu kondisi nasional yang satu ke kondisi nasional lainnya yang lebih baik, dengan kata lain pembangunan berkaitan dengan proses perbaikan (Moeljarto T., 1987). Pembangunan ini memiliki definisi dengan makna yang luas, dan banyak sudut pandang yang berbeda dari berbagai para ahli dalam mendefinisikan makna pembangunan tersebut.

Pembangunan yang dikemukakan menurut Simamora (2006:67) bahwa pembangunan merupakan suatu perubahan ke arah pola masyarakat yang dapat merealisasikan nilai-nilai kemanusiaan menuju lebih baik, dan memungkinkan masyarakat mendapatkan hak kontrol atas lingkungannya dan tujuan politiknya, sehingga masyarakat mendapatkan otoritas yang lebih besar atas dirinya sendiri. Sebaliknya Sahroni (2004:59) menggambarkan definisi pembangunan sebagai proses sistemik yang terdiri dari tiga komponen; input bahan masukan untuk konversi, proses konversi dengan mengolah bahan masukan, terakhir adanya output dari konversi yang telah dilaksanakan. Proses sistemik bergantung pada suatu sistem dengan subsistem yang setiap sistem lainnya termasuk lingkungan global (Ariadi, Andi., 2019).

Hakekat dalam pembangunan pada dasarnya untuk menumbuhkan masyarakat dalam suatu negara secara menyeluruh dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Siagin (2000:15) pembangunan merupakan suatu proses usaha yang telah direncanakan dan dilakukan secara sadar demi mewujudkan perubahan dan pertumbuhan yang ditempuh oleh suatu negara dan pemerintahannya mencapai modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (Nasional Building). Sedangkan menurut Todaro (2000:20) mengungkapkan pendapat lain mengenai pembangunan yang dipandang sebagai proses multidimensi mencakup perubahan yang signifikan dalam struktur sosial, sikap masyarakat, institusi nasional dan percepatan pertumbuhan ekonomi, dimana harus bertanggung jawab untuk mencapainya (Simbolon, Dewi S. dkk., 2021).

Menurut Sen (Sen, 1999:3) dalam *Development as Freedom* ia menjelaskan mengenai pembangunan dilihat sebagai perluasan kemerdekaan nyata yang dapat dinikmati masyarakat. Ia percaya dengan menekankan kemerdekaan dan kebebasan manusia, membuat perspektif ini berbeda dengan

perspektif yang terbatas pada peningkatan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, kemajuan teknologi, industrialisasi, dan modernisasi sosial. Sen, menegaskan lebih jauh lagi bahwa pembangunan dianggap sebagai pengembangan kebebasan (expansion of freedom) dilihat dari dua sudut pandang, yaitu sebagai sarana pokok dan tujuan utama. Keduanya secara berturut disebut sebagai peran konstitutif (constitutive role) dan peran instrumental (instrumental role) (Winarno, Budi, 2013). Dalam Konsep pemikiran Sen mengenai pembangunan ini memang memiliki perbedaan dengan para ahli yang lain. Pada awal pemikiran tentang pembangunan seringkali ditemukan adanya pemikiran yang mengaitkan pembangunan dengan istilah seperti modernisasi, industrialisasi, dan westernisasi yang pada dasarnya semuanya merupakan bentuk yang merefleksikan aspek perubahan.

### **3. Infrastruktur**

Secara makna dalam KBBI mengenai Infrastruktur adalah sebuah prasarana. Dimana infrastruktur ini merupakan sarana publik utama untuk mengatur perekonomian negara, dan infrastruktur ini memiliki kemampuan untuk mendukung aktivitas masyarakat. Dengan adanya infrastruktur memberikan kelancaran distribusi aliran yang menandai terselenggaranya sistem ekonomi yang efektif. Sebagai contoh, salah satu infrastruktur yang paling sering digunakan di suatu daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi adalah jalan. Menurut pandangan Kodatie (2003) mendefinisikan infrastruktur sebagai sarana pembangunan yang dibutuhkan berupa fasilitas fisik oleh para pejabat politik guna menyediakan layanan publik untuk tujuan ekonomi dan sosial dari tugas pemerintah dalam memfasilitasi penyediaan air, tenaga listrik, pembangunan limbah, transportasi serta fasilitas lainnya (Ireyena, Paulus. dkk., 2019).

Pendapat lain menurut Grigg (1988) terkait infrastruktur memandang “semua fasilitas fisik yang sering disebut dengan pekerjaan umum” adalah istilah dari infrastruktur. Menurutnya, infrastruktur pada sebuah sistem dalam bentuk fisik menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan-bangunan gedung dan fasilitas lainnya yang dapat memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup ekonomi dan sosial. Sistem infrastruktur juga dikenal sebagai

fasilitas atau struktur dasar untuk memenuhi sistem sosial dan sistem ekonomi masyarakat yang sangat dibutuhkan. Sistem infrastruktur berfungsi sebagai faktor utama sebagai pendukung peran sistem sosial dan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari (Kaming, Peter F. & Raharjo, Ferianto, 2017).

Definisi infrastruktur juga termuat dalam (PERPRES Nomor 67 Tahun 2005) dijelaskan bahwasanya penyediaan infrastruktur merupakan suatu kegiatan yang mencakup pekerjaan konstruksi dalam membangun atau meningkatkan kapasitas infrastruktur, dalam kegiatan pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur untuk meningkatkan infrastruktur dalam segi kemanfaatnya. Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 67 tahun 2005 mengenai macam-macam infrastruktur sebagai berikut:

- 1) Infrastruktur Transportasi, yaitu; stasiun kereta api, jaringan rel, bandar udara, pelabuhan laut, danau, sungai.
- 2) Infrastruktur Jalan, yaitu; jalan tol dan jembatan tol.
- 3) Infrastruktur Pengairan, yaitu; saluran pembawa air baku.
- 4) Infrastruktur Air Minum, yaitu; bangunan pengambil air baku, jaringan transmisi, jaringan distribusi, instalasi pengolahan air minum.
- 5) Infrastruktur Air Limbah, yaitu; instalasi pengelolaan air limbah, jaringan pengumpul dan utama, serta sarana persampahan baik pengangkutan dan tempat pembuangan.
- 6) Infrastruktur Telekomunikasi, yaitu; jaringan telekomunikasi.
- 7) Infrastruktur Ketenagakerjaan, yaitu; pembangkit transmisi dan distribusi tenaga listrik.
- 8) Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi, yaitu; pengolahan, penyimpanan, pengangkutan, transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi.

## **B. Kerangka Teori**

### **1. Teori Pengambilan Keputusan (*Decision Making*)**

Untuk membantu proses penelitian tentang pengambilan keputusan dalam pembangunan infrastruktur desa, maka dalam penelitian ini menggunakan teori pengambilan keputusan yang dikemukakan oleh E. F. Harrison (1999) dalam buku yang berjudul "*The Managerial Decision-Making Proses*" yang kemudian dijabarkan oleh Rizky Dermawan dikemas dalam buku

yang berjudul “*PENGAMBILAN KEPUTUSAN Landasan, Filosofis, Konsep, & Ide Skenario-Permainan Atas Keputusan Strategi*”. E. F. Harrison mendefinisikan Pengambilan keputusan sebagai suatu proses pemilihan keputusan melalui identifikasi masalah dari berbagai alternatif berdasarkan nilai-nilainya dan preferensi dari pengambil keputusan (aktor politik). Harrison sangat menekankan perlunya sebuah analisis serta pemikiran rasional disetiap tahap proses pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan suatu hal yang dapat mempengaruhi hasil akhir dari pengambilan keputusan (Harrison. E. F, 1999).

Teori pengambilan keputusan merupakan teori yang mengenai bagaimana memprediksi pengambilan keputusan. Teori tersebut dapat dikatakan sebagai teori tentang pemilihan alternatif terbaik, teori yang paling mendatangkan manfaat optimal dalam pemilihan peluang. Tujuan dibentuknya teori pengambilan keputusan adalah untuk mewujudkan kondisi pemaksimalan harapan (*maximizing expectations*). Tujuan yang dimaksud adalah harapan atas setiap keputusan yang ditetapkan oleh setiap hasil yang potensial (*potensial outcome*) dari seluruh nilai yang merupakan bagian dari konsekuensi logis yang telah terjadi (*possible consequence*) dari tindakan yang terjadi (Rizky Dermawan, 2022).

Dalam sebuah teori, model, ilmu ataupun yang lainnya selalu mempunyai sejumlah asumsinya masing-masing. Asumsi tersebut dibangun untuk menyederhanakan kesulitan dalam memahami sebuah teori. Oleh karena itu, dalam memahami teori pengambilan keputusan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini meninjau *Theory of decision making* dalam teori rasional komprehensif, inkremental, partisipasi politik dan *good governance*.

#### a. Teori Rasional Komprehensif

Teori pengambilan keputusan rasional komprehensif merupakan salah satu pendekatan proses pengambilan keputusan dalam mengambil sebuah keputusan secara rasional, logis dan optimal berdasarkan analisis informasi yang tersedia. Teori ini dapat digunakan untuk memahami individu maupun suatu organisasi membuat sebuah keputusan berdasarkan hasil pertimbangan secara rasional dan komprehensif. Penerapan teori ini relevan dengan pengambilan keputusan yang bersifat strategis dalam

kebijakan publik, perencanaan maupun suatu proyek besar. Berikut merupakan beberapa asumsi mengenai teori rasional komprehensif dalam pengambilan keputusan:

- 1) Rasionalitas penuh, bahwasanya pengambilan keputusan mampu bertindak rasional dengan mempertimbangkan semua informasi dan alternatif secara relevan.
- 2) Akses informasi, bahwasanya pengambil keputusan memiliki akses ke semua informasi yang dibutuhkan untuk dianalisa.
- 3) Waktu, bahwasanya pengambil keputusan memerlukan waktu yang cukup untuk menganalisis pertimbangan dari semua alternatif.
- 4) Keputusan optimal, bahwasanya pengambilan keputusan secara rasional dapat memberikan keputusan yang optimal.

Asumsi dalam teori rasional komprehensif dalam mengambil sebuah keputusan dapat memberikan informasi yang relevan, mampu menganalisis dan menghasilkan keputusan yang optimal. Namun, dalam realisasinya penerapan teori ini banyak dikritik karena dianggap tidak realistis yang disebabkan dari kemampuan manusia yang terbatas menganalisis semua informasi secara sempurna.

b. Teori Inkremental

Teori pengambilan keputusan inkremental merupakan sebuah pendekatan pengambilan keputusan yang prosesnya secara bertahap dilakukan sedikit demi sedikit daripada perubahan besar dan drastis. Pada umumnya teori ini bersifat pragmatis secara bertahap mengambil sebuah keputusan melalui modifikasi kecil dari kebijakan maupun sebuah tindakan. Teori ini sering digunakan dalam konteks kebijakan publik maupun dalam organisasi yang harus menangani banyak ketidakpastian. Pengambilan keputusan dalam teori ini bukanlah proses rasional yang semua alternatif tersedia, melainkan proses reaktif dan adaptif. Berikut beberapa langkah dalam teori inkremental yang menjadi konsep kunci dalam pengambilan keputusan:

- 1) Perubahan bertahap
- 2) Fokus pada solusi praktis
- 3) Alternatif terbatas

- 4) Proses adaptif
- 5) *Trial and error* (percobaan dan kesalahan)

c. Teori Partisipasi Politik

Teori partisipasi politik dalam pengambilan keputusan berfokus pada bagaimana suatu individu maupun kelompok masyarakat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik di suatu sistem demokrasi. Dalam teori ini mengangga bahwa pengambilan keputusan politik bukan hanya milik pemerintah elit saja akan tetapi juga dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat dari berbagai elemen. Partisipasi politik ini merupakan keterlibatan individu maupun kelompok dalam mempengaruhi suatu kebijakan publik. Bentuk-bentuk partisipasi politik sangat beragam meliputi:

1) Partisipasi konvensional

Bentuk dalam partisipasi konvensional merupakan suatu bentuk keterlibatan masyarakat dalam ikut serta di dalam kontestasi pemilihan pemimpin.

2) Partisipasi non-konvensional

Partisipasi non-konvensional merupakan suatu bentuk partisipasi keterlibatan warga masyarakat dalam protes menyampaikan pandangan ketidaksesuaian dengan aksi demonstrasi dan gerakan sosial.

3) Partisipasi kolaboratif

Bentuk partisipasi kolaboratif berupa keterlibatan masyarakat dalam diskusi maupun musyawarah mengemukakan suatu pendapat untuk menentukan kebijakan yang akan diambil.

Kemudian ada beberapa konsep penting dalam teori partisipasi politik ini dalam pengambilan keputusan sebagai berikut:

- 1) Keterlibatan warga negara.
- 2) Keadilan partisipatif.
- 3) Pengaruh dan kontrol.
- 4) Tingkat partisipasi.

#### d. Teori Good Governance

Teori pengambilan keputusan good governance merupakan salah satu pendekatan dalam pengambilan keputusan yang menekankan pentingnya prinsip-prinsip tata kelola yang baik di sektor publik. Penerapan teori good governance menjadi suatu langkah yang penting dalam meningkatkan kualitas demokrasi dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat. Adanya penerapan suatu prinsip dari teori good governance dalam pengambilan keputusan diharapkan akan lebih akuntabel, transparan serta responsive terhadap kebutuhan masyarakat dalam menciptakan suatu kebijakan yang adil dan efektif.

Berikut merupakan manfaat yang dapat diambil dalam teori pengambilan keputusan good governance:

- 1) Meningkatkan kepercayaan publik.
- 2) Kebijakan yang lebih relevan.
- 3) Pengelolaan sumber daya yang lebih baik.
- 4) Mendorong inovasi.
- 5) Mendukung keberlanjutan pembangunan.

Teori pengambilan keputusan berusaha menjelaskan mengenai sebuah langkah sistematis yang dilakukan oleh seorang pengambil keputusan (*decision maker/taker*) dalam mencari, membuat, menetapkan dan memilih alternatif sebuah solusi yang terbaik. Teori pengambilan keputusan berangkat dari proses pencarian, penetapan, perincian masalah dan pencapaian tujuan terbaik. Selanjutnya teori ini memberikan sebuah gambaran untuk membuat, menetapkan dan memilih sejumlah elemen maupun variabel peristiwa yang diharapkan akan terjadi konsekuensi dari pemilihan tindakan. Dan yang terakhir teori tersebut membantu pengambil keputusan dalam memilih solusi alternatif terbaik untuk menetapkan keputusan akhir.

## 2. Proses Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan merupakan sebuah proses dalam menentukan salah satu pilihan dari berbagai pilihan untuk menyelesaikan masalah dan mencapai suatu tujuan. Sebuah proses dapat dijadikan sudut pandang yang baik dalam pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan yang baik, efektif, dan

berkualitas adalah penetapan definisi berdasarkan proses pengambilan keputusan (*a correspondence to process idea*). Nilai baiknya sebuah pengambilan keputusan terdapat pada pilihan solusi alternatif pilihan terbaik. Dimana pemilihan alternatif tersebut menjadi sebuah penetapan sejumlah konsekuensi yang dapat menghasilkan manfaat dan meminimalisir resiko. Proses pengambilan keputusan yang dinilai baik terdapat dalam beberapa kondisi indikator berikut:

- a. Identifikasi dan isolasi masalah utama.
- b. Penentuan alternatif solusi.
- c. Penggunaan metode penentuan masalah dan solusi.
- d. Penentuan sejumlah konsekuensi dari setiap alternatif.
- e. Pemilihan alternatif yang paling optimal.
- f. Penentuan tindakan atau strategi selanjutnya.
- g. Keputusan diambil dan disepakati bersama.

Proses pengambilan keputusan juga dapat dikatakan sebagai proses penentu tingkat peluang keberhasilan solusi alternatif. Pada hakekatnya, proses pengambilan keputusan ditunjukkan untuk mendapatkan nilai yang obyektif dan sempurna atas peluang serta gap permasalahan tersebut. Semakin kecil peluang terjadinya suatu masalah maka, semakin sempit juga permasalahan yang terwujud, sehingga akan semakin bagus nilai keputusan yang diambil. Pengambilan keputusan selalu dihadapkan dengan kondisi bagaimana meminimalisir gap masalah yang besar. Jargon utama yang selalu dikumandangkan dalam pengambilan keputusan adalah “meraih manfaat terbesar dengan resiko terkecil”. Secara sederhana dapat dikatakan pengambilan keputusan juga mengikuti tipe masalah yang muncul. Tipe masalah tersebut dikategorikan menjadi dua kategori yaitu; masalah yang terikat dan masalah yang tidak terikat. Proses pengambilan keputusan dalam mengatasi gap permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Secara jelas, merinci dan memahami masalah dan tujuan sebenarnya dengan mempertimbangkan dengan sejumlah alternatif variasi langkah penyelesaian.

- b. Mencari sebanyak-banyaknya alternatif penyelesaian terhadap masalah dan pencapaian tujuan, alternatif yang dibentuk harus memiliki peluang besar dalam penyelesaian masalah.
- c. Pengumpulan seluruh alternatif yang memiliki nilai manfaat tinggi terhadap pembentukan alternatif solusi dan harus memperhatikan kemungkinan ketidakharmonisan penggabungan solusi alternatif.
- d. Mempertimbangkan seluruh pandangan yang sifatnya pro dan kontra atas semua alternatif terbaik yang telah ditentukan.

### **3. Model Rasional dalam Pengambilan Keputusan**

Tujuan dari teori dan model pengambilan keputusan adalah sebagai alat bantu dalam mengambil sebuah keputusan. Model dalam kajian pengambilan keputusan adalah suatu bentuk skema, sebuah mekanisme atau prosedur yang digunakan untuk menganalisis sistem kausal hubungan dan konsekuensi tindakan. Model pengambilan keputusan dari teori yang dikembangkan bagaimanapun juga tidak terlepas dari faktor kajian utama pengambilan keputusan yaitu; pelaku dan tindakan manusia serta respon manusia terhadap sebuah masalah. Proses pengambilan keputusan yang rasional menunjukkan posisi aktor pengambil keputusan sebagai pembuat keputusan yang memiliki pengetahuan dan informasi yang terbaik.

Model rasional memandang pengambilan keputusan sebagai manusia rasional. Menurut E. F. Harrison model rasional merupakan pendekatan yang sistematis dan logis dengan suatu asumsi bahwa pengambilan keputusan secara rasional dapat mencapai tujuan yang optimal. Model rasional ini menjadi suatu model yang ideal dalam pengambilan keputusan karena sangat mempertimbangkan semua informasi yang relevan secara menyeluruh untuk mencapai keputusan yang terbaik. Pada model ini, memperlihatkan sejumlah langkah yang dilakukan oleh pengambil keputusan dalam menentukan sebuah pilihan alternatif solusi. Berikut langkah-langkah pengambilan keputusan atas pandangan rasionalitas menurut E. F. Harrison:

- a. Definisi masalah
- b. Identifikasi kriteria keputusan
- c. Mengalokasikan bobot pada kriteria

- d. Mengembangkan alternatif
- e. Evaluasi alternatif
- f. Pilih alternatif terbaik

Teori rasional mendasarkan diri pada seluruh proses pengambilan keputusan dalam logika, bukti, dan analisis objektif. Teori rasional memberikan suatu kerangka yang sangat berguna dalam pengambilan keputusan. Dalam konteks pengambilan keputusan teori rasional ini berkaitan dengan model pendekatan *intelligence, design, choice, dan implementation* secara sistematis dan berdasarkan logika. Asumsi utamanya adalah bahwa dalam teori ini baik individu maupun organisasi dapat mengevaluasi semua informasi dan alternatif secara objektif untuk membuat keputusan yang memaksimalkan nilai dan keuntungan tertentu. Berikut merupakan penjelasan konsep kerangka teori rasional:

a. *Intelligence* (Pengumpulan Informasi)

Teori rasional dalam konteks *intelligence* berfokus pada bagaimana pengambilan keputusan mengidentifikasi masalah dan mengumpulkan informasi maupun pilihan alternatif secara logis dan sistematis sebelum mengambil keputusan. *Intelligence* merupakan tahap pertama dalam proses pengambilan keputusan yang dimulai dengan indentifikasi masalah dari peluang yang ada. Teori rasional dalam konteks *intelligence* ini dilakukan secara objektif menggunakan data yang relevan untuk dapat memahami situasi dengan jelas. Tujuannya ialah untuk mendukung keputusan yang optimal dari hasil pengumpulan informasi yang relevan. *Intelligence* ini merupakan sebuah proses pengambilan keputusan yang penting karena melibatkan pengumpulan, pengorganisasian, dan analisis data secara sistematis sebagai dasar yang kuat dalam pengambilan keputusan.

b. *Design* (Perancangan Solusi)

Teori rasional dalam konteks *design* berfokus pada perancangan alternatif setelah mengidentifikasi masalah pada tahap *intelligence*. Pada tahap ini merupakan sebuah langkah dimana berbagai opsi maupun solusi dikembangkan secara logis dan sistematis dalam pengambilan keputusan. Pada proses perancangan solusi, perlu adanya pertimbangan dari berbagai variabel yang dapat mempengaruhi keputusan dari setiap alternatif. Perancangan solusi

jugaharus mmpertimbangkan kelayakan, efisiensi beserta dampak yang akan terjadi. Tujuannya adalah untuk dapat mengembangkan dan mengevaluasi alternatif berdasarkan kriteria yang objektif sehingga dapat menghasilkan keputusan yang paling optimal dan menguntungkan.

c. *Choice* (pemilihan solusi terbaik)

Teori rasional dalam konteks *choice* berfokus pada bagaimana pemilihan solusi terbaik dari berbagai alternatif yang telah dirancang dan dievaluasi. Keputusan yang diambil berdasarkan pada analisis kalkulasi biaya atau manfaat dan efektivitas solusi dalam menyelesaikan masalah. Teori rasional *choice* menekankan pilihan alternatif yang diambil harus memaksimalkan manfaat serta meminimalisir risiko berdasarkan kriteria yang objektif. Pada tahap teori rasional *choice* juga mengharuskan keputusan yang diambil dapat memaksimalkan keuntungan.

d. *Implementation* (Implementasi Keputusan)

Teori rasional dalam konteks implementasi berfokus pada proses pelaksanaan keputusan yang telah dipilih pada tahap rasional *choice* dalam menentukan solusi yang terbaik dan dimana saat rencana tersebut diterapkan dalam praktik. Dalam mengimplementasikan teori rasional ini harus dilakukan secara terstruktur dan sistematis untuk memastikan keputusan yang diambil sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Selain itu, hasil evaluasi pada tahap implementasi digunakan untuk memastikan bahwa solusi yang dipilih berjalan sesuai rencana. Dalam praktiknya implementasi pengambilan keputusan melibatkan perencanaan yang matang, alokasi sumber daya yang efektif, koordinasi yang baik dan evaluasi yang berkelanjutan.

## BAB III

### GAMBARAN UMUM DESA BINANGUN

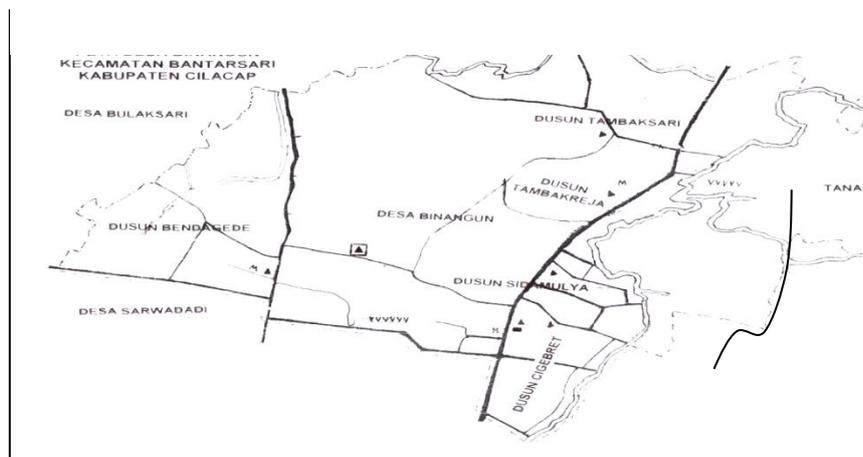
Pada bab ini, penulis memberikan penjelasan mengenai gambaran umum Desa Binangun. Gambaran umum yang dipaparkan menguraikan terkait kondisi geografis Desa Binangun, kondisi demografis Desa Binangun, kondisi sosial, ekonomi dan budaya Desa Binangun, serta gambaran umum pemerintah Desa Binangun.

#### A. Gambaran Umum Desa Binangun

##### 1. Kondisi Geografis

Desa Binangun merupakan salah satu dari delapan desa yang terletak di Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah. Desa Binangun memiliki luas wilayah 226,1 ha yang terletak 9 Km kearah timur laut dari pusat Kecamatan Bantarsari. Secara umum tipologi Desa Binangun terdiri dari persawahan, perladangan, perkebunan, peternakan, nelayan, perhutani. Topografis Desa Binangun secara umum termasuk daerah landai atau dataran rendah, berbukit gelombang, perbukitan terjal, dan berdasarkan ketinggian wilayah Desa Binangun dikasifikasikan kepada (dataran rendah (0-100 mdpl) dataran sedang (>100-500 mdpl) dataran tinggi (>500 mdpl). Iklim di Desa Binangun sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia yang mempunyai Iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung pada pola tanam yang ada di Desa Binangun (RPJMD Binangun, 2019-2025). Berikut adalah luas wilayah dan batas-batas Desa Binangun:

**Gambar 1 Peta Wilayah Desa Binangun**



*Sumber : Kantor Desa Binangun, 2024*

**Tabel 1 Batas-batas Desa Binangun**

<b>Batas-batas Desa Binangun</b>	
Sebelah Utara	Berbatasan dengan perhutani
Sebelah Selatan	Berbatasan dengan Desa Srawadadi
Sebelah Timur	Berbatasan dengan perhutani
Sebelah Barat	Berbatasan dengan Desa Bulaksari

*Sumber : RPJMD Desa Binangun, 2019-2025*

## **2. Kondisi Demografis**

Jumlah penduduk menjadi salah satu faktor yang menentukan perkembangan kualitas sumber daya manusia di suatu daerah. Desa Binangun memiliki jumlah penduduk sebanyak 10.870 jiwa dari total 3316 jumlah kepala keluarga yang terdiri dari laki-laki sebanyak 5561 dan perempuan sebanyak 5389 jiwa. Dari total jumlah penduduk tersebut tersebar di 7 dusun yaitu; Dusun Binangun baru, Gochea, Bendagede, Cigebret, Sidamulya, Tambaksari dan Tambakreja. Desa Binangun terdiri dari 12 Rukun Warga (RW) DAN 55 Rukun Tangga (RT). Desa Binangun banyak dihuni penduduk dengan usia produktif yaitu 25-60 tahun dengan jumlah sebanyak 5348 jiwa. Sedangkan, jumlah usia paling sedikit adalah usia 0-12 bulan dengan jumlah 141 jiwa. Berikut data jumlah penduduk Desa Binangun berdasarkan usia:

**Tabel 2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia**

<b>No.</b>	<b>Usia (Tahun)</b>	<b>Jumlah (Jiwa)</b>
1.	0 – 12 Bulan	141
2.	1 – 5 Tahun	656
3.	5 – 10 Tahun	835
4.	10 – 25 Tahun	2700

5.	25 – 60 Tahun	5348
6.	60 Tahun ke atas	1190
<b>Jumlah</b>		<b>10.870</b>

*Sumber : RPJMD Desa Binangun, 2019-2025*

Ditinjau dari segi kepercayaan dan keagamaan, mayoritas masyarakat Desa Binangun memeluk agama Islam. Mayoritas masyarakat Desa Binangun adalah dari suku etnik Jawa yang memiliki kepercayaannya masing-masing. Masyarakat Desa Binangun memiliki adat Islam kejawen yang sudah menjadi budaya di desa tersebut. Masyarakat Desa Binangun juga ada yang menganut agama non Islam yang menjadi minoritas di kalangan masyarakat desa akan tetapi tetap menjaga kerukunan dan toleransi sesama umat Beragama. Berikut adalah data penduduk Desa Binangun menurut Agama/Kepercayaan:

**Tabel 3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama/Kepercayaan**

No.	Agama/Kepercayaan	Jumlah (Jiwa)
1.	Islam	10.845
2.	Kristen	11
3.	Katholik	8
4.	Hindu	0
5.	Budha	0
6.	Khonghucu	0
7.	Aliran Kepercayaan	6
<b>Jumlah</b>		<b>10.870</b>

*Sumber : RPJMD Desa Binangun, 2019-2025*

Pendidikan merupakan suatu hal yang penting karena pendidikan sebagai proses mendewasakan diri mengubah pola pikir manusia agar lebih maju dengan dibekali ilmu pengetahuan. Tinggi rendahnya pendidikan dapat

mempengaruhi perkembangan pola hidup masing-masing. Pendidikan masyarakat Desa Binangun masih terbilang rendah, mayoritas masyarakat tamat sekolah pada tingkatan SD dengan jumlah 5195 orang. Desa Binangun sendiri memfasilitasi jenjang pendidikan berupa Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTS), Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ). Berikut jumlah penduduk Desa Binangun berdasarkan tingkat pendidikan:

**Tabel 4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)
1.	Tidak Sekolah /Buta Huruf	2.533
2.	Tidak Tamat SD/Sederajat	2.533
3.	Tamat SD/Sederajat	5.195
4.	Tamat SLTP/Sederajat	1.267
5.	Tamat SLTA/Sederajat	736
6.	Tamat D1, D2, D3	36
7.	Sarjana/S-1/S-2/S-3	37

*Sumber : RPJMD Desa Binangun, 2019-2025*

### 3. Kondisi Sosial, Budaya dan Ekonomi

Kondisi sosial masyarakat Desa Binangun berhubungan dengan kerukunan antar sesama dan menjadi salah satu kesatuan dalam kehidupan bersosial yang didasari atas kerukunan, kerjasama, gotong royong dan saling tolong menolong antar warga masyarakat. Kegiatan-kegiatan sosial di masyarakat biasanya diselenggarakan oleh berbagai organisasi/komunitas sosial yang aktif seperti Karangtaruna, PKK, IPNU/IPPNU, Muslimat dan lainnya. Dalam rangka untuk menjaga talisilahturami dan menyalurkan hobi yang disenangi, di Desa Binangun sering diadakan perlombaan voli ibu-ibu dan kaum remaja antar dusun setiap sebulan sekali. masyarakat Desa Binangun baik dari kalangan muda maupun tua gemar berolahraga terutama voli. Selain

kegiatan olahraga, mayoritas masyarakat Desa Binangun adalah islam, sehingga banyak juga kegiatan islami di tiap bulanya seperti yasin dan tahlil, kegiatan muslimatan, sholawatan dan kegiatan-kegiatan perayaan hari raya besar islam. Berikut adalah contoh kegiatan sosial di Desa Binangun:

### **Gambar 2 Tahlilan dan Lomba Voli**



*Sumber : Semaci, 2024*

Desa Binangun merupakan desa yang masih memegang teguh warisan budaya yang turun temurun sehingga masyarakat masih memegang warisan leluhur yang dijaga sampai sekarang. Masyarakat Desa Binangun masih sangat kental dengan adat istiadat dan budaya yang sudah dijalankan selama bertahun-tahun. Salah satu budaya yang diadakan di setiap tahunnya adalah Nyadran. Nyadran merupakan kegiatan tasyakuran sebagai ungkapan syukur kepada yang Maha Kuasa atas rizki dan keselamatan di dunia serta mendoakan para leluhur sesepuh Desa Binangun. Nyadran di Desa Binangun ada 2 jenis yaitu; nyadran di bulan Sura (kalender jawa) dan nyadran sedekah bumi di bulan apid. Kegiatan nyadran tersebut berupa selamatan dengan dibacakan do'a dan tahlil dan menyajikan makanan tumpeng dan hasil bumi lainnya serta dilakukan pemotongan tumpeng. Unikny di Desa Binangun saat acara puncak nyadran tersebut di akhiri dengan pentas kesenian seperti tari kuda lumping atau wayang kulit (Siran, 2024).

Desa Binangun juga memiliki kesenian budaya sanggar Tari Kuda Lumping atau Tari Jaranan yang biasa di sebut Ebeg. Ebeg merupakan salah satu kesenian tarian tradisional khas banyumasan yang menggunakan boneka kuda yang dianyam dari bambu dan diberi rambut dari ijuk. Tari ebeg berasal dari kata bebeg dalam bahasa jawa yang artinya berkelahi, sehingga tari ebeg menggambarkan prajurit yang sedang berperang. Unikny para penari akan dirasuki oleh makhluk ghoib yang bisa menari sehingga sebagai daya tarik

penonton dan salah satu yang khas dari tarian tersebut. Di Desa Binangun sendiri memiliki 3 sanggar budaya kesenian ebeg yang cukup terkenal antara lain yaitu; Sanggar Wahyu Adi Sadiwa, Sanggar Wahyu Kencana Laras, Sanggar Wahyu Turonggo Mulyo. Tujuan kesenian budaya ebeg tersebut adalah sebagai upaya melestarikan budaya seni tari tradisional dan sebagai ajang menjalin tali silaturahmi dengan menghibur masyarakat. Berikut adalah gambar budaya Nyadaran dan Tari Tradisional Ebeg:

**Gambar 3 Budaya Nyadaran dan Tari Tradisional Ebeg**



*Sumber : Saraswati, 2024*

Perekonomian merupakan salah satu aspek untuk menentukan kemajuan masyarakat di suatu desa. Pembangunan masyarakat juga meninjau pada aspek perekonomian masyarakat guna mencapai kesejahteraan. Berikut kondisi perekonomian menurut kesejahteraan masyarakat Desa Binangun:

**Tabel 5 Kesejahteraan Warga Desa Binangun**

No.	Uraian	Jumlah
1.	Penduduk Miskin	1998 KK
2.	Penduduk sedang	1094 KK
3.	Penduduk Kaya	124 KK
4.	Penduduk usia 15-55 tahun yang belum bekerja	984 Orang

*Sumber : RPJMD Desa Binangun, 2019-2025*

Secara umum mata pencaharian penduduk Desa Binangun dapat dikelompokkan kedalam beberapa bidang mata pencaharian seperti; petani, buruh tani, wiraswasta/dagang, swasta, karyawan, pegawai negeri sipil dan lain-lain. Akan tetapi yang menjadi mayoritas mata pencaharian penduduk Desa Binangun adalah di sektor pertanian. Dari luasnya wilayah Binangun sebagian besar adalah area sawah dan perkebunan sehingga sangat cocok ditanami padi dan beberapa palawija lainnya. Permasalahan yang sering muncul dalam melihat kondisi ekonomi masyarakat binangun adalah kurangnya ketersediaan lapangan pekerjaan sehingga angka pengangguran dan kemiskinan masih tinggi di Desa Binangun. Berikut adalah jumlah data penduduk berdasarkan mata pencaharian:

**Tabel 6 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian**

No.	Mata Pencaharian	Jumlah (orang)
1.	Petani	1.036
2.	Buruh Tani	469
3.	Wiraswasta/Pedagang	387
4.	Swasta	276
5.	Karyawan	5
6.	TNI/Polisi	1
7.	Nelayan	9
8.	Tukang	2
9.	Pengrajin	2
10.	Peternak	2
11.	Jasa	6
12.	Pensiunan	13

No.	Mata Pencaharian	Jumlah (orang)
13.	Tidak Bekerja/Menganggur	1.600
<b>Jumlah</b>		<b>3.808</b>

Sumber : RKPD Desa Binangun, 2023

#### 4. Kondisi Infrastruktur Desa

Infrastruktur merupakan sarana prasarana yang penting karena dapat memfasilitasi aktivitas maupun kebutuhan masyarakat. Desa Binangun memiliki berbagai fasilitas infrastruktur selayakna seperti infrastruktur di desa lain yang dapat memfasilitasi pelayanan publik kepada masyarakat. Fasilitas infrastruktur tersebut berupa prasarana umum, sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana peribadatan dan sarana ekonomi. Adanya pembangunan infrastruktur desa diharapkan dapat berdampak pada perubahan sosial, ekonomi dan budaya yang seimbang agar dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa agar menjadi lebih baik. Berikut jumlah kondisi prasarana infrastruktur Desa Binangun:

**Tabel 7 Jumlah Prasarana Infrastruktur Desa Binangun**

No.	Prasarana Infrastruktur	Jumlah	Satuan
1.	<b>Prasarana Umum</b>		
	a. Jalan	22,2	Km
	b. Jembatan	6	Unit
	c. Kantor Desa	1	Unit
	d. Balai Pertemuan	4	Unit
	e. Sanggar Kesenian/Budaya	10	Unit
	f. Sumur Desa	1	Unit
2.	<b>Prasarana Pendidikan</b>		

No.	Prasarana Infrastruktur	Jumlah	Satuan
	a. Perpustakaan Desa	1	Unit
	b. Gedung Sekolah TK/PAUD	3	Unit
	c. Gedung Sekolah TPQ	4	Unit
	d. Gedung Sekolah SD/Sederajat	6	Unit
	e. Gedung Sekolah SLTP/Sederajat	3	Unit
	f. Gedung Sekolah SLTA/Sederajat	0	Unit
	g. Gedung Perguruan Tinggi	0	Unit
3.	<b>Prasarana Kesehatan</b>		
	a. Puskesmas	0	Unit
	b. Poskesdes	1	Unit
	c. Polindes	1	Unit
	d. Posyandu	7	Unit
	e. Sarana Air Bersih	1	Unit
	f. MCK	0	Unit
4.	<b>Prasarana Peribadatan</b>		
	a. Masjid	7	Unit
	b. Mushola	19	Unit
	c. Gereja	0	Unit
	d. Pura	0	Unit

No.	Prasarana Infrastruktur	Jumlah	Satuan
	e. Wihara	0	Unit
	f. Klenteng	0	Unit
5.	<b>Prasarana Ekonomi</b>		
	a. Pasar Desa	1	Unit
	b. Kios Desa	11	Unit

*Sumber : RKPD Desa Binangun, 2023*

## B. Profil Desa Binangun

### 1. Sejarah Desa Binangun

Banyak yang tidak mengetahui sejarah terkait berdirinya Desa Binangun karena desa tersebut berdiri pada tahun yang tidak diketahui. Berdasarkan cerita para sesepuh desa, Desa Binangun sudah berdiri sejak lama sekali, sehingga banyak yang tidak mengetahui asal muasal desa tersebut. Kata Binangun memiliki makna yang besar, bina artinya membangun, mendirikan sebuah desa sehingga Binangun memiliki arti bangkit dan berdiri. Desa Binangun berjarak 9 Km dari pusat kecamatan Bantarsari dengan 7 bagian wilayah dusun yaitu, Binangun Baru, Gochea, Bendagede, Cigebret, Sidamulya, Tambaksari, Tambakreja. Berikut beberapa Kepala Desa Yang pernah Menjabat di Desa Binangun:

**Tabel 8 Kepala Desa Binangun**

No.	Nama	Masa Jabatan	Keterangan
1.	Mirun Johan. S	2008 - 2013	Kepala Desa
2.	Mardiyono	2013 - 2019	Kepala Desa
3.	Mardiyono	2019 - sekarang	Kepala Desa

*Sumber : RPJMD Desa Binangun, 2019-2025*

## 2. Struktur Pemerintah Desa Binangun

Sebagaimana dipaparkan dalam UU No. 06 Tahun 2014 tentang desa, bahwa di dalam desa terdapat tiga kategori kelembagaan yang memiliki peran masing-masing dalam tata tertib kelola desa, yaitu; Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan Lembaga Kemasyarakatan. Dalam UU tersebut menyebutkan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintah ditingkat desa, dilaksanakan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa. Pemerintah desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan setempat berdasarkan berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui serta dihormati dalam sistem pemerintahan di negara ini. Pemerintah Desa berdasarkan Jabatannya di Desa Binangun terdiri dari Kepala Desa, Sekertaris Desa, Kaur Keuangan, Kaur umum, Kaur Kesejahteraan, Staf Desa dan 7 Kepala Dusun.

**Gambar 4 Struktur Pemerintahan Desa Binangun**

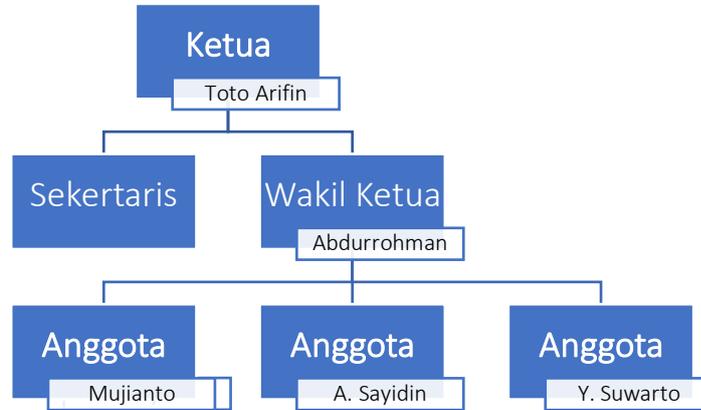


Sumber : Kantor Desa Binangun, 2024

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa, sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah desa. BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa. Keanggotaan BPD adalah wakil dari penduduk desa yang bersangkutan berdasarkan

keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Berikut adalah struktur lembaga BPD Desa Binangun:

**Gambar 5 Struktur Lembaga BPD**



*Sumber : Kantor Desa Binangun, 2024*

### 3. Visi Misi Desa Binangun

#### Visi :

“Binangun Maju Sejahtera Adil untuk Semua”

Adapun untuk mewujudkan Visi tersebut dijabarkan kembali dalam Misi-misi yang menjadi prioritas Desa Binangun tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) sebagai berikut:

#### Misi :

1. Mewujudkan kepemimpinan yang amanah merakyat dan demokratis.
2. Mewujudkan pembangunan infrastruktur secara proposional adil bagi seluruh masyarakat.
3. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran.
4. Peningkatan sumber daya manusia yang mampu menguasai teknologi digital, melalui pendidikan, kesehatan, ekonomi, seni budaya serta pemberdayaan generasi muda dan perempuan.
5. Mewujudkan sistem dan budaya kerja pemerintah desa yang terbuka professional bersih cepat dan tepat.

## BAB IV

### PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA BINANGUN

Bab ini berisi analisis data temuan peneliti saat dilapangan yang berkaitan dengan pembahasan pada bab ini yaitu mengenai pengambil keputusan (*decision maker*) sebagai aktor politik pembangunan desa yang paling dominan serta berpengaruh dalam pengambilan keputusan pembangunan dan proses pengambilan keputusan dalam pembangunan infrastruktur desa dalam segi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Analisis data ini merupakan temuan fakta yang ada di lapangan dengan pengumpulan data melalui wawancara kepada narasumber yang terkait seperti pemerintah Desa Binangun serta menggunakan studi literature dokumen yang mendukung.

#### A. Aktor Politik Pembangunan Sebagai Pengambil Keputusan (*Decision Maker*)

Salah satu unsur penting dalam pembangunan di suatu desa adalah aktor politik pembangunan. Aktor politik pembangunan merupakan bagian dari individu maupun kelompok yang mempunyai pengaruh, kekuasaan, dan peran dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan serta evaluasi pembangunan di suatu wilayah. Dalam konteks pembangunan, aktor politik memainkan peran penting dalam partisipasinya merancang, mengimplementasikan, serta mengawasi kebijakan yang berlaku. Aktor politik juga berperan sebagai pengambil keputusan untuk mengusulkan dan memilih alternatif terbaik dari berbagai pilihan. Secara definitif, pengambilan keputusan merupakan proses pemilihan alternatif dari sebuah tindakan untuk mencapai sasaran atau tujuan tertentu (Rizky Dermawan, 2022).

Pengambil keputusan merupakan seseorang baik individu maupun kelompok yang memiliki kewenangan membuat suatu pilihan paling akhir dan keputusan memilih dari beberapa alternatif solusi yang ada untuk mencapai suatu tujuan. Dengan demikian pengambil keputusan adalah pelaku yang aktif secara kesadarannya siap menanggung konsekuensi dari alternatif yang telah dipilih. Aktor politik pembangunan sebagai pengambil keputusan yang terlibat di Desa Binangun meliputi pemerintah dan keterwakilan dari seluruh kalangan masyarakat desa seperti; pemerintah desa (Kepala Desa dan perangkatnya), Badan Penyelenggara Desa (BPD), Lembaga kemasyarakatan (LPMD/LSM), Organisasi masyarakat

(Ormas), Organisasi kelembagaan desa, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, Kepala Dusun, RT/RW dan lainnya.

## **1. Kepala Desa**

Kepala Desa merupakan pemimpin pemerintahan di tingkat desa yang memiliki tanggung jawab penuh dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan serta pemberdayaan masyarakat. Kepala desa di pilih oleh masyarakat melalui pemilihan umum desa dengan maksimal menjabat 2 periode. Peran dan tanggung jawab kepala desa diatur berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Salah satu peran pentingnya adalah pembangunan desa, seorang kepala desa memimpin dan mengawasi pelaksanaan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, fasilitas umum serta pemberdayaan masyarakat (UU RI No. 6 Tahun 2014).

Kepala Desa Binangun dipimpin oleh Bapak Mardiyono, Jauh sebelum menjadi kepala desa beliau adalah bekerja sebagai buruh ditempat selipan padi, lalu juga pernah menjadi penjual perhiasan serta dan menjadi petani di desa. Selain bekerja, beliau sangat aktif dalam setiap kegiatan di Desa Binangun. Dulu beliau sangat aktif dalam mengikuti kegiatan sosial desa dengan menjadi anggota karantaruna dan pernah menjadi bagian anggota LPMD Desa Binangun. Awal mula berkarir menjadi bagian kelembagaan pemerintah desa beliau pernah menjabat menjadi ketua RT dan ketua RW selama 3 tahun. Kemudian, di tahun 2013 beliau dipercaya untuk maju ikut serta pemilihan kepala desa dan akhirnya menang menjadi Kepala Desa Binangun periode 2013 - 2018. Ditahun 2019 beliau mendapat kepercayaan oleh masyarakat desa untuk menjabat menjadi kepala desa dan akhirnya kembali menjadi Kepala Desa Binangun periode 2019 – Sekarang. Seperti yang disampaikan beliau sebagai narasumber.

*“Saya sebenarnya juga kurang tau apa yang menjadi suatu hal kepercayaan dari masyarakat yang diberikan ke saya. Mungkin masyarakat melihat saya cukup aktif di kegiatan lingkungan masyarakat dengan menilai setiap tutur kata dan tingkah laku serta*

*hubungan sosial kepada masyarakat sehingga saya mendapatkan amanah untuk mengurus pemerintahan desa dan mungkin karena sebelumnya saya saya pernah aktif di karantaruna, LPMD, menjadi ketua RT dan ketua RW selama 3 tahun serta sering aktif berpartisipasi di setiap kegiatan desa". (Wawancara: Mardiyono, 31 Mei 2024).*

Dari yang telah disampaikan diatas, menjadi sebuah pernyataan bahwa beliau memiliki karakteristik kepemimpinan yang dapat menarik kepercayaan masyarakat. Dari kepercayaan tersebut beliau menjadi orang nomor satu di Desa Binangun dan memiliki pengaruh besar di lingkup masyarakat Desa Binangun. Selain menjadi kepala desa, beliau juga memiliki pekerjaan sampingan sebagai petani sawah dan perkebunan, membuka jasa penyewaan alat hajatan, serta pemilik sanggar tari tradisional Desa Binangun. Sebegitu kuat pengaruh dan kepercayaan dari masyarakat yang dimilikinya membuat beliau bisa menjabat kepala desa selama 2 periode ini (Mardiyono, 2024).

Dari pernyataan diatas, peneliti menganalisa bahwa beliau adalah salah satu aktor politik pembangunan Desa Binangun yang paling dominan dan kuat di masyarakat. Selain karena pengaruh dan kepercayaan, beliau adalah kepala desa yang memiliki jabatan politik sehingga mempunyai hak kewenangan paling tinggi di tingkat desa. Di setiap perencanaan pembangunan desa dari kegiatan musdus, musdes, musrenbangdes beliau sering turut andil berpartisipasi di kegiatan musyawarah tersebut. Keterlibatannya dalam ikut serta pengambilan keputusan mendominasi rung lingkup pelaksanaan musyawarah yang sedang dilaksanakan. Kepala Desa mempunyai koridor jabatan poltik yang tinggi sehingga memiliki kebebasan memilih maupun mengajukan aspirasinya sendiri.

## **2. Ketua BPD**

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan sebuah lembaga tingkat desa yang memiliki fungsi utama sebagai badan legislatif desa. Sebagai badan permusyawaratan, BPD bertugas untuk mengkoordinir dan mengelola setiap musyawarah di tingkat desa untuk memastikan bahwa pengambilan keputusan dalam menentukan kebijakan sesuai dengan kepentingan dan aspirasi

masyarakat. BPD berfungsi sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat untuk memastikan aspirasi dari masyarakat di dengar dan diperhatikan pemerintah. BPD secara keseluruhan dapat memainkan peran dalam menciptakan pemerintahan yang demokratis, transparan, dan akuntabel agar kepentingan dan kebutuhan masyarakat diutamakan dalam setiap kebijakan yang dijalankan (Arifin, 2024).

Ketua BPD Desa Binangun adalah Bapak Toto Arifin, yang sekarang adalah masa periode ke-2 beliau menjabat mejadi ketua BPD Desa Binangun, sama halnya seperti Kepala Desa beliau juga mendapat kepercayaan oleh masyarakat desa karna aktif di setiap kegiatan sosial desa. Beliau diangkat menjadi ketua BPD melalui proses pemilihan secara musyawarah keterwakilan dari tiap dusun dan keterwakilan RT/RW. Selain kepala desa, beliau sebagai ketua BPD juga merupakan salah satu aktor politik pembangunan yang paling dominan. BPD memiliki kewenangan lebih tinggi daripada pemerintah desa karena dilihat dari fungsi pengawasan dan dalam menyepakati sebuah keputusan. Seperti yang disampaikan narasumber.

*“Peran BPD Dalam perencanaan pembangunan desa cukup besar karena kewenanganya sebagai badan permusyawaratan yang membawa aspirasi masyarakat. Jadi BPD ini aktif terus berpartisipasi dalam musyawarah dusun maupun desa. Dan di dalam musrenbangdes ketua BPD ini adalah pemimpin di musyawarah tersebut. Beliau memiliki wewenang menerima maupun menolak sebuah keputusan”.* (Wawancara: Priono, 2 juni 2024).

### **3. Kepala Dusun**

Kepala dusun merupakan struktur pemerintahan desa yang bertugas dan bertanggung jawab mengelola administrasi dan pembangunan di wilayah dusun. Kepala dusun memainkan peran penting penting dalam menjaga ketertiban, memfasilitasi kebutuhan dan kegiatan serta melaksanakan kebijakan pemerintah desa di tingkat dusun. Kepala dusun juga terlibat dalam proses pengambilan keputusan bersama kepala desa dan lembaga pemerintah desa mengenai pembangunan desa. Dalam pengambilan keputusan kepala dusun berkontribusi secara signifikan untuk memastikan keputusan pembangunan

desa memperhatikan kebutuhan, aspirasi, potensi masyarakat di wilayah dusun (Priono, 2024).

Desa Binangun terdapat 7 dusun dengan kepala dusunnya masing-masing. Setiap kepala dusun di Desa Binangun berpartisipasi aktif ikut serta dalam pengambilan keputusan terutama pada tahap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa. Bapak Priono selaku Kepala Dusun Sidamulya merupakan salah satu aktor politik pembangunan yang paling aktif diantara kepala dusun lainnya. Dusun Sidamulya ini merupakan pusat lokasi kantor balaidesa dan wilayah dusun yang ditempati oleh kepala desa, BPD dan beberapa perangkat lainnya. Partisipasinya dalam ikut serta pengambilan keputusan sangat membantu dalam hal pengumpulan informasi di wilayah dusun untuk menyerap aspirasi masyarakat di dusun tersebut. Selain itu, kepala dusun juga bertugas sebagai pusat koordinasi mengenai program pembangunan antara pemerintah dan masyarakat. Selalu melakukan perbandingan terhadap masyarakat di wilayah dusunnya dari proses perencanaan pembangunan di tingkat Musdus sampai ke Musrenbangdes (Saminudin, 2024).

#### **4. Ketua RT/RW**

Ketua RT (Rukun Tetangga) dan Ketua RW (Rukun Warga) menduduki posisi jabatan yang penting dalam struktural pemerintahan desa. Peran RT/RW sangat penting dalam memfasilitasi dan menjaga stabilitas sosial serta mengkoordinasikan pembangunan yang berkelanjutan dan berorientasi pada kepentingan masyarakat di wilayahnya. Dalam pengambilan keputusan peran ketua RT/RW menjadi salah satu unsur yang penting dalam proses perencanaan pembangunan desa. Ketua RT/RW menjadi keterwakilan langsung dari masyarakat di wilayahnya di tingkat yang paling lokal, dipilih dan ditunjuk untuk mewakili kepentingan, kebutuhan serta aspirasi masyarakat di wilayah RT dan RW (Rusiman, 2024).

Desa Binangun terdiri dari 12 Rukun Warga (RW) DAN 55 Rukun Tetangga (RT). Kehadiran partisipasi RT/RW menjadi mayoritas peserta perencanaan pembangunan desa dalam musrenbangdes. Masing-masing ketua RT/RW di Desa Binangun bertanggung jawab atas penyusunan program kerja pembangunan yang paling mendasar sesuai kebutuhan masyarakat. Ketua

RT/RW paling bertanggung jawab dalam koordinasi kepada kepala dusun terkait pengumpulan informasi dasar aspirasi masyarakat. Ketua RT/RW juga bertugas melakukan pendampingan proyek pembangunan untuk memastikan pembangunan di wilayah RT/RW tersebut berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat secara maksimal kepada masyarakat (Rusiman, 2024).

## **5. Ketua LPMD**

Ketua LPMD (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa) merupakan lembaga yang berperan memperkuat partisipasi masyarakat untuk berkontribusi dalam pembangunan di tingkat desa. Dalam pengambilan keputusan perencanaan dan pembangunan desa, ketua LPMD bertanggung jawab memimpin dan mengarahkan program pemberdayaan masyarakat desa dengan mengidentifikasi kebutuhan masyarakat serta merencanakan program kerja pembangunan yang dapat meningkatkan kesejahteraan. Selain itu, ketua LPMD sebagai fasilitator dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat untuk mendorong partisipasi yang aktif dalam berbagai kegiatan pembangunan dan sosial (Suratno, 2024).

LPMD Desa Binangun dipimpin oleh Bapak Suratno sejak tahun 2013 hingga sekarang. Beliau aktif berkontribusi menjadi partisipan dalam perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes). Akan tetapi struktural anggota LPMD Desa Binangun tidak terlalu aktif, sehingga dalam menjalankan tugas, pokok, dan fungsi (tupoksi) belum maksimal. Pada dasarnya keterlibatan LPMD dalam pengambilan keputusan perencanaan pembangunan desa sangat mewakili aspirasi masyarakat, karena dapat memberikan informasi alternatif pilihan dalam mengembangkan potensi sumber pembangunan untuk meningkatkan kapasitas ekonomi, sosial, dan lingkungan masyarakat Desa Binangun (Suratno, 2024).

## **6. Kelompok Perempuan**

Kelompok perempuan dalam lingkup desa terdiri dari sekelompok perempuan dalam organisasi maupun komunitas seperti; kelompok PKK, Kader Posyandu, Kelompok Tani Wanita (KTW), kelompok pengajian, Payat, Muslimat dan lainnya. Kelompok PKK sebagai kelompok perempuan di Desa Binangun menjadi yang paling aktif daripada kelompok lainnya.

Keterlibatan kelompok perempuan dalam pengambilan keputusan pembangunan desa cukup tersentral karena tidak banyak yang dilibatkan. Akan tetapi, keterlibatan kelompok perempuan di Desa Binangun cukup aktif menyerukan aspirasinya dalam kegiatan perencanaan pembangunan desa. Peran kelompok perempuan ini sangat penting dalam peningkatan kualitas pendidikan, ekonomi dan kesehatan masyarakat (Mumfaridah, 2024).

## **7. Kelompok Tani**

Mayoritas mata pencaharian penduduk Desa Binangun adalah bertani, sehingga kelompok tani menjadi salah satu aktor pembangunan yang dilibatkan dalam pengambilan keputusan pembangunan desa. kelompok tani dalam desa biasa di sebut dengan istilah Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani). Bapak Nasikun menjadi salah satu ketua gapoktan di Desa Binangun. Beliau sering dilibatkan untuk ikut serta berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan desa. keterlibatan kelompok tani dapat memberikan informasi permasalahan yang dihadapi oleh petani Desa Binangun khususnya dalam bidang pembangunan infrastruktur (Nasikun, 2024).

Peran kelompok tani sangat penting, dalam upaya meningkatkan potensi pengelolaan sumber daya alam dan juga pengembangan ekonomi desa. Untuk memfasilitasi aktivitas pertanian desa, perlu melibatkan kelompok tani dalam pengambilan keputusan pembangunan desa. Kelompok tani bersama pemerintah desa bekerja sama dalam perencanaan serta pelaksanaan program pembangunan melalui partisipasi dalam musyawarah desa. Selain itu, sebagai fungsi pengawasan dari kelompok tani untuk memastikan bahwa penggunaan dana desa sesuai dengan apa yang diinginkan dan menjadi kebutuhan petani Desa Binangun secara transparansi dan akunabel (Nasikun, 2024).

## **8. Tokoh Pemuda**

Tokoh pemuda desa merupakan sekelompok individu pemuda pemudi di suatu desa yang memiliki peran penting sebagai penggerak dalam memajukan desa. Tokoh pemuda ini sebagai generasi muda dan penerus bangsa melalui inisiatif serta kepemimpinannya berkontribusi dalam pembangunan desa. Keberagaman peran dari tokoh pemuda desa ini memiliki semangat besar berkontribusi dalam berbagai aspek kehidupan terutama dalam bidang

pembangunan ekonomi, sosial budaya dan lingkungan. Dalam pengambilan keputusan pembangunan di Desa Binangun, juga melibatkan partisipasi dari tokoh pemuda (Aan, 2024).

Tokoh pemuda di Desa Binangun terdiri dari karantaruna desa dan sekelompok pemuda yang aktif di setiap dusun. Keaktifan karantarunan Desa Binangun dipandang aktif hanya dalam kegiatan agustusan. Akan tetapi, partisipasinya dalam musrenbang cukup aktif, walaupun masih tidak aktif berkontribusi dalam pelaksanaan pembangunan. Kontribusinya dalam pengambilan keputusan membantu pemerintah desa dalam mengidentifikasi prioritas dan tantangan yang dihadapi oleh generasinya dengan memberikan pemahaman dalam bidang pembangunan desa. partisipasinya juga untuk memastikan bahwa aspirasi dan kebutuhan generasi pemuda tercermin dalam perencanaan pembangunan.

## **9. Tokoh Masyarakat**

Tokoh masyarakat desa merupakan seseorang yang dihormati, disegani, dan orang yang paling dituakan di suatu wilayah karena diakui oleh warga masyarakat atas kontribusinya positifnya dalam lingkungan masyarakat. Tokoh masyarakat dalam desa, merupakan salah satu aktor yang memiliki pengaruh yang besar di wilayahnya. Dalam pengambilan keputusan perencanaan pembangunan, di Desa Binangun tokoh masyarakat selalu dilibatkan karena pengaruhnya yang kuat dalam memberikan arahan mengenai kebijakan pembangunan dan kegiatan ekonomi, sosial lainnya (Hanifan, 2024).

Partisipasi tokoh masyarakat di Desa Binangun biasa dihadiri oleh tokoh pemuka agama dan sesepuh budaya. Mengingat mayoritas warga Desa Binangun beragama islam dan memegang erat budaya adat istiadat jawa. Tokoh masyarakat desa menjadi salah satu sumber utama dalam memberikan informasi mengenai kondisi sosial, ekonomi budaya dan lingkungan masyarakat. Peran tokoh masyarakat dalam desa, sebagai mediator antara pemerintah maupun lembaga desa dengan masyarakat karena dapat membantu dalam memahami tentang perencanaan pembangunan desa (Hanifan, 2024).

Aktor-aktor yang telah disebutkan tersebut memiliki peran serta hak untuk berpartisipasi dan terlibat dalam pengambilan keputusan yang dapat

mempengaruhi arah kebijakan dan hasil pembangunan di desa. Pengambilan keputusan tersebut berdasarkan musyawarah bersama dimana semua partisipan memiliki hak demokratis bebas berpendapat dan berargumen. Hal ini, untuk memastikan bahwa keputusan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh pihak atas saja, akan tetapi juga mencerminkan demokratisasi serta pemenuhan kebutuhan masyarakat. Setiap keterwakilan aktor politik pembangunan desa dapat memainkan peranya masing-masing dalam proses pembangunan desa. Keterlibatan para aktor diatas dibuktikan dengan daftar hadir kegiatan musrenbang Desa Binangun sebagai berikut:

Gambar 6 Daftar Hadir Musrenbang Desa Binangun

DAFTAR HADIR

: Selasa, 18 Oktober 2022

: Balai Desa Binangun

: Penyusunan Rencana Pembangunan Desa (RKP Desa) Tahun 2023 dan Daftar Usulan RKP Desa Tahun 2024.

WAKTU/TANGGAL  
LOKASI  
TEMPAT

NO	NAMA	JENIS KELAMIN		JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
		LK	PR			
1	Waguno	✓		Sekeloa	Binangun	1
2	Kusnadi	✓		Kon. Desa	K. P. 01	2
3	ZURRAWO	✓		Perilik	Kerwil Bter	3
4	Ny. Bariyah		P	Kat. TP. Pale	Sidamulya	4
5	BARAB		P	K. P. 01	Binangun	5
6	Suryanto	✓		Kapolsek	Binangsan	6
7	Klamisem		P	PLD	Binangsan	7
8	M. HASIM BAKIR	✓		KEMANTAN	Binangsan	8
9	Bayu Indra R	✓		PD	KC Bantoran	9
10	Basuki S.	✓		UPT PRAD	Binangun	10
11	PRYONO	✓		Kadus	Sidamulya	11
12	Sp Sartono		P	TP. PKK	Bts	12
13	SADIRI XI				Binbaru	13
14	Abdur Rohman	✓		BPD	Tambakreja	14
15	Watiwan-soring	✓		RT	bin baru	15
16	DARSIM			R.W.		16
17	M.H.F.D. A.G			C. 01	CIGEBRET	17
18	Mudjalsan	✓		PZA	Bendagede	18
19	Kasim	✓		RW 03		19
20	AIVIT UTOMO	✓		RT 03	Sidamulya	20
21	DAKAM	✓		RT 03	Sidamulya	21
22	SLAMET R	✓		RT	SIDAMULYA	22
23	TUSONO	✓		RT 06	Sidamulya	23
24	Sakimin Edy P.	✓		RT 04	Cigebret	24
25	MUARODI	✓		R.W. 10	Bendagede	25
26	EDI BUDI P.	✓		KPMD	Tambakreja	26
27	SUKIRANI	✓		RT 02/15	Tambakreja	27
28	Iluman	✓		RT 04/01	Tambakreja	28
29	Tejo gedianto	✓		RT 1/01	Tambakreja	29
30	Abdul Kacim	✓		RT 02/11	Binangsan	30
31	Hadirin	✓		RT 01/06	Tambakreja	31
32	TUGIRU	✓		R.W. 01	CIGEBRET	32
33	Rudiman	✓		RT 02/16	Cigebret	33
34	Karimin Indran	✓		RT 2/7	Tambakreja	34
35	KAMUSI	✓		RT 05/08	Tambakreja	35
36	TUMIRAN	✓		RT 1/09	Binangsan	36
37	Badrudin	✓		7/8	Tambakreja	37
38	Siti Nurwan		P	BPD	2/0	38

No	Nama	Sex	Religion	Address	Age	Signature
39	Linda Eprillia	L	P	Bidan	3/11	39
40	Wajudin	L		R.02	Tambak Sari	40
41	Saber	L	P	R.05	Tambak Sari	41
42	SITI RAHAYU	L		Brangkat	Binangun	42
43	Co Bin	L		Sof	Cigebret	43
44	M.OND	L		Rt 03	Dundagreb	44
45	Agus m hayud	L	P	TOMAS	Tambak Sari	45
46	Mundari ddi.	L		Sof adu	Binangun	46
47	Pardoyo	L		Rt 01/02	Cigebret	47
48	Sepanto	L		Rt. 03/08	Tambak Sari	48
49	Kumanto	L		Rt 03 PD	Cigebret	49
50	A. skylin	L		Rt 0	Binangun	50
51	Z. Sumo	L		SPD	Binangun	51
52	MARTO	L		Rt 02/12	Gocca	52
53	Sugiman	L		Rt 04/06	Tambak Sari	53
54	Rokom	L		Badu	B. Baru	54
55	KSU SIMAN	L		form	Gocca	55
56	ABASALAM	L		Rt 01/01	Cigebret	56
57	Gris Gayanto	L		Gapatan	Eda	57
58	Mustafa	L		Sof Kera	Tambak Sari	58
59	Klasikan	L		Warga	Cigebret	59
60	Bambang H	L		KADUS	TB RI	60
61	Sarman	L		Kadur	Cigebret	61
62	Almudhar	L		Rt 03/07	Binangun	62
63	Sarhan	L		Sum 03	Binangun	63
64	Kwart	L		Rt 09	Gocca	64
65	Pesang s	L		Rt 05/07	KSOKI	65
66	Piko	L		Rt 03/07	TB Sari	66
67	ABUS	L		02/01	Cigebret	67
68	Hamid wawasa	L	P	3/3	stdamulya	68
69	Ismiyati	L		3/6	Tambak Sari	69
70	Kartono	L		1/11	stdamulya	70
71	Su kurni	L		form	Binangun	71
72	Heri S	L		BOS	Binangun	72
73	Iswanta	L		VURU KUNCI	BINANGUN	73
74	NURYADI	L		02/00	T. Paia	74
75	RAMKUN S	L		POKJA III	Binangun	75
76	Mai Asiyati	L	P	POKJA I	Binangun	76
77	SITI TARSİYAH	L	P	POKJA II	Binangun	77
78	SITI FATIMAH	L	P	POKJA II	Binangun	78
79	Puyunty	L		unt	Cigebret	79
80	Co Bin	L		wesya	TB Sari	80
81	SUMER	L		Kasipam	Binangun	81
82	Joko Siman	L		Kunt	Cigebret	82
83	Kurnia Drik	L			Cigebret	83
84	Mariana prihapani	L	P		Cigebret	84

No	Nama	Sex	PKB	Tempat Lahir	Tgl Lahir	No	Tempat Lahir	No
85	Amia Darius	V	P	Korin	Barbara	85	Barbara	
86	Sedatm	L		Korin	Proz/O	86	Proz/O	
87	Wahid Umar P	L		Toba Pandi	Rt 02/03	87	Toba Pandi	
88	Wahid Umar P	L		Rw 03	Sidamulya	88	Sidamulya	
89	Wahid Umar P	L		Rw 04	Sidamulya	89	Sidamulya	
90	Wahid Umar P	L	P	Polija	Sidamulya	90	Sidamulya	
91	Wahid Umar P	L	P	Polija	Tambakreja	91	Tambakreja	
92	Wahid Umar P	L		TO Pem	Sidamulya	92	Sidamulya	
93	Wahid Umar P	L		Tomas	Sidamulya	93	Sidamulya	
94	Wahid Umar P	L		Rt 01/04	Sidamulya	94	Sidamulya	
95	Wahid Umar P	L	P	teper	Sidamulya	95	Sidamulya	
96	Wahid Umar P	L		Tomas	Cobrot	96	Cobrot	
97	Wahid Umar P	L	P	Bimba	Bimba	97	Bimba	
98	Wahid Umar P	L		Tomas	Bimba	98	Bimba	
99	Wahid Umar P	L		Tomas	Cobrot	99	Cobrot	
100	Wahid Umar P	L		Rt 02/11	Bimba	100	Bimba	
101	Wahid Umar P	L		Rt 03/11	Bimba	101	Bimba	
102	Wahid Umar P	L		Tomas	Sidamulya	102	Sidamulya	
103	Wahid Umar P	L		Tomas	Bimba	103	Bimba	
104	Wahid Umar P	L		Peryandu	Bimba	104	Bimba	
105	Wahid Umar P	L	P	TOGA	Bimba	105	Bimba	
106	Wahid Umar P	L		Tomas	Tambakreja	106	Tambakreja	
107	Wahid Umar P	L		Tomas	Tambakreja	107	Tambakreja	
108	Wahid Umar P	L		TO Pem	Sidamulya	108	Sidamulya	
109	Wahid Umar P	L		TO Pem	Tambakreja	109	Tambakreja	
110	Wahid Umar P	L		TO Pem	Sidamulya	110	Sidamulya	
111	Wahid Umar P	L	P	Per yadu	Sidamulya	111	Sidamulya	
112	Wahid Umar P	L		Rt 02/08	Tambakreja	112	Tambakreja	
113	Wahid Umar P	L		Rw 06	Tambakreja	113	Tambakreja	
114	Wahid Umar P	L		TO Pem	Tambakreja	114	Tambakreja	
115	Wahid Umar P	L		Tomas	Tambakreja	115	Tambakreja	
116	Wahid Umar P	L		TO Pem	Tambakreja	116	Tambakreja	
117	Wahid Umar P	L		Tomas	Tambakreja	117	Tambakreja	
118	Wahid Umar P	L	P	Pick	Bimba	118	Bimba	
119	Wahid Umar P	L		Tomas	Bimba	119	Bimba	
120	Wahid Umar P	L		TOGA	Gocca	120	Gocca	
121	Wahid Umar P	L		Tomas	Bimba		Bimba	
122	Wahid Umar P	L		Tomas	Bimba		Bimba	



Sumber: RKPD Desa Binangun 2023

Dari gambar daftar hadir di atas, melibatkan semua elemen masyarakat desa akan tetapi terjadi sentralitas dimana keterlibatan kelompok perempuan hanya 20% terdiri dari PKK, Posyandu dan perangkat desa, tidak melibatkan kelompok tani perempuan, pemuda dan tokoh perempuan lainnya. Dibandingkan dengan kelompok laki-laki yang mencapai 80% kehadiran termasuk kepala desa sendiri yang mendominasi jalannya forum musrenbang tersebut. Hasil kebijakan perencanaan pembangunan desa yang di musyawarahkan bersama dipengaruhi oleh hasil pengambilan keputusan dari aktor politik pembangunan. Dalam lingkup pembangunan desa tetap ada aktor politik yang paling dominan dan pengaruhnya lebih besar dalam pengambilan keputusan. Seperti pengambilan keputusan dalam pembangunan di Desa Binangun yang cukup sentralitas mendominasi forum di setiap musyawarah desa, Aktor politik pembangunan tersebut adalah Kepala Desa dan ketua BPD Desa Binangun. Hal ini sesuai apa yang disampaikan oleh narasumber.

*“Aktor politik yang paling kuat itu dari kepala desa sendiri, yang pertama karena kepala desa sudah memiliki kepercayaan dari masyarakat dari hasil pemilihan umum dia menjabat sebagai kepala desa dan yang memilih adalah masyarakat, lalu yang kedua karena memiliki jabatan politik sehingga kewenangan penuh ada di kepala desa. Selain kepala desa aktor politik pembangunan yang kuat juga dari BPD, karena BPD juga memiliki kewenangan menyetujui maupun menolak untuk menandatangani hasil keputusan. Jadi antara kepala desa dan BPD itu harus sinkron” (Wawancara: Priono, 31 Mei 2023).*

Seperti yang telah disampaikan oleh narasumber diatas yang menjabat sebagai kepala dusun di salah satu wilayah Desa Binangun menyampaikan bahwa aktor politik pembangunan yang paling dominan dan berpengaruh dalam setiap pengambilan keputusan adalah Dari Kepala desa dan Ketua BPD Desa Binangun. Hal itu disebabkan karena memiliki kekuatan daya tarik kepercayaan dari masyarakat dan kewenangan jabatan politiknya. Terkadang seorang kepala desa dalam mengambil keputusan tidak sesuai yang telah disepakati, seperti yang disampaikan narasumber.

*“Karna dari jabatan politiknya, terkadang kepala desa dalam mengambil keputusan tidak sesuai yang telah disepakati, karena beliau lebih mementingkan mementingkan pelaksanaan pembangunan di wilayah dari basis suara pendukungnya. Hal itu menjadi sebuah kelemahan demokrasi, karena kembali lagi dalam politik ada kepentingan lain di dalamnya”.* (Wawancara: Priono, 31 Mei 2024).

Dari pernyataan narasumber diatas, bahwa Kepala Desa Binangun menggunakan kewenangan jabatan politik dalam pengambilan keputusan sangatlah sentralitas. Wilayah yang menjadi basis suara terbanyak pendukungnya adalah di wilayah dusunya dan wilayah balaidesa tepatnya di Dusun Sidamulya dan Cigebret. Sentralitas kepala desa dalam pengambilan keputusan dapat dibuktikan dari pelaksanaan pembangunan selama kepala desa menjabat, pembangunan lebih diutamakan diwilayah dusunya. Dalam hal tersebut sebagian masyarakat menganggap ini adalah hal yang sudah sewajarnya, akan tetapi dapat menimbulkan kecemburuan sosial di wilayah dusun lain. Berikut adalah gambar pembangunan jalan menuju area pemukiman kepala desa (Priono, 2024).

### **Gambar 7 Jalan Menuju Rumah Kepala Desa Binangun**



*Sumber : Hasil Observasi Peneliti, 2024*

## **B. Proses Pengambilan Keputusan dalam Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Pembangunan Infrastruktur**

Pengambilan keputusan merupakan sebuah proses memilih suatu tindakan yang tepat untuk mencapai suatu tujuan. Dalam konteks pembangunan desa, pengambilan keputusan merupakan sebuah proses untuk menentukan suatu kebijakan yang akan dilaksanakan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat desa. pengambilan keputusan haruslah berdasarkan kepentingan khalayak umum, maka dalam proses pengambilan keputusan harus tepat menyesuaikan situasi dan kondisi kebutuhan masyarakat. dalam lingkup pembangunan desa, proses pengambilan keputusan melibatkan berbagai partisipasi pemangku kepentingan baik dari pemerintah desa, masyarakat, organisasi masyarakat, tokoh masyarakat dan lainnya. Proses pengambilan keputusan yang efektif sangat penting dalam upaya pembangunan desa agar dapat memastikan pembangunan dilakukan secara optimal dan memberikan manfaat kepada seluruh masyarakat desa (Ardhita Yuliana Nugraheni, 2017).

Pada sub bab ini, peneliti menganalisis proses pengambilan keputusan dalam pembangunan infrastruktur di Desa Binangun dari segi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Proses pengambilan keputusan dalam perencanaan dikemas dalam bentuk kegiatan musdus/ murenbangdes dengan melibatkan partisipasi elemen masyarakat desa untuk membahas anggaran serta pelaksanaan pembangunan infrastruktur Desa Binangun. Sedangkan proses pengambilan keputusan dalam pelaksanaan pembangunan berupa hasil yang dicapai dari proses perencanaan baik yang terealisasi maupun tidak, apakah sesuai yang menjadi prioritas kebutuhan masyarakat Desa Binangun. proses pengambilan keputusan terakhir ialah evaluasi pembangunan yang telah dicapai dengan mengidentifikasi apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam pembangunan infrastruktur Desa Binangun (Adam Latif, dkk, 2019).

### **1. Proses Perencanaan**

Langkah awal dalam proses pengambilan keputusan dalam perencanaan pembangunan infrastruktur desa adalah dengan mengetahui terlebih dahulu masalah pokok, keinginan dan kebutuhan masyarakat dalam bidang infrastruktur. Untuk mengetahui permasalahan tersebut biasanya diperoleh

dalam bentuk pengumpulan aspirasi masyarakat. Kegiatan serap aspirasi ini merupakan sebuah proses atau tindakan untuk mengumpulkan, memahami, mengintegrasikan aspirasi, keinginan, kebutuhan serta harapan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan kebijakan. Kegiatan serap aspirasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan infrastruktur desa di kemas dalam kegiatan Musdus (Musyawarah dusun) dan Musrenbangdes (Musyawarah perencanaan pembangunan desa) (Alplanus M & Firman F, 2019).

Musdus merupakan bentuk kegiatan musyawarah pembangunan di tingkat dusun yang bertujuan untuk mengumpulkan aspirasi, usulan, gagasan dan pendapat dari warga dusun yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur yang ada di wilayah dusun tersebut sesuai kebutuhan masyarakat. Sedangkan musrenbangdes adalah kegiatan musyawarah tahunan tingkat desa yang diselenggarakan oleh pemerintah desa untuk merancang rencana pembangunan desa secara partisipatif, transparan dan akuntabel. Secara keseluruhan, keduanya saling berkaitan antara musdus sebagai forum serap aspirasi masyarakat pada tingkat bawah, yang kemudian di orientasikan pembahasan tersebut dalam musrenbangdes untuk memprioritaskan pembangunan desa secara menyeluruh. Kedua kegiatan tersebut juga untuk memetakan dan mengidentifikasi permasalahan utama yang dihadapi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur desa seperti; fasilitas transportasi, lingkungan, pendidikan dan kesehatan yang kurang memadai (Indah P.K. & Deby F.E, 2022).

Desa Binangun dalam melaksanakan proses perencanaan pembangunan infrastruktur, melibatkan partisipasi masyarakat desa untuk memberikan kontribusi penting dalam mengidentifikasi kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Dalam hal ini, masyarakat diberi kesempatan dalam mengambil keputusan menyerukan pendapatnya mengenai pembangunan infrastruktur yang sifatnya urgensi dan menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Proses perencanaan pembangunan infrastruktur Desa Binangun, dinahkodai oleh Kepala Desa dan BPD sebagai pemimpin pelaksana pembangunan desa, sehingga peranya sangat penting dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan (Adam Latif, dkk, 2019).

Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan melibatkan semua elemen masyarakat Desa Binangun seperti, Kepala Dusun, RT/RW, perangkat desa, LPPMD, PKK, kelompok pemuda, kelompok perempuan, kelompok tani, tokoh masyarakat. dan tokoh agama. Melalui aspirasi publik ini, kepala desa selaku pemimpin desa dapat mendapatkan berbagai macam kritik, saran dan masukan sebagai bahan alternatif pilihan dalam pengambilan keputusan dan memastikan bahwa perencanaan pembangunan mencerminkan kepentingan masyarakat. seperti yang disampaikan oleh narasumber:

*“Dalam melaksanakan kegiatan musdus maupun musrenbangdes, selalu melibatkan partisipasi masyarakat. kami memanggil kepala dusun, RT/RW, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, ibu-ibu PKK, Karantaruna, dan ormas lainnya”.* (Wawancara: Mardiyono, 31 Mei 2024)

*“Ketika sedang ada penyelenggaraan musdus atau musrenbangdes silahkan semua berpartisipasi memberikan usulan. Sehingga kita bisa menyepakati mana yang lebih penting untuk diprioritaskan dan didahulukan.”* (Wawancara: Toto Arifin, 2 Juni 2024)

Berdasarkan pernyataan narasumber diatas, menyampaikan bahwa dalam proses perencanaan pembangunan infrastruktur Desa Binangun melibatkan semua kalangan masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya. Keterlibatan kepala dusun sangat berperan penting sebagai keterwakilan wilayah dusun untuk mengkoordinasi dan membawa aspirasi masyarakat dusun untuk disampaikan. Ketika penyelenggaraan musrenbangdes, setiap dusun sudah ada skala prioritas pembangunan di dusunya masing-masing untuk di usulkan di desa. Sehingga sebelum pelaksanaan musrenbangdes, kepala dusun sudah melakukan musyawarah pada tingkat dusun dengan masyarakatnya terkait apa yang akan di jadikan Rancangan Kegiatan Pembangunan Desa (RKPD) Desa Binangun. Seperti yang disampaikan narasumber:

*“Sebagai kepala dusun yang pertama saya mengumpulkan partisipasi masyarakat dusun seperti RT/RW, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan tokoh agama untuk melakukan musyawarah pelaksanaan pembangunan apa yang akan diusulkan ke desa, kita buat*

*perencanaan untuk menentukan skala prioritas seperti pembangunan jalan dan apapun yang dibutuhkan masyarakat dusun”.* (Wawancara: Saminudin, 2 Juni 2024)

Keterlibatan RT/RW dalam proses perencanaan pembangunan juga memiliki peran yang cukup penting. Selain sebagai partisipan, mereka juga memberikan aspirasinya mengenai pembangunan infrastruktur seperti pembangunan jembatan, jalan dan tempat peribadatan. Menurutnya, pembangunan tersebut yang harus dipertimbangkan dan diprioritaskan karena sebagai akses untuk segala aktivitas warga Desa Binangun. Ketidakpuasan masyarakat mengenai pembangunan infrastruktur terkhusus pada infrastruktur jalan, karena keinginan masyarakat yang berekspetasi tinggi semua jalan halus dan rapi. Seperti yang disampaikan oleh narasumber:

*“Saya selalu dilibatkan dalam musyawarah pembangunan desa, disitu ya saya mengusulkan apa yang diinginkan sebagian besar masyarakat, seperti kemarin pembangunan jembatan, jalan dan perenovasian tempat peribadatan. Ya harapannya semua bisa direalisasikan. Terutama pembangunan jembatan sebagai akses penghubung area permukiman ke tempat pertanian. Karena ketika sudah musim penghujan akan susah dilewati”.*(Wawancara: Rusiman 25 Juni 2024)

Keterlibatan LPMD Desa Binangun memiliki peran penting dalam proses perencanaan pembangunan Desa. LPMD bertujuan untuk membantu pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat desa. LPMD sebagai wadah aspirasi masyarakat dan juga untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan dan kesejahteraan. LPMD berperan dalam mengidentifikasi kebutuhan dan menggali potensi desa. Dalam proses perencanaan pembangunan desa tentunya LPMD menyampaikan aspirasi yang menjadi kebutuhan umum masyarakat Desa Binangun dan untuk memastikan perencanaan tersebut mencerminkan keinginan dan kebutuhan masyarakat. seperti yang disampaikan ketua LPMD Desa Binangun sebagai narasumber berikut:

*“Tentunya selaku Ketua LPMD saya menyampaikan aspirasi yang diinginkan oleh masyarakat pada umumnya yaitu pada pembangunan*

*infrastruktur khususnya jalan untuk lebih baik lagi. Dan dalam perencanaan pembangunan untuk dimatangkan lagi persiapannya agar pembangunan di setiap tahunnya itu selalu ada peningkatan”.*  
(Wawancara: Suratno, 26 Juni 2024).

Proses perencanaan pembangunan desa juga melibatkan organisasi masyarakat, salah satunya yaitu PKK yang merupakan organisasi yang bergerak dalam bidang pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga. Fokus organisasi PKK berperan serta dalam pemberdayaan perempuan pada proses pembangunan keluarga dan masyarakat. Kegiatan PKK di Desa Binangun dilaksanakan secara aktif di setiap bulan termasuk kegiatan posyandu/posbindu juga dibawah naungan PKK. Oleh karena itu, dalam proses perencanaan pembangunan desa keterlibatan PKK mengusulkan fasilitas untuk memenuhi kebutuhan di setiap kegiatan PKK seperti gedung pertemuan, perabotan posyandu dan lain-lain. Seperti yang disampaikan oleh anggota PKK sebagai narasumber berikut:

*“Dalam kegiatan musyawarah desa seperti musrenbangdes, kita juga turut aktif mengusulkan pembangunan yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan PKK seperti pembangunan gedung pertemuan serta mengingat posyandu di bawah naungan PKK, jadi kita juga mengusulkan alat-alat prasarana perlengkapan posyandu”.*  
(Wawancara: Mumfaridah, 26 Juni 2024)

Dalam proses perencanaan pembangunan Desa Binangun juga melibatkan Karantaruna sebagai partisipan mewakili kelompok kepemudaan Desa Binangun. Karantaruna adalah organisasi kepemudaan yang bergerak dalam pengembangan generasi muda di tingkat desa. Peran karantaruna di Desa Binangun masih terkesan aktif hanya di kegiatan Agustusan dalam rangka memperingati HUT RI. Dalam memberikan usulan dan aspirannya tentu yang berhubungan dengan kegiatan yang selalu dilaksanakan, serta meminta fasilitas olahraga seperti lapangan dan perlengkapan olahraga lainnya terkhusus olahraga voli yang selalu digemari masyarakat Desa Binangun. seperti yang disampaikan narasumber:

*“Kalau karantaruna ya juga sering dilibatkan dalam musrenbangdes, akan tetapi program yang sering diusulkan yang berhubungan dengan*

*olahraga terutama voli. Selain itu karantaruna di Desa Binangun ini aktifnya ya pada saat perayaan HUT RI di bulan agustus buat kegiatan lomba-lomba”.*(Wawancara: Aan, 25 juni 2024).

Proses perencanaan pembangunan juga melibatkan semua elemen masyarakat Desa Binangun salah satunya yaitu tokoh masyarakat yang biasa terwakili oleh tokoh agama di desa. keterlibatannya dalam musyawarah pembangunan desa yaitu memberikan sebuah usulan pembangunan yang berkaitan dengan kemasyarakatan dan keagamaan. Terutama dalam hal pembangunan sarana prasaran fasilitas TPQ atau Madin mengingat anak-anak maupun untuk kalangan dewasa di Desa Binangun ini sudah banyak yang mengaji. Karena ketika fasilitas tempat sudah baik akan mempengaruhi proses belajar untuk lebih giat lagi. Seperti yang telah disampaikan oleh narasumber sebagai keterwakilan tokoh agama berikut:

*“Kita sering dilibatkan dalam musyawarah pembangun desa, disitu kami berperan sebagai tokoh keagamaan ya mengusulkan untuk pembangunan sarana beribadah dan pendidikan keagamaan seperti TPQ dan Madin. Selain itu kami juga mengharapkan anggaran untuk sarana pendidikan keagamaan untuk perlu ditingkatkan untuk bersama-sama memajukan generasi penerus yang terdidik”.*(Wawancara: Awal Hanifan, 26 Juni 2024).

Keterlibatan kelompok tani dalam proses perencanaan pembangunan desa juga sangat penting, mengingat mayoritas warga masyarakat Desa Binangun adalah petani. Selain itu kelompok tani sudah memiliki pemahaman yang mendalam tentang kondisi pertanian serta apa yang menjadi kebutuhan petani. Dalam proses perencanaan pembangunan desa, kelompok tani selalu mengusulkan aspirasinya tentang benih pertanian serta akses irigasi untuk mengaliri sawah dan perkebunan. Selain itu keterwakilan kelompok tani di Desa Binangun mengusulkan peningkatan pembangunan jalan usaha tani, sehingga akan mempermudah mobilitas transportasi petani dalam aktivitas pertanian baik dalam mengolah maupun memperdagangkan hasil taninya. Seperti yang disampaikan narasumber dari keterwakilan kelompok tani Desa binangun berikut:

*“Saya sebagai keterwakilan kelompok tani Desa Binangun ya sering dilibatkan dalam musrenbangdes, di situ ya sering mengusulkan masalah benih pertanian dan juga pembangunan saluran irigasi untuk perairan. Untuk jalan usaha tani juga pembangunannya perlu ditingkatkan karena dapat mempermudah petani dalam pengangkutan hasil taninya”.* (Wawancara: Nasikun, 26 Juni 2024)

Kelompok perempuan Desa Binangun juga berperan aktif dalam proses perencanaan pembangunan desa dalam musrebangdes. Keterlibatannya dalam mewakili kaum wanita mencerminkan kesetaraan gender di Desa Binangun. Aspirasi yang sering disampaikan dalam proses perencanaan pembangunan selalu berkaitan dengan aktivitas kegiatan perempuan dari kalangan remaja dewasa dan ibu-ibu seperti kegiatan lomba voli, senam dan pelatihan masak yang biasanya di kolaborasikan dengan PKK. Selain itu, pembangunan jalan juga sangat diharapkan oleh kelompok perempuan karena perempuan juga banyak yang berdagang dan bekerja sebagai petani sehingga akan sangat membantu pada akses transportasi. Seperti yang disampaikan oleh narasumber selaku keterwakilan kelompok perempuan Desa Binangun sebagai berikut:

*“Ya sebagai keterwakilan perempuan saya sering dilibatkan dalam musyawarah pembangunan desa. disitu kita mengusulkan untuk penyelenggaraan sarana kegiatan rutin ibu-ibu dan kelompok perempuan lainnya seperti lomba voli, senam dan pelatihan masak. Selain itu yang kita harapkan juga terkait pembangunan jalan, karna dapat mempermudah aktivitas masyarakat khususnya kelompok perempuan”.* (Wawancara: Ismiyati. 26 Juni 2024)

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam proses perencanaan pembangunan Desa Binangun melibatkan semua elemen masyarakat. keterlibatan partisipasi masyarakat sangat membantu pemerintah desa dalam mengidentifikasi masalah dan untuk mengambil sebuah keputusan yang sesuai aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Kontribusi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan desa menjadi suatu elemen kunci untuk meningkatkan upaya pembangunan desa khususnya pada bidang infrastruktur yang sering dipandang oleh masyarakat desa binangun. Adanya partisipasi masyarakat dapat meningkatkan transparansi

proses perencanaan pembangunan dan memastikan program kerja yang diusulkan mencerminkan prioritas kebutuhan masyarakat Desa Binangun. Partisipasi masyarakat Desa Binangun dapat dibuktikan dengan dokumentasi kegiatan musrenbang sebagai berikut:

### **Gambar 8 Kegiatan Musrenbang Desa Binangun**



*Sumber: Kantor Desa Binangun, 2024*

Tujuan dari kegiatan musrenbang Desa Binangun ialah untuk mengidentifikasi dan menentukan prioritas pembangunan Desa Binangun yang dijadikan RKPD Desa Binangun. Pada kegiatan tersebut merupakan sebuah langkah pengambilan keputusan dalam proses perencanaan pembangunan dengan memilih alternatif terbaik yang menjadi prioritas pembangunan. Pada tahap ini aktor politik pembangunan desa sebagai pengambil keputusan menjadi sosok penentu dan berpengaruh dalam keputusan yang disepakati. Dalam penentuan skala prioritas dilakukan pertimbangan dari berbagai aspirasi masyarakat tiap dusun, keterwakilan organisasi dan kelompok. Pengambilan keputusan yang diambil juga mengacu pada visi misi Desa Binangun dan RPJMD Desa Binangun 2019-2025. Seperti yang disampaikan oleh narasumber:

*“Penentuan skala prioritas pembangunan infrastruktur, dilakukan melalui musyawarah. Dari setiap dusun membawa berkas aspirasi hasil musdus, yang akan dirapatkan dalam musrenbangdes untuk dilakukan perbandingan program kerja pembangunan infrastruktur di setiap dusun dengan mengacu pada visi-misi yang akan diorientasikan menyesuaikan rencana pembangunan yang ada di*

*RPJMD 2019-2025 serta memperhatikan amunisi anggaran desa”.*

(Wawancara: Mardiyono, 31 Mei 2024)

Dari pernyataan narasumber diatas, dengan segala pertimbangan dari semua elemen partisipasi mayarakat Desa Binangun serta dengan memperhatikan tujuan pembangunan desa yang tercantum dalam Visi misi dan RPJMD Desa Binangun, maka RKPD 2023 pada bidang pembangunan infrastruktur Desa Binangun adalah sebagai berikut:

**Tabel 9 Rencana Kerja Pembangunan Infrastruktur Desa Binangun Tahun 2023**

No.	Rencana Kegiatan	Lokasi Dusun	Volume
<b>Pembangunan Jalan Desa Binangun</b>			
1.	Jalan igir jaran	Cigebret	742x3,5 m
2.	Jalan igir gadung	Sidamulya	1417x5 m
3.	Jalan mangga	Sidamulya	577x3,5 m
4.	Jalan bringin	Sidamulya	794x4 m
5.	Jalan citatah	Sidamulya	642x3,5 m
6.	Jalan winong	Tambakreja	700x4 m
7.	Jalan panembahan	Tambakreja	170x3 m
8.	Jalan makam	Tambakreja	255x3 m
9.	Jalan santegali	Tambakreja	2014x4,5 m
10.	Jalan pucung	Tambakreja	295x2,5 m
11.	Jalan masjid al-mutaqin	Bendagede	270x4 m
12.	Jalan mushola	Bendagede	340x3 m
13.	Jalan nusa indah	Bendagede	1000x4 m

No.	Rencana Kegiatan	Lokasi Dusun	Volume
14.	Jalan pasar dusun	Bendagede	800x3 m
15.	Jalan apur barat	Binangun Baru	2039x3,5 m
16.	Jalan masjid al-barokah	Binangun Baru	524x4 m
17.	Jalan glodog	Gocea	600x4 m
18.	Jalan bandeng	Gocea	700x4 m
19.	Jalan tanggul	Gocea	2500x3,5 m
20.	Jalan batas desa	Cigebret	800x4 m
21.	Jalan masjid baitul mukmin	Cigebret	300x4 m
22.	Jalan gapukan warak	Tambakreja	120x3 m
23.	Jalan k. muri	Tambakreja	175x3 m
24.	Jalan winong selatan	Tambakreja	152x3,5 m
25.	Jalan al-huda	Tambakreja	95x2,5 m
26.	Jalan wringin	Tambaksari	150x2,5 m
27.	Jalan k. syakirun	Bendagede	180x3 m
28.	Jalan alur buntu	Binangun Baru	425x3 m
29.	Jalan batas binbar-grugu	Binangun Baru	2.745x4 m
30.	Jalan apur timur	Gocea	2.500x4 m
31.	Jalan nila	Gocea	600x2,5 m
32.	Jalan ladot	Gocea	250x3 m
33.	Jalan lapang	Sidamulya	130x3 m

No.	Rencana Kegiatan	Lokasi Dusun	Volume
34.	Jalan igir winong	Sidamulya	300x3 m
<b>Pembangunan Jalan Usaha Tani</b>			
1.	Jalan Kalijaga	Bendagede	450x4 m
2.	Jl. Usaha Tani	Sidamulya	2130x1,5 m
3.	Jl. Usaha Tani	Tambakreja	1.861x1,5 m
4.	Rabat Beton Jl. Remang	Gocea	629x1,5 m
5.	Jl. Usaha Tani	Cigebret	724x1,5 m
<b>Pembangunan Jembatan Milik Desa</b>			
1.	Pembangunan jembatan gantung	Cigebret	1 Unit
<b>Pembangunan Prasarana Gedung</b>			
1.	Rehabilitas mushola desa	Binangun	1 Unit
2.	Gedung sekertariat TP PKK	Binangun	1 Unit
3.	Gedung BPD	Binangun	1 Unit
4.	Gedung balai pertemuan dusun	Binangun baru	1 Unit
5.	Gedung BUM	Binangun	1 Unit
6.	Gedung LPMD	Binangun	1 Unit
7.	Gedung Posyandu/Polindes	Binangun	1 Unit
<b>Pembangunan Pemakaman Desa</b>			
1.	Pendopo pemakaman	Binangun	1 Unit
2.	Pendopo panembahan	Binangun	1 Unit

No.	Rencana Kegiatan	Lokasi Dusun	Volume
3.	Cungkub panembahan	Binangun	6 Unit
<b>Pembangunan Embung Desa</b>			
1.	Bendungan sempana	Binangun	1 Paket
2.	Embung telar sirtu	Binangun	1 Paket
3.	Embung panembahan	Binangun	1 Paket
<b>Pembangunan Monumen/Gapura Desa</b>			
1.	Monumen pahlawan	Binangun	1 Paket
2.	Gapura batas desa	Binangun	4 Paket
3.	Gapura jalan desa	Binangun	1 Paket
4.	Tugu batas dusun	Binangun	1 Paket
5.	Tugu batas lingkungan RT	Binangun	1 Paket
<b>Pembangunan Talud/Turap Desa</b>			
1.	Brojong penahan badan jalan	Tambakreja	30 m
2.	Talud penahan tanah lapang desa	Cigebret	132x0,3x2 m

*Sumber: RKPD Desa Binangun 2023*

Anggaran desa adalah salah satu unsur yang sangat penting untuk merealisasikan rencana pembangunan infrastruktur Desa Binangun. Pengelolaan anggaran program kerja pembangunan desa di musyawarahkan bersama dalam musrenbang yang disepakati oleh BPD dan ditetapkan oleh Kepala Desa melalui peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes). Perumusan anggaran tersebut dilakukan secara transparansi dan partisipatif untuk memastikan bahwa anggaran yang direncanakan memenuhi kebutuhan serta aspirasi masyarakat untuk mengawasi tindak kecurangan. Anggaran APBDes bukan hanya digunakan untuk pembangunan

infrastruktur desa akan tetapi juga kegiatan lainnya. Berikut adalah anggaran pendapatan Desa Binangun tahun 2023 (RKPDes Binangun, 2023).

**Tabel 10 Anggaran Pendapatan Desa Binangun Tahun 2023**

No.	Uraian	Nominal
	<b>Pendapatan Asli Desa (PAD)</b>	<b>Rp709.347.968,00</b>
1.	Pengelolaan tanah kas desa	Rp676.750.000,00
2.	Pasar desa	Rp30.397.968,00
3.	Sewa gedung olahraga desa	Rp2.200.000,00
	<b>Pendapatan Tranfer</b>	<b>Rp3.039.392.000,00</b>
1.	Dana Desa (DDS)	Rp1.725.098.000,00
2.	Bagi hasil pajak	Rp78.569.000,00
3.	Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp645.725.000,00
4.	Bantuan keuangan provinsi	Rp190.000.000,00
5.	Bantuan keuangan kabupaten	Rp400.000.000,00
	<b>Pendapatan Lain-lain</b>	<b>Rp3.400.000,00</b>
1.	Bantuan dari perusahaan yang berlokasi di desa	Rp1.000.000,00
2.	Bunga bank	Rp2.400.000,00
	<b>Total</b>	<b>Rp3.752.139.968,00</b>

*Sumber: APBD Desa Binangun 2023*

Berdasarkan tabel diatas, menjelaskan bahwa total pendapatan anggaran Desa Binangun tahun 2023 adalah Rp3.752.139.968,00 yang terdiri dari Pendapatan Asli Desa (PAD), Pendapatan transfer dan Pendapatan lain-lain. Anggaran belanja tersebut untuk merealisasikan rencana kerja Desa Binangun selama satu tahun. 39,5% presentase Anggaran dialokasikan untuk

merealisasikan program kerja pelaksanaan pembangunan Desa Binangun sebesar Rp1.482.515.000,00. Anggaran untuk bidang pemerintahan sebesar 45,7% dengan nominal Rp1.715.292.168,00 menjadi kebutuhan anggaran yang paling besar dibandingkan bidang lainnya. Sedangkan 2,8% dari anggaran untuk bidang pembinaan masyarakat sebesar Rp106.832.800,00 menjadi alokasi anggaran yang paling kecil. 3,4% anggaran dialokasikan untuk bidang pemberdayaan dengan nominal Rp131.000.000,00. Dan untuk bidang tak terduga sebesar 8,2% dengan nominal Rp311.500.000,00 (APBD Desa Binangun, 2023)

## **2. Proses Pelaksanaan**

Setelah selesai pada proses pengambilan keputusan pada tahap perencanaan pembangunan infrastruktur, selanjutnya adalah proses pelaksanaan pembangunan infrastruktur Desa Binangun. Proses pengambilan keputusan dalam pelaksanaan pembangunan merupakan proses yang sangat penting karena dalam pelaksanaannya dapat mempengaruhi hasil yang pembangunan yang dikerjakan. Dengan melihat komposisi apa saja yang perlu disediakan dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur. Mengingat kondisi prasarana infrastruktur di Desa Binangun yang masih cukup memprihatinkan khususnya pada infrastruktur jalan yang sering dikeluhkan masyarakat dan sering di usulkan pada kegiatan musrenbang (Indah P.K. & Deby F.E, 2022). Berikut kondisi jalan Desa Binangun yang masih rusak:

### **Gambar 9 Jalan Desa Binangun Yang Masih Rusak**



*Sumber: Hasil Observasi Peneliti 2024*

Jalan merupakan salah satu fasilitas prasarana infrastruktur yang menjadi akses utama yang sering dilewati masyarakat Desa Binangun. Akses transportasi ini sangat menunjang aktivitas masyarakat dalam kehidupan sehari-hari baik dalam hal pendidikan, perekonomian dan aktivitas sosial. Akan sangat menjadi sebuah hambatan ketika kondisi jalan tersebut masih rusak, berlubang dan terisi genang air untuk dilewati. Melihat kondisi tersebut, sudah menjadi tugas pemerintah desa dalam mensejahterakan masyarakatnya melalui perbaikan infrastruktur jalan Desa Binangun. Selain pembangunan jalan desa, pemerintah Desa Binangun juga memperhatikan pada jalan lingkungan Desa dan jalan usaha sesuai aspirasi yang tercantum di RKPD. Salah satu pembangunan infrastruktur yang menjadi prioritas utama dan menggunakan anggaran besar Desa Binangun di tahun 2023 adalah pembangunan jembatan gantung yang memiliki nilai urgensi paling tinggi. Berikut pelaksanaan pembangunan infrastruktur Desa Binangun tahun 2023 (Lalu Moh. Nazar F, 2017).

### Gambar 10 Pengecoran Jalan Lingkungan



Sumber: Hasil Observasi Peneliti, 2024

*“Adanya kegiatan pembangunan jalan lingkungan tersebut dapat mempermudah aktivitas sehari-hari. Akses transportasi tersebut sangat penting karena sering dilalui masyarakat dalam kebutuhan sosial, berdagang dan lainnya. Pngecoran jalan tersebut dapat menjadikan jalan menjadi halus dan rapi sehingga mudah dilalui”.* (Wawancara: Suratno, 26 Juni 2024).

### Gambar 11 Pengaspalan Jalan Usaha Tani



Sumber: Hasil Observasi Peneliti, 202

*“Adanya pengaspalan jalan usaha tani tersebut akan sangat membantu para petani Desa binangun mengingat mayoritas penduduk bekerja sebagai petani. Pembangunan jalan tersebut akan mempermudah*

*petani dalam membawa hasil panenanya untuk di perdagangkan”.*  
(Wawancara: Nasikun, 26 Juni 2024)

### **Gambar 12 Pembangunan Jembatan Gantung**



*Sumber: Hasil Observasi Peneliti, 2024*

*“Pembangunan jembatan gantung yang terletak di dusun cigebret ini sangat dibutuhkan masyarakat desa binangun karena menjadi salah satu akses penghubung area pemukiman menuju area sawah dan perkebunan. Wacana pembangunan jembatan ini sudah dari 2019 yang lalu, tetapi karena ada beberapa kendala sehingga baru bisa terealisasikan di tahun 2023 dengan anggaran kurang lebih 350 juta. Karena ketika tidak segera ditangani akan menjadi dampak kesulitan aktivitas masyarakat Desa Binangun”.* (Wawancara: Saminudin, 2 Juni 2024)

Bapak Mardiyono selaku Kepala Desa Binangun sebagai salah satu aktor politik pembangunan yang paling berpengaruh dalam mengambil sebuah keputusan. Pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Binangun menggunakan pekerja borongan dari luar desa. Dalam hal ini, beliau bermaksud pelaksanaan pembangunan infrastruktur tersebut dapat maksimal dan bertahan lama karena di kelola oleh pekerja yang sesuai profesinya. Pengambilan keputusan ini dianggap sepihak oleh beberapa pandangan

masyarakat karena kurang memanfaatkan pekerja swadaya masyarakat Desa Binangun seperti yang disampaikan narasumber:

*“Untuk pelaksanaan pembangunan desa sudah diatur oleh kepala desa dengan memperkerjakan pemborong, sehingga kita sebagai warga masyarakat ya hanya tinggal melihat saja. Saya sebagai ketua RT setempat, hanya ditugaskan menjadi cekermen artinya hanya mengawasi pembangunan dari awal sampai selesai”.*(Wawancara: Rusiman, 25 Juni 2024)

Pada pelaksanaan pembangunan BPD Desa Binangun berperan sebagai pengawas pelaksanaan pembangunan untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan apa yang direncanakan. Pada dasarnya swadaya masyarakat di Desa Binangun terbilang aktif karena kehidupan sosial di lingkup desa yang mengutamakan sifat saling tolong menolong dan bekerja sama. Informasi narasumber dari berbagai kalangan masyarakat menyesuaikan peranya dalam upaya melaksanakan swadaya masyarakat. seperti yang disampaikan narasumber:

*“Swadaya masyarakat di Desa Binangun cukup aktif mas, tetapi lebih kepada gotong royong di lingkup dusun masing-masing. Ya ketika ada kerja bakti atau kegiatan apa ya kita selalu bareng-bareng bekerja sama menyelesaikanya. Biasanya untuk yang lelaki yang bekerja fisik dan yang perempuan membantu dalam hal konsumsi jadi ya saling melengkapi”.*(Wawancara: Ismiyati, 26 Juni 2024)

*“Upaya meningkatkan swadaya masyarakat Desa Binangun selalu dilakukan agar menjadi suatu budaya gotong royong yang menjadi kebiasaan yang baik. Walaupun pembangunan yang menggunakan dana desa tetap ada tetapi harus selalu ada swadaya dari masyarakat”.* (Wawancara: Suratno, 26 Juni 2024)

Dari beberapa informasi diatas, dapat disimpulkan bahwa secara prosedural pelaksanaan pembangunan infrastruktur tersebut sudah mengedepankan kebutuhan masyarakat. Akan tetapi, dari kepala desa sendiri kurang memberdayakan pekerja swadaya masyarakat dan beliau lebih memilih pekerja borongan dari luar yang sesuai profesi pekerjaannya. Dalam upaya merealisasikan program kerja pembangunan infrastruktur dilakukan secara

bertahap disetiap tahunnya dan mengupayakan pemerataan pembangunan di setiap dusun. Keterbatasan anggaran menjadi salah satu hambatan dalam merealisasikan pelaksanaan pembangunan desa, sehingga tidak bisa merealisasikan semua pembangunan yang tercantup di RKPD Desa Binangun. berikut adalah data realisasi program rencana kerja pembangunan infrastruktur yang telah terealisasi di tahun 2023 (RKPDes Binangun, 2023).

**Tabel 11 Realisasi Pembangunan Prasarana Infrastruktur Desa Binangun Tahun 2023**

No	Kegiatan	Nominal	Realisasi
1.	Rabat beton jalan igir gedung	Rp119.250.000,00	✓
2.	Pengaspalan jalan bringin	Rp60.000.000,00	✓
3.	Rehabilitasi jalan Binangun baru	Rp50.000.000,00	✓
4.	Rehabilitasi jalan aspal gocea	Rp50.000.000,00	✓
5.	Rabat beton jalan bringin	Rp188.036.800,00	✓
6.	Rabat beton jalan cempaka cigebrat	Rp51.958.880,00	✓
7.	Rabat beton jalan lingkungan tambakreja	Rp29.905.000,00	✓
8.	Rabat beton jalan glodog	Rp90.580.000,00	✓
9.	Pengaspalan jalan mangga	Rp52.200.000,00	✓
10.	Rabat beton jalan tambaksari	Rp14.500.000,00	✓
11.	Pembangunan talud RT 1/9	Rp4.140.000,00	✓
12.	Pembangunan talud dan rabat beton Rt 4/7	Rp68.712.000,00	✓
13.	Rabat beton jalan lingkungan RT 3/10	Rp18.255.000,00	✓
14.	Rabat beton jalan lingkungan RT 2/10	Rp18.890.000,00	✓
15.	Pengaspalan jalan usaha tani	Rp10.000.000,00	✓
16.	Pembangunan jembatan gantung	Rp350.000.000,00	✓
17.	Pembangunan makam pahlawan	Rp10.000.000,00	✓

No	Kegiatan	Nominal	Realisasi
18.	Pembangunan rehabilitasi prasarana posyandu	Rp18.000.000,00	✓
19.	Pembangunan pos kesehatan (polindes)	Rp47.942.000,00	✓
<b>TOTAL</b>		<b>Rp1.252.349.680,00</b>	

*Sumber: ABDES, 2024*

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa ditahun 2023 hanya bisa menyelesaikan sekitar 30% dari total keseluruhan program kerja pembangunan yang direncanakan. Penyebab utama sulitnya merealisasikan program kerja pelaksanaan pembangunan infrastruktur tersebut adalah keterbatasan anggaran. Dapat dilihat realisasi 30% saja menggunakan biaya Rp1.252.349.680,00 dari total anggaran untuk bidang pembangunan desa sebesar Rp1.482.515.000,00 dan menyisakan Rp230.165.320,00 yang dialokasikan untuk dana pelengkap dalam bidang pelaksanaan pembangunan desa (APBD Desa Binangun, 2023).

### 3. Proses Evaluasi

Proses pengambilan keputusan dalam tahap evaluasi ini dilaksanakan setelah perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa Binangun sudah terealisasi. Dalam pembangunan desa, evaluasi menjadi suatu proses yang penting untuk mengukur/menilai kemajuan dan keberhasilan kinerja pembangunan di tingkat desa. Evaluasi merupakan suatu proses yang sistematis dalam mengumpulkan serta menganalisis informasi untuk menilai efektivitas, efisiensi, relevansi, dampak dari program kerja, kebijakan maupaun kegiatan. Tujuan utama proses pengambilan keputusan dalam tahap ialah untuk dapat memahami sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan sudah tercapai, mengidentifikasi peluang dan hambatan, serta memberikan dasar yang kuat untuk pengambilan keputusan yang lebih tepat sebagai perbaikan agar kedepanya bisa lebih baik (Briliant Nauval H, 2022).

Dalam proses pengambilan keputusan pada tahap evaluasi pembangunan pada pelaksanaanya melibatkan masyarakat dari berbagai elemen seperti proses

perencanaan pembangunan untuk memperoleh data yang akurat sehingga dapat memastikan keputusan yang diambil tepat untuk proses kedepannya. Dengan adanya proses evaluasi ini, membuat pemerintah dan masyarakat Desa Binangun dapat saling bekerja sama dalam meningkatkan kualitas dan kemajuan pembangunan infrastruktur di Desa Binangun. Kegiatan evaluasi ini biasanya di kemas dengan kegiatan musyawarah desa seperti halnya pada proses perencanaan pembangunan. Kontribusi dan partisipasi masyarakat dalam forum tersebut menyuarakan aspirasi dan pendapatnya mengenai tingkat keberhasilan pembangunan infrastruktur yang telah dijalankan serta memberikan kritikan, saran dan masukan agar pembangunan selanjutnya bisa dikemas lebih baik lagi (Miftahuljanah & Budi Setiawati, 2023).

*“Dalam forum evaluasi ini diharapkan untuk lebih maksimal lagi dalam kegiatan musrenbang terkhusus untuk pembangunan tempat sarana peribadahan dan pembelajaran keagamaan untuk bisa diprioritaskan. Yang kedua dalam pelaksanaannya juga perlu untuk meningkatkan partisipasi masyarakat desa guna memberdayakan swadaya dan perkerja dari masyarakat Desa Binangun sendiri”.*(Wawancara: Awal Hanifan, 26 Juni 2024)

Dari pernyataan yang disampaikan narasumber diatas memberikan sebuah masukan sebagai evaluasi untuk kedepannya pada perencanaan pembangunan desa untuk lebih dimaksimalkan. Berikutnya untuk lebih memperhatikan sarana prasarana pada tempat peribadahan dan pembelajaran seperti mushola, TPQ dan madin. Kritikan yang kedua yaitu mengenai kepala desa yang memperkerjakan pekerja borongan dari luar desa untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur desa yang dirasa kurang dalam memanfaatkan partisipasi dan swadaya tenaga kerja desa. Karena jika menggunakan tenaga kerja masyarakat asli Desa Binangun itu sendiri, akan membuka peluang kerja dan dapat meningkatkan kualitas swadaya masyarakat untuk saling membantu dan bekerja sama (Hanifan, 2024).

*“Ya untuk kedepannya di setiap kegiatan musrenbangdes untuk lebih diperhatikan lagi dalam membuat skala prioritas terkhusus dalam bidang pertanian desa. ya memang semua usulan sudah disampaikan*

*dan sudah diterima walaupun tidak mesti direalisasikan karna melihat anggaran juga”.*(Wawancara: Nasikun, 26 Juni 2024)

Dari pernyataan yang disampaikan oleh naasumber diatas memberikan kritikan dan juga saran sebagai evaluasi pembangunan infrastruktur di Desa Binangun. Bahwasanya, dalam menentukan skala prioritas pembangunan desa dalam forum perencanaan pembangunan seperti musrenbang agar lebih diperhatikan dan lebih teliti lagi. Karena dari pembangunan yang telah dilaksanakan, kurang memperhatikan dalam bidang pertanian yang pada dasarnya petani adalah pekerjaan mayoritas penduduk Desa Binangun. Pada hal ini, dari kelompok pertanian juga menginginkan pembangunan saluran irigasi yang menjadi hambatan petani ketika musim kemarau melanda. Dari semua yang telah diusulkan memang di dalam RKPD dicantumkan akan tetapi tidak semua bisa direalisasikan karena anggaran (Nasikun, 2024).

*“Saya kira untuk aturan dan anggaran pembangunan sudah dikomposisikan dengan baik, namun perlu adanya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar lebih terbuka sehingga tidak menimbulkan rasa ketidakpuasan dalam pembangunan infrasrtuktur desa karena pembangunan yang dilakukan secara bertahap”.*  
(Wawancara: Ismiyati, 26 Juni 2024)

Dari pernyataan yang telah disampaikan oleh narasumber diatas, bahwasanya perlu adanya sarana untuk dapat mensosialisasikan dan mengedukasi kepada masyarakat terkait pembangunan Desa Binangun. mengingat media sosial sudah sangat marak di semua kalangan masyarakat, oleh karena itu dirasa perlu kepada pemerintah Desa Binangun untuk mengaktifkan media sosial Desa Binangun dan untuk aktif kembali dalam mengelola website desa. Dari apa yang telah disampaikan menjadi sebuah evaluasi bagi pembangunan infrastruktur desa yang dilaksanakan secara bertahap menyesuaikan aturan dan anggaran yang ada. Sehingga dapat mengatasi ketidaksabaran masyarakat terkait pembangunan yang dilaksanakan (Ismiyati, 2024).

Dari beberapa pertanyaan diatas, mengenai evaluasi ini perlu dilaksanakan untuk mengetahui faktor kelebihan dan kekurangan dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur Desa Binangun. Dari berbagai

pendapat, saran masukan dan kritikan yang telah disampaikan oleh masyarakat memberikan sebuah pandangan dan pengalaman kepada pemerintah desa yang nantinya akan menyusun kembali rencana pembangunan yang lebih efektif sesuai kebutuhan masyarakat. Langkah selanjutnya pemerintah desa akan menindaklanjuti semua saran dan masukan tersebut untuk dianalisis secara mendalam guna memperoleh pengambilan keputusan yang tepat untuk kedepannya.

Dapat disimpulkan yang menjadi faktor pendukung dalam pembangunan infrastruktur Desa Binangun adalah pada kontribusi masyarakat aktif berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan serta mendapat dukungan penuh dalam upaya membangun desa. Sedangkan yang menjadi faktor penghambatnya adalah nominal anggaran yang masih terbatas untuk merealisasikan semua aspirasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur. Proses evaluasi ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat serta pemerintah desa pentingnya kerja sama dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Proses perbaikan dari hasil evaluasi akan dibahas dalam forum musyawarah pembangunan desa selanjutnya untuk merancang program kerja setahun berikutnya dengan melibatkan partisipasi semua elemen masyarakat desa untuk menciptakan kebijakan pembangunan desa yang dapat mencapai kesejahteraan masyarakat Desa Binangun (Miftahuljanah & Budi Setiawati, 2023).

### **C. Hasil Analisis Proses Pengambilan Keputusan**

Proses pengambilan keputusan dalam pembangunan infrastruktur di Desa Binangun seperti pembahasan diatas sebelumnya, dapat ditarik sebuah kesimpulan dari analisis peneliti, bahwasanya keterlibatan aktor politik pembangunan yang terdiri dari Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, LPMD, Kepala Dusun, Ketua RT/RW, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Kelompok Perempuan, Kelompok Tani, terkesan seperti *ceremonial* dari prosedural pengambilan keputusan. Karena dari beberapa aktor politik yang berpartisipasi dalam proses pembangunan desa, yang memiliki power paling dominan dalam mengambil keputusan adalah dari kepala desa secara rasional memaksimalkan pengambilan keputusannya. Hal ini dianggap memberikan keputusan yang sepihak dan hanya menguntungkan salah satu dusun yang menjadi basis pendukung dari setiap keputusan kepala desa.

Proses pembangunan infrastruktur di Desa Binangun melalui tahapan proses dari tingkat bawah dalam musyawarah dusun (musdus). Tahap selanjutnya ditindaklanjuti dalam proses pengambilan keputusan pembangunan infrastruktur yang disepakati dalam musyawarah pembangunan desa (musrenbangdes). Proses pengambilan keputusan tersebut terdiri dari beberapa tahapan pembangunan desa melalui tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. proses pengambilan keputusan pembangunan infrastruktur melalui tahap perencanaan yang dimulai dari bawah melalui musdus dan dimusyawarahkan kembali perencanaan tersebut melalui musrenbangdes untuk menghasilkan keputusan bersama. Kemudian pada tahap pelaksanaan, pengambilan keputusan diambil untuk merealisasikan program kerja yang telah direncanakan. Tahap terakhir proses pengambilan keputusan dalam pembangunan adalah evaluasi sebagai tolak ukur menilai kinerja pemerintah desa untuk menganalisis yang menjadi faktor pendukung dan penghambat proses pembangunan.

Dilihat dari proses tahapannya, secara prosedural dalam mengambil sebuah keputusan pembangunan infrastruktur, merupakan suatu ciri dari model pengambilan keputusan secara rasional. Model rasional merupakan pendekatan yang sistematis dan logis dengan suatu asumsi bahwa pengambilan keputusan dilihat secara rasional dan logika dari pengambil keputusan untuk memperoleh tujuan yang akan dicapai. Untuk lebih lanjutnya mengenai model pengambilan keputusan yang digunakan dalam pembangunan infrastruktur Desa Binangun dan dampak yang diperoleh dari model tersebut bagi pembangunan dan masyarakat, akan dibahas dalam bab selanjutnya.

## BAB V

### MODEL PENGAMBILAN KEPUTUSAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA BINANGUN

#### A. Model Pengambilan Keputusan yang Digunakan

Model pengambilan keputusan merupakan sebuah pendekatan yang sistematis atau suatu susunan yang berguna untuk menentukan sebuah pilihan dari berbagai alternatif. Model pengambilan keputusan ini dapat membantu mengidentifikasi sebuah masalah, mengevaluasi informasi, mempertimbangkan opsi dan berdasarkan kriteria tertentu, dapat memilih suatu solusi yang terbaik dalam mengambil keputusan. Manfaat menggunakan model pengambilan keputusan ini agar proses menjadi terstruktur dan terarah, sehingga mengurangi rasa ketidakpastian serta meningkatkan kualitas pengambilan keputusan (Rizky Dermawan, 2022).

Secara umum, model pengambilan keputusan yang digunakan di Desa Binangun dalam pembangunan infrastruktur, menerapkan model pengambilan keputusan menurut pandangan rasionalitas. Model pengambilan keputusan ini sesuai teori yang digunakan peneliti dalam menerapkan teori pengambilan keputusan model rasionalitas menurut E.F. Harrison (1999). Dalam model rasionalitas, memperlihatkan sejumlah langkah yang dilakukan pengambil keputusan dalam menentukan pilihan alternatif solusi dari sebuah hasil keputusan yang akan diambil. Menurut (E.F. Harrison) terdapat enam langkah dalam model rasional pengambilan keputusan. Komponen langkah tersebut yaitu; *Define the problem* (definisi masalah), *identify the decision criteria* (identifikasi kriteria keputusan), *allocate weights to the criteria* (alokasikan bobot pada kriteria), *develop the alternatives* (kembangkan alternatifnya), *evaluate the alternatives* (evaluasi alternatif), *select the best alternative* (pilih alternatif terbaik). Selanjutnya akan membahas penerapan keenam langkah model pengambilan keputusan tersebut dalam pembangunan infrastruktur di Desa Binangun( (Harrison. E. F, 1999).

#### 1. *Define The Problem* (Definisi Masalah)

Langkah awal dalam model pengambilan keputusan menurut pandangan rasionalitas ialah dengan mendefinisikan sebuah masalah. Masalah merupakan kesenjangan antara keadaan yang diharapkan berbeda dengan kenyataan. Proses mendefinisikan masalah ini perlu adanya sebuah pemetaan masalah dan

pemetaan potensi dari permasalahan tersebut melalui serap aspirasi masyarakat untuk dapat mengumpulkan sumber permasalahannya. Serap aspirasi merupakan sebuah proses atau tindakan untuk mengumpulkan, memahami, mengintegrasikan aspirasi, keinginan, kebutuhan serta harapan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan kebijakan. Dalam proses pembangunan, serap aspirasi biasa dikemas pada agenda musyawarah pembangunan desa dalam kegiatan Musdus (Musyawarah Dusun) (Husain Abdurahman, dkk, 2021).

Musdus merupakan forum pertemuan musyawarah pembangunan desa pada tingkat dusun untuk mendiskusikan berbagai masalah dan kebutuhan masyarakat di lingkup dusun. Proses pemetaan masalah dalam mengidentifikasi permasalahan yang menjadi pembahasan utama dalam forum musyawarah tersebut adalah mengenai pembangunan infrastruktur seperti; akses jalan yang rusak, kurangnya fasilitas pendidikan dan fasilitas kesehatan yang kurang memadai. Pada proses tersebut, menghadirkan pemangku kepentingan dari aktor politik pembangunan seperti pemerintah desa, BPD, organisasi non pemerintah dan masyarakat. seperti yang disampaikan narasumber:

*“Kegiatan musdus ini dilakukan di wilayah dusun Desa Binangun dengan dihadiri oleh kepala desa, BPD, kepala dusun, RT, RW, tokoh masyarakat, tokoh perempuan dan pemuda wilayah yang diselenggarakan di balai pertemuan dusun. Tujuan kegiatan tersebut adalah untuk menggali semua aspirasi masyarakat di dusun ini yang dibutuhkan apa saja terkait pembangunan infrastruktur atau kegiatan pemberdayaan masyarakat”.* (Wawancara Toto Arifin, 2 Juni 2024)

Dari pernyataan narasumber diatas mengatakan bahwa kegiatan musdus ini bermaksud untuk menggali informasi lebih dalam dimulai dari tingkat bawah dengan menghadirkan para aktor politik di tingkat desa baik dari pemerintah desa maupun tokoh kalangan masyarakat. proses definisi masalah pada model rasionalitas ini memberikan kesempatan kepada semua partisipan untuk memberikan pendapatnya dan dibahas bersama sampai mencapai adanya sebuah keputusan mengenai permasalahan apa saja pada tingkat dusun untuk dilakukan upaya pembangunan dari desa. hasil pembahasan tersebut nantinya

yang akan dibawa ke desa untuk diajukan dan di musyawarahkan dalam kegiatan musrenbangdes sebagai langkah model rasional selanjutnya.

## **2. Identify the Decision Criteria (Identifikasi Kriteria Keputusan)**

Kriteria keputusan merupakan sebuah langkah dalam model rasional pengambilan keputusan sebagai suatu standar ukuran yang digunakan untuk menganalisa dan membandingkan alternatif yang tersedia. Mengidentifikasi kriteria ini sangat membantu dalam menentukan alternatif mana saja yang paling sesuai dengan tujuan yang akan dilaksanakan. Dalam mengidentifikasi kriteria keputusan juga perlu menentukan sebuah kriteria utama seperti menentukan relevansi tujuan utama yang akan dicapai dan keberlanjutan jangka panjang untuk mempertimbangkan dampak yang terjadi. Selain itu dalam mengidentifikasi kriteria keputusan juga harus memperhatikan efisiensi, efektivitas dan risiko yang terkait di setiap alternatif (Harrison. E. F, 1999).

Penentuan skala prioritas pada setiap masalah dalam pembangunan infrastruktur menjadi suatu faktor yang penting dalam mengidentifikasi kriteria keputusan. Dalam perencanaan pembangunan infrastruktur desa Binangun, penentuan skala prioritas adalah salah satu bagian penting dalam proses pengambilan keputusan, karena hasil penentuan prioritas pembangunan tersebut yang akan menjadi pilihan alternatif terbaik. Penentuan skala prioritas ini lebih dulu dilakukan dalam musyawarah tingkat dusun sebelum dibawa ke musyawarah tingkat desa, agar pembahasan tidak berlarut-larut dan lebih efisien guna mencapai kesepakatan bersama. Salah satu tujuan dari musrenbang ini untuk mengidentifikasi sebuah kriteria keputusan apa yang akan menjadi prioritas pembangunan. Seperti yang disampaikan oleh kepala desa sebagai narasumber berikut:

*“Untuk mengidentifikasi kriteria yang akan menjadi sebuah keputusan itu dengan melihat mana yang menjadi skala prioritas pembangunan. Penentuan skala prioritas pembangunan infrastruktur, dilakukan melalui musyawarah. Dari setiap dusun membawa berkas aspirasi hasil musdus, yang akan dirapatkan dalam musrenbangdes untuk dilakukan perbandingan program kerja pembangunan infrastruktur di setiap dusun dengan mengacu pada visi-misi yang akan*

*diorientasikan menyesuaikan rencana pembangunan yang ada serta memperhatikan amunisi anggaran desa”.* (Wawancara: Mardiyono, 31 Mei 2024)

Dari pernyataan narasumber diatas, kepala desa sebagai aktor yang paling dominan dalam pengambilan keputusan pembangunan Infrastruktur Desa Binangun menentukan skala prioritas, dilakukan melalui musyawarah. Dimulai dari musyawarah pada tingkat dusun dan kemudian diidentifikasi kembali untuk menemukan kriteria keputusan yang tepat dalam musyawarah pembangunan di tingkat desa. Selain itu, penentuan skala prioritas dalam pembangunan infrastruktur desa yaitu dengan mengorientasikan visi dan misi desa. Tujuannya ialah untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur secara proposional adil bagi seluruh masyarakat desa binangun. dan beliau melakukan perbandingan urgensi pembangunan di setiap wilayah dusun yang disesuaikan dengan anggaran yang ada. (Mardiyono, 2024)

### **3. Allocate Weights To The Criteria (Alokasikan Bobot Pada Kriteria)**

Mengalokasikan suatu bobot pada kriteria dalam model pengambilan keputusan secara rasional merupakan sebuah langkah yang penting untuk melabeli prioritas utama pada berbagai kriteria yang digunakan dalam mengevaluasi alternatif keputusan. Alokasi bobot pada alternatif kriteria dapat memungkinkan pengambil keputusan untuk menekankan kriteria yang lebih penting dan sesuai dengan apa yang menjadi tujuan utamanya. Untuk mengalokasikan bobot pada kriteria alternatif pengambilan keputusan dalam menentukan rencana kerja pembangunan infrastruktur Desa Binangun, dalam proses perencanaan membuat rangking skala prioritas pada identifikasi masalah. Seperti yang disampaikan narasumber:

*“Untuk menentukan skala prioritas, kita biasanya membuat rangking prioritas pada masalah pembangunan di setiap dusunya, sebagai contoh ketika prioritas ranking 1 memiliki urgensi yang lebih tinggi di salah satu dusun A, maka itu bisa disepakati dan skala prioritas ranking 2 akan dilaksanakan ditahun berikutnya, menentukan ranking prioritas itu juga menekankan pada kebutuhan yang paling*

*besar dan memperhatikan segi anggaran yang tersedia”.*(Wawancara: Toto Arifin, 2 Juni 2024)

Dari apa yang disampaikan narasumber diatas, menunjukkan bahwa dalam menentukan skala prioritas pembangunan dari permasalahan yang ada di desa yaitu dengan membuat skala ranking prioritas pada masalah yang telah diidentifikasi. Dalam menentukan skala ranking prioritas tersebut juga harus memperhatikan urgensi yang paling besar dan jika tidak segera ditangani akan berdampak buruk bagi masyarakat desa. penentuan skala rangking prioritas ini dibahas dalam proses perencanaan pembangunan dengan diperoleh kesepakatan bersama dalam pengambilan keputusanya (Arifin, 2024).

Berikut ini adalah gabungan dari ketiga langkah pengambilan keputusan secara rasional dalam pembangunan infrastruktur di Desa Binangun dimulai dari pendefinisian masalah, identifikasi kriteria keputusan dengan pemetaan potensi serta pemberian ranking pada masalah yang telah dipaparkan. Informasi masalah tersebut diperoleh dari hasil serap aspirasi masyarakat baik dalam musdus maupun musrenbangdes yang berkaitan dengan sub bidang pembangunan infrastruktur Desa Binangun.

**Tabel 12 Daftar Identifikasi Masalah Dan Ranking Prioritas Sub Bidang Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Desa Binangun**

No	Masalah	Potensi	Ranking
<b>Sub Bidang Pendidikan</b>			
1.	- Kerusakan penunjang Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa Binangun sehingga kurang bermanfaat dan tidak bisa dioptimalkan dalam pemanfaatannya.	- Adanya Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa Binangun - Pengelola kegiatan tersebut - Adanya minat masyarakat yang cukup tinggi	1

No	Masalah	Potensi	Ranking
2.	- Kerusakan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa Binangun sehingga kurang bermanfaat dan tidak bisa dioptimalkan dalam pemanfaatannya.	- Gedung PAUD/TK/TPA/TKA/T PQ/ Madrasah Binangun - Lokasi sarana prasarana pendidikan - Tenaga Pengajar - Kepengurusan - Anak didik dan dukungan masyarakat	1
3.	- Minimnya Sarana/Prasarana/ Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa Binangun.	- Lokasi (tanah kas desa) ada - Tenaga pengajar tersedia - Kepengurusan dalam pengelolaan sudah terbentuk - Antusias masyarakat	2
4.	- Sarana Prasarana Perpustakaan /Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa Binangun rusak sehingga perlu perbaikan untuk bisa maksimal dipergunakan	- Lokasi (tanah kas desa) ada - Kepengurusan dalam pengelolaan sudah terbentuk - Antusias masyarakat ada - Dukungan dari dinas terkait	2
<b>Sub Bidang Kesehatan</b>			
1.	- Sarana prasarana Posbindu, Posyandu, Polindes, PKD milik desa tidak maksimal dan optimal di	- Adanya sarana prasarana Posbindu/Posyandu/Polindes/PKD milik desa - Pengelola ada - Lokasi di atas tanah kas	1

No	Masalah	Potensi	Ranking
	manfaatkan karena kerusakan dan kurangnya perawatan	desa - Pelayanan rutin dilakukan - Dukungan dinas terkait	
2.	- Sarana prasarana Posbindu, Posyandu, Polindes, PKD milik desa tidak maksimal dan optimal di manfaatkan karena kerusakan dan fasilitas pendukung kurang	- Pengelola ada - Lokasi di atas tanah kas desa - Dukungan masyarakat ada - Ada tenaga kesehatan yang siap memfasilitasi - Dukungan dinas terkait	2
<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan penataan ruang</b>			
1.	- Jalan desa mengalami kerusakan sehingga menghambat aktifitas warga - Belum adanya akses jalan yang menghubungkan antar wilayah - Fungsi jalan belum maksimal karena masih susah di lewati apalagi lagi musim penghujan - Mobilitas warga tidak maksimal dengan kondisi jalan saat ini yang masih susah di lewati sehingga	- Tanah/lahan sebagai akses jalan - Toko material dalam desa - Tenaga kerja - Swadaya masyarakat	1

No	Masalah	Potensi	Ranking
	berpengaruh kepada sendi penghidupan warga		
2.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jalan Lingkungan Permukiman/Gang mengalami kerusakan sehingga menghambat aktifitas warga</li> <li>- Belum adanya akses jalan yang dilingkungan sebagai akses warga lingkungan untuk aktifitas rutin</li> <li>- Fungsi jalan belum maksimal karena masih susah di lewati apalagi lagi musim penghujan</li> <li>- Mobilitas warga tidak maksimal dengan kondisi jalan saat ini yang masih susah di lewati sehingga berpengaruh kepada sendi penghidupan warga</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tanah/lahan sebagai akses jalan</li> <li>- Toko material dalam desa</li> <li>- Tenaga kerja</li> <li>- Swadaya masyarakat</li> </ul>	1
3.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jalan Usaha Tani mengalami kerusakan sehingga menghambat aktifitas warga untuk</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tanah/lahan sebagai akses jalan</li> <li>- Toko material dalam desa</li> </ul>	1

No	Masalah	Potensi	Ranking
	<p>akses ke ladang/sawah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum adanya akses jalan ke lahan pertanian (sawah/lading) yang memadai dan layak sehingga sangat berpengaruh ke produktifitas pertanian dan nilai jual hasil pertanian</li> <li>- Fungsi jalan usaha tani belum maksimal karena masih susah di lewati apalagi lagi musim penghujan</li> <li>- Mobilitas warga tidak maksimal dengan kondisi jalan saat ini yang masih susah di lewati sehingga berpengaruh kepada sendi kehidupan warga</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lahan pertanian</li> <li>- Kelompok usaha tani</li> <li>- Tenaga kerja</li> <li>- Swadaya masyarakat</li> </ul>	
4.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jembatan Milik Desa mengalami kerusakan sehingga menghambat aktifitas warga</li> <li>- Jembatan yang ada rusak berat sehingga tidak dapat dilalui</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya akses jalan</li> <li>- Toko material dalam desa</li> <li>- Tenaga kerja</li> <li>- Swadaya masyarakat</li> </ul>	1

No	Masalah	Potensi	Ranking
	<p>oleh pengguna jalan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jembatan yang ada terlalu kecil sehingga tidak bias dilalui kendaraan besar hanya roda dua saja</li> <li>- Konstruksi jembatan sangat membahayakan penggunanya karena terbuat dari kayu sehingga perlu dibuat permanen dengan konstruksi pasangan batu/beton</li> </ul>		
5.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya kerusakan Embung Milik Desa sehingga mengurangi manfaat nya</li> <li>- Tidak merata pembagian air untuk pertanian warga karena kerusakan Embung Milik Desa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tanah kas desa</li> <li>- Toko material dalam desa</li> <li>- Lahan pertanian</li> <li>- Sumber air</li> <li>- Tenaga kerja</li> <li>- Swadaya masyarakat</li> </ul>	3
6.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lapangan desa yang ada tidak dapat digunakan karena rusak berat</li> <li>- Lapangan desa belum bias maksimal digunakan karena fasilitas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sarana olah raga milik desa</li> <li>- Lahan milik desa</li> <li>- Toko material dalam desa</li> <li>- Tenaga kerja</li> <li>Swadaya masyarakat</li> </ul>	4

No	Masalah	Potensi	Ranking
	pendukungnya kurang dan perlu pembenahan		
7.	- Talud / Turap / Tembok Penahan Tanah (TPT) masih sederhana sehingga mudah rusak dan tidak maksimal fungsinya	- Sarana jalan - Lahan milik desa - Toko material dalam desa - Tenaga kerja - Swadaya masyarakat	2
8.	- Prasarana pendukung jalan (Gorong-gorong, Selokan, <i>Box/Slab Culvert</i> (gorong-gorong berbentuk kotak), Drainase, Prasarana Jalan lain) perlu dibuat konstruksi yang permanen agar berfungsi maksimal	- Adanya akses jalan - Toko material dalam desa - Tenaga kerja - Swadaya masyarakat	1
9.	- Adanya kerusakan Monumen/Gapura/Batas Desa Binangun sehingga mengurangi estetika desa dan juga keindahan desa	- Monumen/Gapura/Batas Desa Binangun - Toko material dalam desa - Tenaga kerja - Swadaya masyarakat	4
10.	- Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/ Petilasan Milik Desa Binangun mengalami kerusakan	- Tanah kas desa - Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/ Petilasan Milik Desa Binangun	2

No	Masalah	Potensi	Ranking
	dan berkurangnya fungsi prasarana tersebut	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Toko material dalam desa</li> <li>- Tenaga kerja</li> <li>- Swadaya masyarakat</li> </ul>	

Sumber : Kantor Desa Binangun, 2024

#### 4. Develop The Alternative (Kembangkan Alternatif)

Pengembangan alternatif dalam model rasional pengambilan keputusan merupakan sebuah langkah kritis yang terjadi setelah mengidentifikasi masalah dan tujuannya. Pada proses pengembangan alternatif melibatkan penciptaan berbagai pilihan dari setiap opsi dan solusi potensial yang digunakan untuk menetapkan suatu tujuan. Proses pengembangan alternatif disebut sebagai inti dari model pengambilan keputusan secara rasional, hal tersebut disebabkan karena dapat memungkinkan pengambil keputusan mempertimbangkan berbagai solusi alternatif lainnya sebagai jalan keluar sebelum yakin memilih yang paling optimal (Harrison. E. F, 1999).

Dalam mengembangkan sebuah alternatif, dari setiap masalah yang telah definisikan dan diidentifikasi kriteria keputusan serta bobot dari suatu pilihan alternatif, maka selanjutnya perlu menganalisis penyebab dan alternatif tindakan pemecahan masalah. Penulis menyajikan hasil pengkajian tindakan pemecahan masalah sebagai pengembangan alternatif sub bidang pelaksanaan pembangunan infrastruktur Desa Binangun adalah sebagai berikut:

**Tabel 13 Hasil Pengkajian Tindakan Pemecahan Sub Bidang Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Desa Binangun**

No	Masalah	Penyebab	Alternatif Tindakan Masalah
<b>Sub Bidang Pendidikan</b>			
1.	- Kerusakan penunjang Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman	- Kerusakan penunjang Sarana dan	- Pemeliharaan sarana prasarana perpustakaan

No	Masalah	Penyebab	Alternatif Tindakan Masalah
	Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa Binangun sehingga kurang bermanfaat dan tidak bisa dioptimalkan dalam pemanfaatannya.	Prasarana Perpustakaan/ Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa	- Pemeliharaan sarana prasarana taman baca - Pemeliharaan prasarana sanggar belajar milik desa
2.	- Kerusakan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa Binangun sehingga kurang bermanfaat dan tidak bisa dioptimalkan dalam pemanfaatannya.	- Gedung PAUD/TK/T PA/TKA/TP Q/ Madrasah Binangun - Lokasi sarana prasarana pendidikan - Tenaga Pengajar - Kepengurusan - Anak didik dan dukungan masyarakat	- Pemeliharaan sarana dan prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah non formal milik desa.
3.	- Belum adanya Sarana/Prasarana/ Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa Binangun.	- Kebijakan pemdes yang kurang memperhatikan di bidang pendidikan - Sarana	- Pembangunan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah non formal milik desa. - Rehabilitasi dan peningkatan

No	Masalah	Penyebab	Alternatif Tindakan Masalah
		prasarana alat peraga edukasi rusak berat karena bangunan lama.	PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah non formal milik desa. - Pengadaan sarana dan prasarana peraga alat edukatif
4.	- Sarana Prasarana Perpustakaan /Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa Binangun rusak sehingga perlu perbaikan untuk bisa maksimal dipergunakan	- Kebijakan pemdes yang kurang memperhatikan di bidang pendidikan - Sarana prasarana alat peraga edukasi rusak berat karena bangunan lama.	- Pembangunan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah non formal milik desa. - Rehabilitasi dan peningkatan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah non formal milik desa. - Pengadaan sarana dan prasarana peraga alat edukatif
<b>Sub Bidang Kesehatan</b>			
1.	- Sarana prasarana Posbindu, Posyandu, Polindes, PKD milik desa tidak maksimal dan optimal di manfaatkan karena	- Kerusakan prasarana Posbindu, Posyandu, Polindes, PKD milik	- Pemeliharaan sarana prasarana posbindu - Pemeiharaan sarana prasarana posyandu

No	Masalah	Penyebab	Alternatif Tindakan Masalah
	kerusakan dan kurangnya perawatan	desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemeliharaan sarana prasarana polindes</li> <li>- Pemeliharaan sarana prasarana posbindu PKD</li> </ul>
2.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sarana prasarana Posbindu, Posyandu, Polindes, PKD milik desa tidak maksimal dan optimal di manfaatkan karena kerusakan dan fasilitas pendukung kurang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kerusakan Kerusakan prasarana Posbindu, Posyandu, Polindes, PKD milik desa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembangunan, rehabilitasi, peningkatan dan pengadaan sarana prasarana posbindu/posyandu/polindes/PKD</li> </ul>
<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan penataan ruang</b>			
1.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jalan desa mengalami kerusakan sehingga menghambat aktifitas warga</li> <li>- Belum adanya akses jalan yang menghubungkan antar wilayah</li> <li>- Fungsi jalan belum maksimal karena masih susah di lewati apalagi lagi musim penghujan</li> <li>- Mobilitas warga tidak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kerusakan sarana prasarana jalan desa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemeliharaan, rehabilitasi, peningkatan dan pembangunan jalan desa</li> </ul>

No	Masalah	Penyebab	Alternatif Tindakan Masalah
	maksimal dengan kondisi jalan saat ini yang masih susah di lewati sehingga berpengaruh kepada sendi penghidupan warga		
2.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jalan Lingkungan Permukiman/Gang mengalami kerusakan sehingga menghambat aktifitas warga</li> <li>- Belum adanya akses jalan yang dilingkungan sebagai akses warga lingkungan untuk aktifitas rutin</li> <li>- Fungsi jalan belum maksimal karena masih susah di lewati apalagi lagi musim penghujan</li> <li>- Mobilitas warga tidak maksimal dengan kondisi jalan saat ini yang masih susah di lewati sehingga berpengaruh kepada sendi penghidupan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kerusakan sarana prasarana jalan lingkungan</li> <li>- Kondisi lingkungan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemeliharaan, rehabilitasi, peningkatan dan pembangunan jalan lingkungan milik desa</li> </ul>

No	Masalah	Penyebab	Alternatif Tindakan Masalah
	warga		
3.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jalan Usaha Tani mengalami kerusakan sehingga menghambat aktifitas warga untuk akses ke ladang/sawah</li> <li>- Belum adanya akses jalan ke lahan pertanian (sawah/lading) yang memadai dan layak sehingga sangat berpengaruh ke produktifitas pertanian dan nilai jual hasil pertanian</li> <li>- Fungsi jalan usaha tani belum maksimal karena masih susah di lewati apalagi lagi musim penghujan</li> <li>- Mobilitas warga tidak maksimal dengan kondisi jalan saat ini yang masih susah di lewati sehingga berpengaruh kepada sendi penghidupan warga</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kerusakan sarana prasarana jalan usaha tani</li> <li>- Kondisi lingkungan pada area sawah yang susah untuk dibangun</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemeliharaan, rehabilitasi, peningkatan dan pembangunan jalan usaha tani</li> </ul>
4.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jembatan Milik Desa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kerusakan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemeliharaan,</li> </ul>

No	Masalah	Penyebab	Alternatif Tindakan Masalah
	<p>mengalami kerusakan sehingga menghambat aktifitas warga</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jembatan yang ada rusak berat sehingga tidak dapat dilalui oleh pengguna jalan</li> <li>- Jembatan yang ada terlalu kecil sehingga tidak bias dilalui kendaraan besar hanya roda dua saja</li> <li>- Konstruksi jembatan sangat membahayakan penggunaanya karena terbuat dari kayu sehingga perlu dibuat permanen dengan konstruksi pasangan batu/beton</li> </ul>	<p>sarana prasarana jembatan milik desa</p>	<p>rehabilitasi, peningkatan dan pembangunan jembatan milik desa</p>
5.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya kerusakan Embung Milik Desa sehingga mengurangi manfaat nya</li> <li>- Tidak merata pembagian air untuk pertanian warga karena kerusakan Embung Milik Desa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kerusakan sarana prasarana embung milik desa</li> <li>- Akses yang susah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemeliharaan, rehabilitasi, peningkatan dan pembangunan embung milik desa</li> </ul>
6.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lapangan desa yang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kondisi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemeliharaan,</li> </ul>

No	Masalah	Penyebab	Alternatif Tindakan Masalah
	<p>ada tidak dapat digunakan karena rusak berat</p> <p>- Lapangan desa belum bias maksimal digunakan karena fasilitas pendukungnya kurang dan perlu pembenahan</p>	<p>lingkungan area lapangan yang susah</p>	<p>rehabilitasi, peningkatan dan pembangunan lapangan desa</p>
7.	<p>- Talud / Turap / Tembok Penahan Tanah (TPT) masih sederhana sehingga mudah rusak dan tidak maksimal fungsinya</p>	<p>- Kerusakan sarana prasarana talud</p>	<p>- Pemeliharaan, rehabilitasi, peningkatan dan pembangunan Talud / Turap / Tembok Penahan Tanah (TPT)</p>
8.	<p>- Prasarana pendukung jalan (Gorong-gorong, Selokan, <i>Box/Slab Culvert</i> (gorong-gorong berbentuk kotak), Drainase, Prasarana Jalan lain) perlu dibuat konstruksi yang permanen agar berfungsi maksimal</p>	<p>- Akses pembangunan yang sulit</p>	<p>- Pemeliharaan, rehabilitasi, peningkatan dan pembangunan jalan (Gorong-gorong, Selokan, <i>Box/Slab Culvert</i> (gorong-gorong berbentuk kotak), Drainase, Prasarana Jalan lain)</p>

No	Masalah	Penyebab	Alternatif Tindakan Masalah
9.	- Adanya kerusakan Monumen/Gapura/Batas Desa Binangun sehingga mengurangi estetika desa dan juga keindahan desa	- Kerusakan sarana prasarana Monumen/Gapura/Batas Desa Binangun	- Pemeliharaan, rehabilitasi, peningkatan dan pembangunan Monumen/Gapura/Batas Desa Binangun
10.	- Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/ Petilasan Milik Desa Binangun mengalami kerusakan dan berkurangnya fungsi prasarana tersebut	- Kerusakan sarana prasarana pemakaman milik desa	- Pemeliharaan, rehabilitasi, peningkatan dan pembangunan Pemakaman Milik Desa

*Sumber : Kantor Desa Binangun, 2024*

Dari data tabel diatas merupakan suatu bentuk pengembangan alternatif masalah dengan mengetahui penyebab dan tindakan alternatif pemecahan masalah. Namun peneliti menganalisis dari sumber dokumen pengembangan alternatif tersebut masih kurang maksimal dalam pencantuman kriteria penyebab dan pemecahan alterntatifnya. Bentuk tulisan yang tercantum hampir memiliki sebuah kesamaan walaupun dengan permasalahan yang berbeda. Pada dasarnya proses pemetaan masalah pada proses pengambilan keputusan dalam pembangunan infrastruktur melibatkan banyak partisipasi aktor politik serta dilakukan dengan musyawarah. Akan tetapi hasil dari pengembangan alternatif tersebut seperti masih belum memetakan penyebab dan tindakan pemecahan masalah secara mendalam.

## **5. Evaluate the Alternative (Evaluasi Alternatif)**

Evaluasi alternatif merupakan sebuah tahapan kritis dalam model pengambilan keputusan rasional. Setelah melakukan pengembangan alternatif, selanjutnya adalah mengevaluasi dari berbagai alternatif secara sistematis untuk menentukan tujuan mana saja yang paling sesuai dan dapat ditetapkan. Evaluasi ini memerlukan analisis yang mendalam terhadap berbagai kriteria alternatif yang paling relevan. Evaluasi alternatif ini memerlukan pemikiran yang strategis untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil berdasarkan pada informasi yang pasti dan menyeluruh. Pada tahap evaluasi ini, memungkinkan pengambil keputusan untuk dapat lebih memahami kembali apakah keputusan yang diambil dapat mencapai tujuan yang diinginkan bersama (Harrison. E. F, 1999).

Evaluasi alternatif sebagai suatu fase dari berbagai alternatif yang telah dianalisis diidentifikasi dan dinilai secara sistematis digabungkan berdasarkan kriteria keputusan sebelumnya yang telah ditetapkan. Sebagai contoh pada pengambilan keputusan pembangunan jembatan Desa Binangun yang menjadi salah satu prioritas utama pembangunan infrastruktur pada tahun 2023. Pada proses pendefinisian masalah kerusakan jembatan sangat menghambat aktifitas utama masyarakat dan urgensi dari jembatan tersebut sangat penting karena mengalami kerusakan yang parah sehingga tidak bisa untuk dilalui. Perencanaan pembangunan infrastruktur jembatan ini dikategorikan pada peringkat pertama karena memiliki bobot urgensi yang besar dibandingkan dengan pembangunan infrastruktur lainnya. Penyebab permasalahan pada kerusakan jembatan karena usia jembatan yang sudah tua sehingga perlu adanya pemeliharaan, rehabilitasi serta pembangunan kembali.

## **6. Select the Best Alternative (Pilih Alternatif Terbaik)**

Pemilihan solusi alternatif merupakan proses langkah terakhir pada model rasionalitas. Pada umumnya pengambilan keputusan pada langkah ini akan mengambil atau memilih alternatif dengan nilai yang besar. Dapat dikatakan bahwa proses ini merupakan penentuan skala prioritas pembangunan infrastruktur desa. Penentuan skala prioritas merupakan suatu tindakan yang sistematis dalam menetapkan urutan tugas yang paling urgensi dari berbagai

aktivitas maupun pengambilan keputusan berdasarkan kriteria tertentu untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Tujuan penentuan skala prioritas tersebut untuk memastikan sumber daya yang dimiliki dapat dialokasikan secara efektif dan efisien untuk suatu hal yang berdampak besar dan yang paling mendesak (Harrison. E. F, 1999).

Hasil dari penentuan skala prioritas dan yang sudah melalui tahap evaluasi alternatif dapat menjadi pilihan alternatif terbaik. Aktor politik sebagai pengambil keputusan meninjau hasil evaluasi alternatif yang telah dianalisis berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Keputusan akhir yang diperoleh juga berdasarkan kesepakatan bersama dengan menyelaraskan yang menjadi tujuan utamanya. Namun dalam proses pengambilan keputusan dalam pembangunan infrastruktur Desa Binangun terkadang menggunakan cara voting untuk menentukan suatu pilihan. Akan tetapi, adanya sistem voting dalam pengambilan keputusan ketika itu adalah pendapat yang disampaikan kepala desa, sebagian masyarakat menganggap itu merupakan keputusan yang sentralitas seperti yang disampaikan narasumber:

*“Dari koridor jabatan politik yang dimilikinya, terkadang seorang kepala desa menggunakan keputusannya sendiri tidak sesuai apa yang telah disepakati. Dan ketika model pengambilan keputusan tersebut dilakukan dengan voting, maka dengan mudah seorang kepala desa mempengaruhi partisipasi masyarakat dengan segala cara agar mendapatkan dukungan dari masyarakat demi kepentingnya”.*  
(Wawancara: Priono, 31 Mei 2024).

Dari pernyataan narasumber di atas, menunjukkan Kepala Desa Binangun terkadang mengambil keputusan yang sentralitas demi kepentingannya. Ketika pengambilan keputusan tersebut menggunakan cara voting dalam menentukan skala prioritas pembangunan, maka kepala desa yang sudah memiliki pengaruh dan kepercayaan yang besar di lingkup masyarakat akan sangat mudah memenangkan voting tersebut. Dalam proses pengambilan keputusan model proses politik, pada intinya ingin menemukan solusi dan kesepakatan dari para aktor politik untuk mencapai tujuan tertentu. Sebagai contoh pada pembangunan jembatan gantung yang paling diprioritaskan di tahun 2023 yang terletak di Dusun Cigebret. Pada pembangunan tersebut karena memakan

anggaran dana yang besar sehingga di tahun yang sama dusun tersebut tidak ada pembangunan lainnya. Seperti yang disampaikan narasumber:

*“Pada tahun 2023, wilayah Dusun Cigebret mendapatkan jatah pembangunan infrastruktur yaitu pembangunan jembatan yang mejadi prioritas pembangunan hasil kesepakatan bersama dalam musyawarah. Karena pembangunan jembatan menggunakan dana yang besar sekitar 350 juta rupiah, sehingga di tahun tersebut tidak ada pembangunan lainnya di dusun cigebret. Pada dasarnya rencana pembangunan sudah dari 2019, akan tetapi, karena terhalang pandemi covid-19 sehingga dana desa lebih banyak dialokasikan dalam bantuan sosial dampak pandemi”.*(Wawancara: Saminudin 2 Juni 2024).

Dari pernyataan diatas, bahwa salah satu pembangunan prioritas pada tahun 2023 Desa Binangun adalah pembangunan jembatan di Dusun Cigebret. Perencanaan pembangunan jembatan tersebut sudah direncanakan sejak tahun 2019, akan tetapi baru bisa direalisasikan pada tahun 2023 karena beberapa kendala pandemi di Indonesia. analisis pemilihan pembangunan tersebut, melihat urgensi dari pembangunan jembatan sebagai salah satu akses penting karna dampaknya sangat berpengaruh pada aktivitas masyarakat Desa Binangun sebagai penghubung antar wilayah dan akses transportasi yang sering dilalui. Karena penggunaan dana pembangunan tersebut cukup besar, sehingga tidak ada pembangunan lain yang dilakukan di tahun yang sama di Dusun Cigebret (Saminudin, 2024).

## **B. Dampak Model Pengambilan Keputusan Rasionalitas**

Pengambilan keputusan dalam pembangunan infrastruktur desa memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap kehidupan masyarakat desa sesuai model keputusan yang digunakan. Model pengambilan keputusan rasional sering digunakan untuk mengambil keputusan yang paling optimal dan efisien. Dampak dari model ini memiliki banyak keuntungan terutama dalam menghasilkan keputusan yang terinformasi, efisien, dan akuntabel. Dalam pembangunan desa, dampak dari penerapan model ini harus dilengkapi dengan fleksibilitas serta pertimbangan yang matang untuk mencapai hasil yang komprehensif dan

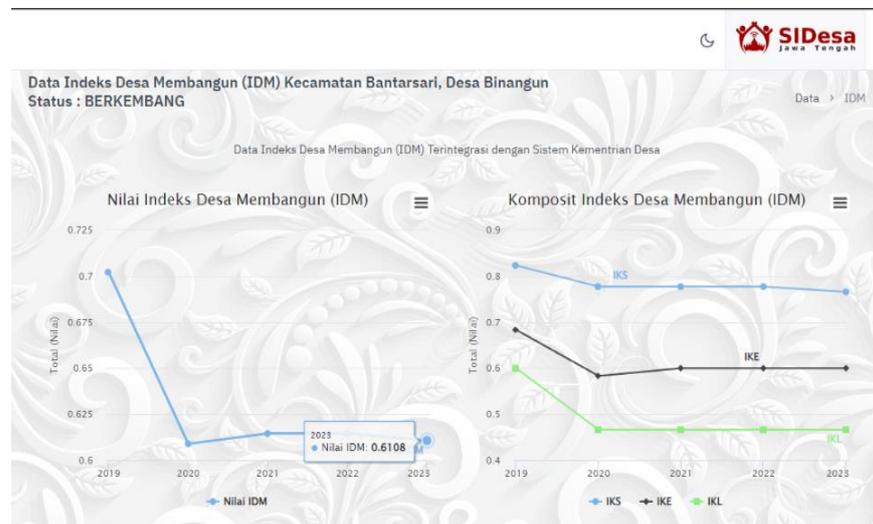
berkelanjutan. Pada bab ini menjelaskan dampak model pengambilan keputusan yang diambil pada pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat Desa Binangun.

## 1. Dampak Bagi Pembangunan

Pengambilan keputusan memberikan dampak bagi pembangunan desa karena sebagai penentu arah kebijakan pelaksanaan pembangunan desa. Selama Bapak Mardiyono selaku Kepala Desa Binangun menjabat dalam dua periode ini, sudah memberikan dampak yang cukup signifikan dalam pembangunan infrastruktur. Seiring berjalanya waktu, sudah banyak perubahan yang tampak dalam pembangunan infrastruktur di Desa Binangun seperti prasarana transportasi, pendidikan maupun kesehatan. Model pengambilan rasioanalitas memberikan dampak bagi pembangunan desa yang dikemas dalam beberapa point berikut:

- a. Indeks Pembangunan Desa masih Rendah

**Gambar 13 IDM Desa Binangun 2023**



Sumber : Website Kemendes 2023

Dari gambar data IDM diatas, menunjukkan bahwa selama 2019-2023 nilai IDM Desa Binangun masih mengalami penurunan. Selama beliau menjabat belum bisa membuat pembangunan di Desa Binangun berstatus maju dan sebagai desa mandiri. Jika dibandingkan dengan desa lain di Kecamatan Bantarsari, menurut Indeks Desa Membangun (IDM) Desa Binangun masih menempati peringkat terendah dengan nilai 61,08% dan

statusnya masih berkembang. Hal ini disebabkan adanya pandemi covid-19 pada tahun 2020 menjadikan faktor penyebab penurunannya nilai pembangunan desa karena anggaran yang telah ditetapkan untuk pembangunan desa dialihfungsikan untuk bantuan sosial kemanusiaan. Penurunan nilai IDM dapat menyebabkan ketertinggalan infrastruktur diberbagai akses pembangunan seperti jalan, listrik, air bersih dan lainnya yang dapat menjadi hambatan mobilitas masyarakat terhadap layanan dasar (Kemendes, 2023).

b. Sarana Pembangunan Infrastruktur yang Belum Terpenuhi

Model pengambilan keputusan rasionalitas sebagai suatu cara memilih berbagai alternatif dalam menentukan skala prioritas pembangunan untuk dilaksanakan. Terkadang pengambilan keputusan secara rasionalitas ini lebih mengutamakan yang diprioritaskan menurut pengambil keputusan. Pembangunan infrastruktur yang sering menjadi prioritas kebutuhan masyarakat Desa Binangun berupa pembangunan jalan, talud, dan jembatan sehingga sarana pokok lain menjadi tidak terpenuhi seperti akses pembangunan pendidikan, keagamaan dan pertanian. Pada dasarnya pengambilan keputusan rasional ini mengupayakan pemerataan pembangunan di setiap wilayah, akan tetapi kurang memperhatikan pemerataan disemua bidang pembangunan. Seperti yang disampaikan narasumber:

*“Adanya pembangunan sarana infrastruktur pendidikan memberikan dampak yang positif, artinya sarana tersebut sebagai penyediaan layanan belajar pendidikan keagamaan, akan tetapi sampai saat ini masih belum ada pembangunan untuk prasaranan pendidikan ini, yang diharapkan pemerintah desa juga memperhatikan pembangunan tersebut”.* (Wawancara: Awal Hanifan, 25 Juni 2024)

Dari pernyataan narasumber diatas, menunjukkan bahwa prasarana pendidikan kurang diperhatikan sehingga pembangunan tersebut belum terpenuhi. Penyediaan layanan sarana pendidikan ini sangat memfasilitasi minat belajar masyarakat, karena ketika tempat pembelajarannya representatif, belajarnya juga lebih semangat dan maksimal. Rencana kerja

pembangunan sarana tersebut pada dasarnya selalu diusulkan dan tercantum di RKPD Desa Binangun, akan tetapi Kepala Desa dengan model pengambilan rasionalitas lebih memprioritaskan pembangunan sarana tata ruang umum. Pada tahun 2023 pembangunan sarana pendidikan juga belum terlaksana, anggaran lebih dialokasikan untuk penyelenggaraan operasional pembinaan. Hal tersebut seperti yang tercantum dalam RKPD 2023 Desa Binangun sebagai berikut:

**Gambar 14 Realisasi Pembangunan Infrastruktur Sub Bidang Pendidikan Desa Binangun**

Tabel 2  
Realisasi Kegiatan Bidang Pembangunan Desa  
Tahun 2022

No.	Perencanaan					Realisasi		
	Kegiatan	Lokasi	Vol.	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran	Vol.	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<b>Sub Bidang Pendidikan</b>			<b>29.050.000</b>			<b>29.050.000</b>	
	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa** (Bantuan Honor Pengajar, Pakalan Seragam, Operasional, dst)	Binangun	1 tahun	22.800.000	DDS	1 tahun	22.800.000	DDS
	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst)							
	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat							
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa **							
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa**							
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa**							
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa**							
	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Desa)							
	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar							
	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	Binangun	1 tahun	6.250.000	DDS	1 keg.	6.250.000	DDS
	Pengadaan/pengembangan/pemeliharaan film dokumenter**							
	Pengadaan/pengembangan/pemeliharaan peralatan kesenian**							
	lain-lain kegiatan sub bidang pendidikan*							
				<b>214.562.000</b>			<b>213.772.000</b>	
2	<b>Sub Bidang Kesehatan</b>							

Sumber: RKPD Desa Binangun 2023

Pada gambar diatas, menunjukkan bahwa pembangunan desa pada bidang sub pendidikan lebih anggaran pembangunan lebih diprioritaskan untuk biaya operasional pembinaan. Sehingga untuk sarana pembangunan infrastruktur pembangunan tersebut belum terpenuhi. Sama halnya dalam hal pertanian yang lebih di prioritaskan kepada pembangunan jalan usaha tani daripada saluran irigasi sawah yang selalu menjadi kendala petani di Desa Binangun saat musim kemarau tiba. Seperti yang disampaikan oleh narasumber:

*“Untuk kita sebagai petani sering kali kita mengusulkan yang pertama mengenai benih pertanian. Kemudian, yang selalu menjadi kendala petani adalah masalah irigasi sebagai saluran perairan ke sawah. Kita sangat mengahrapkan pembangunan tersebut akan tetapi memang saat ini belum terpenuhi. Bantuan pembangunan yang sering ke petani lebih pada perbaikan jalan usaha tani yang beberapa sudah terbangun dan itu memang cukup membantu petani”.* (Wawancara: Nasikin, 26 Juni 2024)

## **2. Dampak Bagi masyarakat**

Pengambilan keputusan dalam pembangunan infrastruktur desa juga memberikan dampak yang besar bagi masyarakat Desa Binangun. Secara umum, model pengambilan keputusan yang digunakan di Desa Binangun menggunakan keputusan rasionalitas dengan upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa dan melakukan pemerataan pembangunan. Namun, dalam pelaksanaannya, sentralitas dalam model pengambilan keputusan ini memberikan dampak yang sangat dirasakan oleh masyarakat Desa binangun dikemas dalam beberapa poin sebagai berikut:

### **a. Pembangunan yang tidak merata**

Pengambilan keputusan secara rasionalitas sebagai suatu proses tindakan untuk memilih keputusan berdasarkan logika dan analisis yang bojektif. Kepala desa dalam menerapkan pengambilan keputusan tersebut terkadang berdasarkan pola analisisnya sendiri dalam melaksanakan pembangunan. Upaya dalam melakukan pemerataan pembangunan disetiap dusun sudah dilaksanakan oleh beliau, akan tetapi, peneliti menganalisa selama beliau menjabat, pembangunan yang lebih diutamakan di area dusun tempat tinggal kepala desa dan area pusat desa. hal ini seperti yang disampaikan oleh narasumber:

*“Terkadang kepala desa mengambil sebuah keputusan tidak sesuai apa yang telah disepakati. Karena memiliki jabatan politik yang lebih tinggi, beliau memiliki pengaruh yang besar ketika membuat keputusan. Dalam pelaksanaan pembangunan, beliau lebih mengutamakan wilayah dusun yang memiliki basis suara*

*pendukungnya. Karena kembali lagi dalam politik pasti ada kepentingan lain didalamnya”*(Wawancara: Priono 31 Mei 2024)

Dari pernyataan narasumber diatas menyampaikan bahwa terkadang kepala desa mengambil keputusan secara sentralitas dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa. Beliau bertempat tinggal di Dusun Sidamulya, dimana wilayah dusun tersebut memiliki basis pendukungnya yang paling banyak selama beliau menjabat. Dibandingkan dengan dusun lain, wilayah Dusun sidamulya lebih banyak akses pembangunan yang telah terlaksanakan dan lebih maju dibandingkan dengan dusun lainnya. Sehingga dampak ketidakmerataan pembangunan ini menyebabkan kecemburuan sosial oleh masyarakat dusun lain. Berikut merupakan salah satu contoh perbandingan pembangunan jalan usaha tani di Dusun Sidamulya dan Dusun Cigebret Desa Binangun.

**Gambar 15 Perbandingan Jalan Usaha Tani Dusun Sidamulya dan Dusun Bendagede**

**Dusun Sidamulya**

**Dusun Bendagede**



*Sumber: Hasil Observasi Peneliti, 2024*

b. Penurunan Kualitas Hidup

Pembangunan infrastruktur sangat mempengaruhi kemajuan perekonomian di suatu daerah. Ketidakmerataan pembangunan infrastruktur dapat menjadi salah satu faktor penurunan kualitas hidup di suatu masyarakat. Desa Binangun merupakan salah satu desa dari 37 desa miskin ekstrem di Kabupaten Cilacap menurut mantan PJ Bupati Cilacap Yunita Dyah Suminar pada tahun 2023. Mayoritas penduduk di Desa Binangun bekerja sebagai petani dan berdagang, namun sebanyak 1600 jiwa masih pengangguran. Pembangunan infrastruktur menjadi prioritas sarana prasarana dalam memfasilitasi kebutuhan masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa Binangun.

Dampak model pengambilan keputusan secara rasionalitas berupaya menunjang pertumbuhan ekonomi masyarakat Desa Binangun. Pengambilan keputusan secara sentralitas dari aktor politik memberikan dampak yang kurang menguntungkan bagi masyarakat Desa Binangun seperti yang disampaikan oleh narasumber:

*“Untuk pelaksanaan pembangunan sudah diatur oleh kepala desa dengan memperkerjakan pemborong dari luar desa, sehingga tidak ada partisipasi masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan pembangunan. Harapannya ya dalam pelaksanaan pembangunan dapat memberi lowongan pekerjaan bagi warga Desa Binangun guna meningkatkan partisipasi masyarakat dengan memperkerjakan pekerja dari warga Desa Binangun itu sendiri”.*(Wawancara: Rusiman, 25 Juni 2024)

Dari pernyataan narasumber diatas, dapat dipahami bahwa kepala desa sebagai aktor politik yang paling dominan mengambil keputusannya sendiri dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur Desa Binangun dengan memperkerjakan orang lain dari luar desa. hal tersebut beliau lakukan karena dari tukang tersebut sesuai profesinya dan dapat menghasilkan pembangunan yang maksimal. Akan tetapi dari pelaksanaan pembangunan tersebut pada dasarnya dapat memanfaatkan pekerja dari dalam desa sendiri, sehingga dapat membantu masyarakat

yang masih mengganggu dan menambah partisipasi masyarakat dalam upaya pembangunan desa (Rusiman, 2024).

Masyarakat menganggap hasil pembangunan yang telah terlaksana masih kurang maksimal akibat sentralitas pengambilan keputusan tersebut. Dampak prasarana infrastruktur yang kurang maksimal dapat menyebabkan penurunan kualitas hidup masyarakat Desa Binangun dalam mengembangkan usaha dan aktivitas mata pencaharian. Akibat dampak tersebut menyebabkan peningkatan migrasi dan urbanisasi di Desa Binangun yang di sebabkan kondisi ekonomi-sosial untuk mencari daerah dengan infrastruktur yang lebih maju dalam mengembangkan potensi diri mencari sebuah pekerjaan. Oleh sebab itu banyak dari masyarakat Desa Binangun yang merantau ke kota untuk meningkatkan kualitas hidupnya masing-masing (Suratno, 2024).

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Pada bab penutup, penulis menyajikan kesimpulan dan saran yang ditulis berdasarkan penjelasan bab sebelumnya dan menambahkan sebuah saran untuk dapat diajukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam laporan hasil penelitian. Diharapkan pada pembahasan kesimpulan dan saran, dapat membantu pembaca dalam memahami inti pembahasan dari rumusan masalah dalam penelitian ini.

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis peneliti mengenai pengambilan keputusan dalam pembangunan infrastruktur desa (studi kasus Desa Binangun, Kabupaten Cilacap 2022-2023) dapat diambil beberapa poin kesimpulan sebagai berikut:

1. Fokus dalam penelitian ini membahas pembangunan infrastruktur desa ditinjau dalam pengambilan keputusannya. Dalam proses pengambilan keputusan, dipengaruhi oleh aktor politik yang paling dominan di Desa Binangun, yaitu Kepala Desa Binangun dilihat dari koridor jabatan politiknya dan pengaruhnya yang cukup besar di masyarakat. Proses pengambilan keputusan dalam pembangunan infrastruktur dilakukan melalui tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Dalam tahap perencanaan, melibatkan partisipasi masyarakat untuk menyuarakan aspirasinya mengenai sarana pembangunan infrastruktur, dan pengambilan keputusan dilakukan dengan menentukan skala prioritas pembangunan yang menuai kesepakatan bersama. Pada tahap pelaksanaan, langkah pengambilan keputusan diambil untuk merealisasikan rencana kerja pembangunan. Pada tahap evaluasi, pengambilan keputusan digunakan untuk mengukur atau menilai rencana kerja pembangunan yang telah dilaksanakan sehingga dapat dianalisis kekuarungannya untuk diperbaiki agar kedepannya pembangunan infrastruktur bisa lebih baik.
2. Model pengambilan keputusan yang digunakan di Desa Binangun adalah pengambilan keputusan menurut pandangan rasional dalam teorinya E.F. Harrison (1999). Model pengambilan keputusan secara rasionalitas, menganalisis pembangunan infrastruktur dengan mengidentifikasi masalah

yang dikemas dalam aspirasi masyarakat mengenai kondisi infrastruktur di Desa Binangun serta menentukan solusi pemilihan alternatif dengan penentuan skala prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan. Secara umum model pengambilan keputusan rasional memberikan dampak positif, namun realisasinya masih sentralitas dari aktor politik (kepala desa) mendominasi pengambilan keputusan sehingga memberikan dampak yang kurang maksimal bagi pembangunan dan masyarakat desa antara lain:

- a. Indeks Pembangunan Desa masih Rendah
- b. Sarana Pembangunan Infrastruktur Yang Belum Terpenuhi
- c. Pembangunan yang tidak merata
- d. Penurunan Kualitas Hidup

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah dipaparkan, dapat ditarik beberapa saran yang dapat disampaikan sebagai landasan dari berbagai pihak yang berkepentingan dan ingin memanfaatkan temuan hasil penelitian ini antara lain:

1. Kepada pemerintah desa dalam perencanaan perumusan Rencana Kerja Pembangunan dalam RKPD/RPJMD penulisannya lebih diteliti kembali tentang program kerja yang dicantumkan harus menyesuaikan anggaran yang ada. dan untuk tranparansi serta realisasinya dapat lebih terbuka dengan mengaktifkan kembali media sosial serta website desa. dalam pelaksanaan pembangunan untuk lebih meningkatkan partisipasi masyarakat dengan memanfaatkan swadaya masyarakat.
2. Untuk masyarakat Desa Binangun, untuk lebih meningkatkan keaktifanya dalam organisasi di masyarakat terkhusus dalam memajukan pembangunan infrastruktur di Desa Binangun. serta untuk lebih meningkatkan kesadaranya akan pentingnya sebuah pembangunan infrastruktur dengan berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aan. (2024, Juni 25). Peran Pemuda dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Binangun. (A. K. (Peneliti), Interviewer)
- Adam Latif, dkk. (2019). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Timoreng Panua Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang. *Jurnal Moderat, Volume 5, Nomor 1*, 1-15.
- Alplanus M & Firman F. (2019). Upaya Perencanaan Pembangunan Desa Dalam Bidang Infrastruktur Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol 8, No 3*, 53-58.
- Amalia, Rizki & Firmadhani, Citra. (2022). *Teknik Pengambilan Keputusan*. Bandung: Penerbit RTujuh Mediaprinting.
- APBD Desa Binangun. (2023). *Anggaran Pendapatan Desa Binangun Tahun 2023*. Desa Binangun, Kabupaten Cilacap.
- Ardhita Yuliana Nugraheni. (2017). *Pengaruh Pengetahuan Politik dan Aktor Politik Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Desa Trimurti, Srandakan, Bantul Pada Pilkada 2015*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Ariadi, Andi. (2019). Perencanaan Pembangunan Desa. *Meraja Journal, Vol. 2, No. 2*, 135-147.
- Arifin, T. (2024, Juni 2). Wawancara tentang pembangunan infrastruktur Desa Binangun. (A. K. (Peneliti), Interviewer)
- Ayu Hartatik, dkk. (2024). Proses Pengambilan Keputusan Kepala Desa Dalam Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Desa Gadu Timur Kabupaten Sumenep. *Prosiding Seminar Nasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Volume 1 Nomer 1*, 98-108.
- Briliant Nauval H. (2022). Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Jalan Kabupaten di Kabupaten Kendal. *Universitas Diponegoro*, 1-14.
- Desa Binangun, 2024. (n.d.). *Transparansi Anggaran Desa Binangun 2024*. Retrieved Maret 7, 2024
- Ferdiansyah, A.Fajar. (2019). Politik Pembangunan (Studi terhadap Pembangunan Kawasan Industri Bantaeng di Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng). *Skripsi, UIN ALAUDDIN Makasar*, 1-64.

- Ferdiansyah, A.Fajar. (2019). POLITIK PEMBANGUNAN (Studi terhadap Pembangunan Kawasan Industri Bantaeng di Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng). *Skripsi, UIN ALAUDDIN Makasar*, 1-64.
- Fiantika Feny R, dkk. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Padang Sumatera Barat: PT. Global Eksekutif Teknologi.
- Hadi, S. (2001). *Metodologi Rasearch*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Hanifan, A. (2024, Juni 25). Peran Tokoh Masyarakat dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Binangun. (A. K. (Peneliti), Interviewer)
- Harrison. E. F. (1999). *The Managerial Decision-Making Process*. Boston: Houghton Mifflin.
- Husain Abdurahman, dkk. (2021). Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Pemabngunan Desa Wisata Melalui Metode Serap Aspirasi Masyarakat. *Journal Empowerment and Community Service, Vol. 1, No.1*, 54-59.
- Indah P.K. & Deby F.E. (2022). Analisis Pelaksanaan Musrenbang Desa Terhadap Peningkatan Pembangunan di Desa Gayam Kabupaten Kediri. *Publika, Volume 10, Nomor 2*, 441-456.
- Irawan, Hadi. (2022). Pengelolaan Pembangunan Infrastruktur di Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis. *Universitas Islam Riau Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 1-81.
- Ireyena, Paulus. dkk. (2019). Analisis Pengaruh Infrastruktur Jalan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Kaimana 2007-2017. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, Volume 19 No. 02* , 49-59.
- Ismiyati. (2024, Juni 25). Wawancara Mengenai Peran Kelompok Perempuan Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Binangun. (A. K. (Peneliti), Interviewer)
- Kaming, Peter F. & Raharjo, Ferianto. (2017). Kajian Mengenai Kecukupan Infrastruktur di Kawasan Timur Indonesia. *Prosiding Konferensi Nasional Teknik Sipil dan Perencanaan (KN-TSP) Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, 310-320.
- Kemendes, 2023. (n.d.). *Data Indeks Membangun (IDM) Kecamatan Bantarsari, Desa Binangun*. Retrieved Februari 21, 2024, from SIDesa Jawa Tengah: <https://sidesa.jatengprov.go.id/pemkab/idmdes/33.01.20.2008>
- Kurniasanndi, Vicky. (2015). Politik Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kabupaten Pacitan. *Mahasiswa Universitas Airlangga*.

- Kurniawati, Sri; & Asyurahman. (2018). Pembangunan Infrastruktur Dan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Kalimantan Barat. *Prosiding SATIESP 2018 FEB Universitas Tanjungpura*, 127-143.
- Lalu Moh. Nazar F. (2017). Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Jalan Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa (Studi Kasus di Desa Jenggala Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara). *Jurnal SIKAP, Vol. 1 Nomor 1*, 11-22.
- Mardiyono. (2024, Maret 8). Wawancara Pemerintah Desa Bulaksari Mengenai Pembangunan Infrastruktur. (A. K. (Peneliti), Interviewer)
- Mas'oed. (2015). *Politik, Birokrasi dan Pembangunan*. Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR Celeban Timur UH III/548 Yogyakarta 55167.
- Moleong. (2020). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Miftahuljanah & Budi Setiawati. (2023). Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Jalan di Desa Masintan Kecamatan Kelua Kabupten Tabalong. *JAPB, Volume 6 Nomor 1*, 172-1180.
- Moeljarto T. (1987). *Politik Pembangunan Sebuah Analisis Konsep, Arah dan Strategi*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya.
- Moeljarto T. (1987). *POLITIK PEMBANGUNAN Sebuah Analisis Konsep, Arah dan Strategi*. Yogyakarta: PT. TIARA WACANA YOGYA.
- Mumfaridah. (2024, Juni 25). Wawancara mengenai Pembangunan Infrastruktur Desa Binangun bagi PKK. (A. K. (Peneliti), Interviewer)
- Nasikun. (2024, Juni 26). Wawancara mengenai Pembangunan Infrastruktur Desa Binangun bagi petani. (A. K. (peneliti), Interviewer)
- Nurhayati & Aji Fajar S.A. (2024). Mengurai Rupa Keterlibatan Masyarakat Dalam Pengambilan Keputusan di Desa Paya Benua, Negeri Laskar Pelangi. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara, Volume 11 Nomor 1*, 21-71.
- PERPRES Nomor 67 Tahun 2005. (n.d.). *Database Peraturan JDIH Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur*. Retrieved November 20, 2023, from <https://peraturan.bpk.go.id/Details/42594/perpres-no-67-tahun-2005>
- Priono. (2024, Juni 2). Wawancara Tentang Pembangunan Infrastruktur Desa Binangun. (A. K. (Peneliti), Interviewer)

- Putri, Nora Eka. (2020). Politik Kebijakan Iinfrastruktur:Tinjauan Pustaka Kebijakan Infrastruktur Transportasi. *JESS (Journal of Education on Social Science)*, Vol. 4 No. 1, 14-24.
- Ratnasari, Puput. (2020). Politik Pembangunan di Kota Palangka Raya Menuju Smart City Kota Palangka Raya. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol 6, No 1, 1-10.
- Rifa'i Ahmad. (n.d.). Proses Pengambilan Keputusan. *Universitas Negeri Padang* , 1-12.
- Rizky Dermawan. (2022). *Pengambilan Keputusan*. Bandung: Alfabeta.
- RKPDes Binangun. (2023). *Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Anggaran 2023*. Desa Binangun Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap.
- RPJMD Binangun. (2019-2025). *Profil Desa Binangun*. Desa Binangun Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap.
- Rusiman. (2024, Juni 25). Wawancara mengenai Pembangunan Infrastruktur Desa Binangun. (A. K. (Peneliti), Interviewer)
- Saminudin. (2024, Juni 2). Wawancara mengenai Pembangunan Infrastruktur Desa Binangun. (A. K. (Peneliti), Interviewer)
- Santosa, Sari Bela Putri. (2020). Strategi Kebijakan Dalam PembangunanInfrastruktur Desa (Studi Kasus dalam pembangunan infrastruktur di Desa Sidomulyo, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo). *Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya*, 1-205.
- Siagian, Sondang. P. (2005). *Admininistrasi Pembangunan, Konsep Dimensi dan Strateginya*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sianturi, Ronny. (2016). Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Melalui Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Bebakung Kecamatan Betayu Kabupaten Tana Tidung. *eJournal Administrasi Negara*, Vol 4, No 1, 2153-2166.
- Sihombing, Dwi Ayu R & Kusmanto, Heri. (2017). Politik Pembangunan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2010-2015. *Jurnal Politeia*, Vol.9 No.1, 39-47.
- Simbolon, Dewi S. dkk. (2021). Peran Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur. *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 5 No.2 , 295-302.
- Siran. (2024, Mei 29). Wawancara Budaya dan kesenian Desa Binangun.

- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: ALFABETA, cv Jl. Gegerkalong Hilir No. 84 Bandung.
- Suratno. (2024, Juni 25). Wawancara mengenai Pembangunan Infrastruktur Desa Binangun. (A. K. (Peneliti), Interviewer)
- UU RI No. 6 Tahun 2014. (n.d.). *UU RI No. 6 Tahun 2014*. Retrieved Maret 6, 2024, from JDIH Database Peraturan: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38582/uu-no-6-tahun-2014>
- Warjio. (2016). *Politik Pembangunan: Paradoks, Teori, Aktor, dan Ideologi*. Jakarta: Kencana .
- Winarno, Budi. (2013). *Etika Pembangunan*. Jakarta: PT.BUKU SERU.

## LAMPIRAN

### Wawancara dengan Pemerintah dan Masyarakat Desa Binangun



### Kegiatan Musyawarah Dusun (Musdus)



### Kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes)



# Daftar Hadir Musrenbangdes 2022-2023

## DAFTAR HADIR

: Selasa, 18 Oktober 2022  
: Balai Desa Binangun  
: Penyusunan Rencana Pembangunan Desa (RKP Desa) Tahun 2023 dan  
: Daftar Usulan RKP Desa Tahun 2024.

NO	NAMA	JENIS KELAMIN		JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
		LK	PR			
1	Wagdyo	✓		Selam	Binangun	1
2	Wagdyo	✓		Kon. Pmp	Binangun	2
3	Perdik	✓		Perdik	Korwil Bter	3
4	W. Baniyah		✓	Ket. TP dele	Sidamulya	4
5	DORO	✓		K. Baniyah	Binangun	5
6	Kupriyanto	✓		Epulisow	Bantarasan	6
7	Klamisam		✓	PLD	Bantarasan	7
8	M. HIASINI BAKIN	L		K. HIASINI BAKIN	Bantarasan	8
9	Boxu Indra R.	L		PO	Bantarasan	9
10	ROSEK. P.	L		WAT PERD	Binangun	10
11	RAJONO	✓		KADUS	SIDAMULYA	11
12	Si Sartano		✓	TP. P. K. K. K.	B. T.	12
13	SADI RINI			BOD	Binangun	13
14	Abdur Rohman	✓		RT	Binangun	14
15	Wahidin-saring	✓		SRW.	Binangun	15
16	Wahidin	✓		SRW.	Binangun	16
17	M. HIASINI BAKIN	L		RT 01/02	CIGEBRET	17
18	M. HIASINI BAKIN	L		RT 01/02	Binangun	18
19	Kasim	✓		RT 03	SIDAMULYA	19
20	AVIT UTOMO	✓		RT 03	SIDAMULYA	20
21	PAKAR	✓		RT 03	SIDAMULYA	21
22	SIAMET R.	✓		RT	SIDAMULYA	22
23	TURBANO	✓		RT 04	SIDAMULYA	23
24	Saripudin Edy P.	✓		RT 04	CIGEBRET	24
25	MURRODI	✓		RT 10	Binangun	25
26	EPI BUDI P.	✓		KPM D	Tambakreja	26
27	S. Suciwani	✓		RT 01/02	Tambakreja	27
28	Hurman	✓		RT 01/02	Tambakreja	28
29	K. HIASINI BAKIN	L		RT 01/02	Binangun	29
30	Abdul Wacan	✓		RT 01/02	Tambakreja	30
31	Hadiudin	✓		RT 01/02	Tambakreja	31
32	Fidriyul	✓		RT 01/02	CIGEBRET	32
33	Z. Rusman	✓		RT 01/02	CIGEBRET	33
34	K. HIASINI BAKIN	L		RT 01/02	Tambakreja	34
35	Adhams	✓		RT 01/02	Tambakreja	35
36	S. Suciwani	✓		RT 01/02	Tambakreja	36
37	Abdul Wacan	✓		RT 01/02	Tambakreja	37
38	Si Sartano	✓		RT 01/02	Tambakreja	38

1	Wagdyo	L	PR	Binangun	1
2	Wagdyo	L	PR	Binangun	2
3	Perdik	L	PR	Binangun	3
4	W. Baniyah	L	PR	Binangun	4
5	DORO	L	PR	Binangun	5
6	Kupriyanto	L	PR	Binangun	6
7	Klamisam	L	PR	Binangun	7
8	M. HIASINI BAKIN	L	PR	Binangun	8
9	Boxu Indra R.	L	PR	Binangun	9
10	ROSEK. P.	L	PR	Binangun	10
11	RAJONO	L	PR	Binangun	11
12	Si Sartano	L	PR	Binangun	12
13	SADI RINI	L	PR	Binangun	13
14	Abdur Rohman	L	PR	Binangun	14
15	Wahidin-saring	L	PR	Binangun	15
16	Wahidin	L	PR	Binangun	16
17	M. HIASINI BAKIN	L	PR	Binangun	17
18	M. HIASINI BAKIN	L	PR	Binangun	18
19	Kasim	L	PR	Binangun	19
20	AVIT UTOMO	L	PR	Binangun	20
21	PAKAR	L	PR	Binangun	21
22	SIAMET R.	L	PR	Binangun	22
23	TURBANO	L	PR	Binangun	23
24	Saripudin Edy P.	L	PR	Binangun	24
25	MURRODI	L	PR	Binangun	25
26	EPI BUDI P.	L	PR	Binangun	26
27	S. Suciwani	L	PR	Binangun	27
28	Hurman	L	PR	Binangun	28
29	K. HIASINI BAKIN	L	PR	Binangun	29
30	Abdul Wacan	L	PR	Binangun	30
31	Hadiudin	L	PR	Binangun	31
32	Fidriyul	L	PR	Binangun	32
33	Z. Rusman	L	PR	Binangun	33
34	K. HIASINI BAKIN	L	PR	Binangun	34
35	Adhams	L	PR	Binangun	35
36	S. Suciwani	L	PR	Binangun	36
37	Abdul Wacan	L	PR	Binangun	37
38	Si Sartano	L	PR	Binangun	38

39	W. Baniyah	L	PR	Binangun	39
40	DORO	L	PR	Binangun	40
41	Kupriyanto	L	PR	Binangun	41
42	Klamisam	L	PR	Binangun	42
43	M. HIASINI BAKIN	L	PR	Binangun	43
44	Boxu Indra R.	L	PR	Binangun	44
45	ROSEK. P.	L	PR	Binangun	45
46	RAJONO	L	PR	Binangun	46
47	Si Sartano	L	PR	Binangun	47
48	SADI RINI	L	PR	Binangun	48
49	Abdur Rohman	L	PR	Binangun	49
50	Wahidin-saring	L	PR	Binangun	50
51	Wahidin	L	PR	Binangun	51
52	M. HIASINI BAKIN	L	PR	Binangun	52
53	M. HIASINI BAKIN	L	PR	Binangun	53
54	Kasim	L	PR	Binangun	54
55	AVIT UTOMO	L	PR	Binangun	55
56	PAKAR	L	PR	Binangun	56
57	SIAMET R.	L	PR	Binangun	57
58	TURBANO	L	PR	Binangun	58
59	Saripudin Edy P.	L	PR	Binangun	59
60	MURRODI	L	PR	Binangun	60
61	EPI BUDI P.	L	PR	Binangun	61
62	S. Suciwani	L	PR	Binangun	62
63	Hurman	L	PR	Binangun	63
64	K. HIASINI BAKIN	L	PR	Binangun	64
65	Abdul Wacan	L	PR	Binangun	65
66	Hadiudin	L	PR	Binangun	66
67	Fidriyul	L	PR	Binangun	67
68	Z. Rusman	L	PR	Binangun	68
69	K. HIASINI BAKIN	L	PR	Binangun	69
70	Adhams	L	PR	Binangun	70
71	S. Suciwani	L	PR	Binangun	71
72	Abdul Wacan	L	PR	Binangun	72
73	Si Sartano	L	PR	Binangun	73
74	SADI RINI	L	PR	Binangun	74
75	Abdur Rohman	L	PR	Binangun	75
76	Wahidin-saring	L	PR	Binangun	76
77	Wahidin	L	PR	Binangun	77
78	M. HIASINI BAKIN	L	PR	Binangun	78
79	M. HIASINI BAKIN	L	PR	Binangun	79
80	Kasim	L	PR	Binangun	80
81	AVIT UTOMO	L	PR	Binangun	81
82	PAKAR	L	PR	Binangun	82
83	SIAMET R.	L	PR	Binangun	83
84	TURBANO	L	PR	Binangun	84
85	Saripudin Edy P.	L	PR	Binangun	85
86	MURRODI	L	PR	Binangun	86
87	EPI BUDI P.	L	PR	Binangun	87
88	S. Suciwani	L	PR	Binangun	88
89	Hurman	L	PR	Binangun	89
90	K. HIASINI BAKIN	L	PR	Binangun	90
91	Abdul Wacan	L	PR	Binangun	91
92	Hadiudin	L	PR	Binangun	92
93	Fidriyul	L	PR	Binangun	93
94	Z. Rusman	L	PR	Binangun	94
95	K. HIASINI BAKIN	L	PR	Binangun	95
96	Adhams	L	PR	Binangun	96
97	S. Suciwani	L	PR	Binangun	97
98	Abdul Wacan	L	PR	Binangun	98
99	Si Sartano	L	PR	Binangun	99
100	SADI RINI	L	PR	Binangun	100
101	Abdur Rohman	L	PR	Binangun	101
102	Wahidin-saring	L	PR	Binangun	102
103	Wahidin	L	PR	Binangun	103
104	M. HIASINI BAKIN	L	PR	Binangun	104
105	M. HIASINI BAKIN	L	PR	Binangun	105
106	Kasim	L	PR	Binangun	106
107	AVIT UTOMO	L	PR	Binangun	107
108	PAKAR	L	PR	Binangun	108
109	SIAMET R.	L	PR	Binangun	109
110	TURBANO	L	PR	Binangun	110
111	Saripudin Edy P.	L	PR	Binangun	111
112	MURRODI	L	PR	Binangun	112
113	EPI BUDI P.	L	PR	Binangun	113
114	S. Suciwani	L	PR	Binangun	114
115	Hurman	L	PR	Binangun	115
116	K. HIASINI BAKIN	L	PR	Binangun	116
117	Abdul Wacan	L	PR	Binangun	117
118	Hadiudin	L	PR	Binangun	118
119	Fidriyul	L	PR	Binangun	119
120	Z. Rusman	L	PR	Binangun	120



## Transparansi Anggaran Desa



## Dokumntasi RPJMD Desa Binangun

**Matrik Tahapan dan Alur Penyusunan RPJM Desa**

Permendagri No. 114/2014 Pasal 7 Ayat 3 Pasal 7 Ayat 3 mengatur tahapan penyusunan RPJM Desa yaitu :

- Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa.
- Penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten/kota.
- Pengkajian keadaan desa.
- Penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah desa.
- Penyusunan rancangan RPJM Desa.
- Penyusunan rencana pembangunan desa melalui musrenbang desa).
- Penetapan RPJM Desa.

Secara rinci tahapan dan keluaran serta pelaku dalam penyusunan RPJM Desa ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No	Tahapan/Kegiatan	Hasil/Keluaran	Keterangan
1	Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa	Terbentuknya Tim Penyusun RPJM Desa yang beranggota 11 orang	Dibentuk oleh Kepala Desa dengan SK Kepala Desa
2	Penyelarasan arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota	Data dan analisis : • RPJMD kabupaten/kota; • Rencana strategis satuan kerja perangkat daerah; • Rencana umum tata ruang wilayah kabupaten/kota; • Rencana rinci tata ruang wilayah	Dilakukan oleh Tim Penyusun RPJM Desa

6	Pavingisasi halaman dan Pagar Masjid Darussalam dusun Sidamulya		
7	Pemb. gedung TPQ Al Ikhlas Dsn Sidamulya		
11.5	<b>INFRASTRUKTUR / SARANA PRASARANA</b>		
1	Pembangunan Talud Jalan Igr Gadung Sidamulya	P 1500 M	
2	Makadam Jl Igr Gadung ke Jl Winong Dusun Sidamulya	P 100MX 2.5 M	
3	Pembuatan Badan jalan Igr Gadung ke Jl winong Dusun Sidamulya	P 274 x L 4 M	
4	Peningkatan Gang Dusun Sidamulya	P 250 X1 M	
5	Pemb. Talud Jl Citatah Dsn Sidamulya	P 300 M	
6	Pemb. Talud Jl Rt 01/03 Dusun Sidamulya	P 500x0.3xT 0.7M	
7	Pembongkaran Igr Sungai Ciberem lokasi Rt 04/04 Dusun Sidamulya	P 150 M	
8	Peningkatan jalan Mangga Dsn Sidamulya	P 600X 2.5 M	
9	Peningkatan Jl.Beringin Dsn. Sidamulya	P.750X 2.5 M	
10	Peningkatan Jl. Citatah Dsn.Sidamulya	P.600X 2.5 M	
11	penerusan ges jalan Citatah		
12	Perbaikan paving tiap Gang		
13	Pembangunan ges diselokan jalan utama	Rt 01 /03	
14	Perbaikan jalan utama	Rt 01 /03	
15	Pengecoran jalan setapak	Rt 03 /03	
16	Perawatan paving gang	Rt 03/03	
17	Perawatan jalan Beringin	Rt 03/03	
18	Peningkatan jalan Mangga		
19	Drainase aliran air lingkungan	Rt 03/03	
20	Rabat beton gang Lingkungan	Rt 03 /03	
21	Peningkatan jalan Igr gadung ke Jl. Winong		
22	Rabat beton jln Igr gadung ke Winong		
23	Rabat beton / pelebaran jln perli	Rt 01 / 03	
24	Meneruskan jalan talud dusun Sidamulya		
25	Drainase saluran air	Rt 04/03 dan Rt	
26	Perwatan paving gang	Rt 02/03	
27	Perwatan paving gang	Rt 04/03	
28	Pembuatan Gapura gang/jalan Lingkungan dusun Sidamulya		
29	Membuat tembusan jalan gang Warak ke gunung kulon	Rt 05/03	
30	Membuat pos ronda dusun Sidamulya		

## Dokumentasi RKPD Desa Binangun

NO	URAIAN	MIMBUK			MERTAJI			SELISIH	SASARAN LAIN
		VOL	SAT.	ANGGARAN (Rp.)	VOL	SAT.	ANGGARAN (Rp.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Pengadaan alat bantu penyandang disabilitas								
	lain-lain kegiatan sub bidang kesehatan*								
	<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>			<b>858.324.000</b>			<b>868.776.500</b>	<b>10.452.500</b>	
	Pemeliharaan Jalan Desa	7	paket	99.194.000	8	Paket	97.886.500	(1.307.500)	DDS
	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani								
	Pemeliharaan Jembatan Milik Desa								
	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain)								
	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Masyarakat								
	Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik Ds.								
	Pemeliharaan Embung Milik Desa								
	Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa								
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **	3	paket	365.000.000	3	paket	365.000.000	-	PBK, PBP
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **	3	paket	219.600.000	4	paket	216.285.000	(3.315.000)	DDS
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **	1	paket	50.000.000	1	paket	50.000.000	-	PAD
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) **	2	paket	64.530.000	3	paket	76.105.000	11.575.000	DDS, PBK
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Masyarakat**				1	Paket	3.500.000	3.500.000	DDS
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan	1	paket	60.000.000	1	paket	60.000.000	-	PAD
	Pembuatan/Permutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa **								
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa								
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa **								
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa **								
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Talud / Turap / Tembok Penahan Tanah (TFT)								
	lain-lain kegiatan sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang*								

## Dokumentasi Pelaksanaan pembangunan



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Ahmad Khubbi Sauhi

TTL : Cilacap, 29 April 2002

Alamat : Bantarsari Cilacap

NIM : 2006016012

Jurusan : Ilmu Politik

Fakultas: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Agama : Islam

Email : [Ahmadkhubi29@gmail.com](mailto:Ahmadkhubi29@gmail.com)

No. HP : 087812911858

### RIWAYAT PENDIDIKAN

TK Kartika Sari (2007-2008)

SDN 1 Bulaksari (2008-2014)

SMPN 1 Bantarsari (2014-2017)

MAN 2 Kebumen (2017-2020)

### RIWAYAT ORGANISASI

Anggota PMII Rayon FISIP UIN Walisongo (2021-2022)

Anggota Devisi Pengkaderan IMAKE Walisongo (2021-2023)

Anggota Komisi 1 SEMA FISIP UIN Walisongo (2022)

Koordinator Devisi Tenis Meja UKM FSC FISIP UIN Walisongo (2022)

Koordinator Devisi Kesenian UKM QAI FISIP UIN Walisongo (2022)

Wakil Ketua Umum SEMACI Walisongo (2022)

Ketua UMUM SEMACI Walisongo (2022-2023)

### RIWAYAT MAGANG

Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah (2023)